



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 27 TAHUN 2016**

TENTANG

**KODE REKENING PENGANGGARAN KABUPATEN PACITAN
TAHUN ANGGARAN 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

Menimbang : bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 77 ayat (11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kode Rekening Penganggaran Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KODE REKENING PENGANGGARAN KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2017**

Bupati Pacitan		Bupati Pacitan	
Sekda	<input checked="" type="checkbox"/>	SKPD/Bagian Pemrakarsa	<input checked="" type="checkbox"/>
Asisten	<input checked="" type="checkbox"/>	SKPD/Bagian Terkait	
Kabag Hukum	<input checked="" type="checkbox"/>	1. _____	
		2. _____	
		3. _____	

**BAB I
KBTENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pacitan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan.
3. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
4. Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah pada pemerintah daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan daerah .
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan
7. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
8. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
9. Kode rekening penganggaran yang selanjutnya disebut kode rekening adalah kode rekening yang digunakan dalam penyusunan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBD dimulal dari kode urusan pemerintahan daerah, kode organisasi, kode program, kode kegiatan, kode akun, kode kelompok, kode jenis, kode obyek, dan kode rincian obyek.

**BAB H
RUANG LINGKUP**

Pasal 2

Kode rekening yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Kode urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- b. Kode Rekening Program dan Kegiatan;
- c. Kode Rekening Pendapatan;
- d. Kode Rekening Belanja; dan
- e. Kode Rekening Pembiayaan.

**BAB III
KODE REKENING URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI**

Pasal 3

- (1) Setiap urusan Pemerintahan Daerah dan organisasi yang dicantumkan dalam APBD menggunakan kode urusan Pemerintahan Daerah dan Kode Organisasi.

Paraf Hierarki	
Sekda	✓
Asisten	✓
Kabag Hukum	✓

Paraf Koordinasi	
SKPD/ Bagian Pemrakarsa	
SKPD/ Bagian Terkait:	
1. _____	
2. _____	
3. _____	

- (2) Kode dan klarifikasi Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB IV
KODE REKENING PROGRAM DAN KEGIATAN**

Pasal 4

- (1) Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi Perangkat Daerah.
- (2) Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa
- (3) Urutan Kode Program dan Kegiatan adalah kode program dan kode kegiatan.
- (4) Kode rincian Program dan Kegiatan tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

**BAB V
KODE REKENING PENDAPATAN**

Pasal 5

Kode pendapatan yang digunakan dalam penganggaran menggunakan kode akun pendapatan yang merupakan bagian susunan kode akun keuangan daerah.

Pasal 6

- (1) Urutan Kode Pendapatan adalah kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek.
- (2) Kode rincian obyek pendapatan tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

**BAB VI
KODE REKENING BELANJA**

Pasal 7

Kode belanja yang digunakan dalam penganggaran menggunakan kode akun Belanja yang merupakan bagian susunan kode akun keuangan Daerah.

Pasal 8

- (1) Urutan Kode belanja adalah program, kegiatan, jenis, obyek serta rincian obyek.

Panci Hierarki	Panci Koordinasi
Sekda	SKPD/Bagian Pemrakarsa
Asisten	SKPD/Bagian Terkait
Kabag	1. _____
Hukum	2. _____
	3. _____

- (2) Kode rincian obyek belanja tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

**BAB VII
KODE REKENING PEMBIAYAAN**

Pasal 9

Kode pembiayaan yang digunakan dalam penganggaran menggunakan kode akun pembiayaan yang merupakan bagian susunan kode akun keuangan daerah.

Pasal 10

- (1) Urutan Kode Pembiayaan adalah kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek.
- (2) Kode rincian obyek pembiayaan tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

**BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN**





Pasal 11

- (1) Peraturan Bupati ini dijadikan pedoman penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017
- (2) Peraturan Bupati Pacitan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Peraturan Bupati tentang Kode Rekening Penganggaran Kabupaten Pacitan sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 48 Tahun 2016 dijadikan pedoman penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016

**BAB IX
PENUTUP**

Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Pacitan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Kode Rekening Penganggaran Kabupaten Pacitan sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 48 Tahun 2016 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi pada tanggal 1 Januari 2017

Paraf Hierarki		Paraf Koordinasi	
Sekda		PD/ Bagian Pemrakaraa	
Asisten		PD/ Bagian Terkait :	
Kabag Hukum		1. _____	
		2. _____	
		3. _____	

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
pada tanggal 30 - 6 - 2016

BUPATI PACITAN



INDARTATO

Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 30 Juni 2016

**SEKRBTARIS DAERAH
KABUPATEN PACITAN**



Drs. SUKO WIYONO, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19591017 198503 1 015

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2016 NOMOR 27

- (2) Kode rincian obyek belanja tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB VII KODE REKENING PEMBIAYAAN

Pasal 9

Kode pembiayaan yang digunakan dalam penganggaran menggunakan kode akun pembiayaan yang merupakan bagian susunan kode akun keuangan daerah.

Pasal 10

- (1) Urutan Kode Pembiayaan adalah kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek.
- (2) Kode rincian obyek pembiayaan tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

- (1) Peraturan Bupati ini dijadikan pedoman penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017
- (2) Peraturan Bupati Pacitan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Peraturan Bupati tentang Kode Rekening Penganggaran Kabupaten Pacitan sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 48 Tahun 2016 dijadikan pedoman penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016

BAB IX PENUTUP

Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Pacitan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Kode Rekening Penganggaran Kabupaten Pacitan sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 48 Tahun 2016 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi pada tanggal 1 Januari 2017

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pacitan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan.
3. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
4. Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah pada pemerintah daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan daerah .
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan
7. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
8. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
9. Kode rekening penganggaran yang selanjutnya disebut kode rekening adalah kode rekening yang digunakan dalam penyusunan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBD dimulai dari kode urusan pemerintahan daerah, kode organisasi, kode program, kode kegiatan, kode akun, kode kelompok, kode jenis, kode obyek, dan kode rincian obyek.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Kode rekening yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Kode urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- b. Kode Rekening Program dan Kegiatan;
- c. Kode Rekening Pendapatan;
- d. Kode Rekening Belanja; dan
- e. Kode Rekening Pembiayaan.

BAB III KODE REKENING URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Setiap urusan Pemerintahan Daerah dan organisasi yang dicantumkan dalam APBD menggunakan kode urusan Pemerintahan Daerah dan Kode Organisasi.

- (2) Kode dan klarifikasi Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV KODE REKENING PROGRAM DAN KEGIATAN

Pasal 4

- (1) Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi Perangkat Daerah.
- (2) Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa
- (3) Urutan Kode Program dan Kegiatan adalah kode program dan kode kegiatan.
- (4) Kode rincian Program dan Kegiatan tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB V KODE REKENING PENDAPATAN

Pasal 5

Kode pendapatan yang digunakan dalam penganggaran menggunakan kode akun pendapatan yang merupakan bagian susunan kode akun keuangan daerah.

Pasal 6

- (1) Urutan Kode Pendapatan adalah kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek.
- (2) Kode rincian obyek pendapatan tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB VI KODE REKENING BELANJA

Pasal 7

Kode belanja yang digunakan dalam penganggaran menggunakan kode akun Belanja yang merupakan bagian susunan kode akun keuangan Daerah.




Pasal 8


- (1) Urutan Kode belanja adalah program, kegiatan, jenis, obyek serta rincian obyek.

Lampiran I : Peraturan Bupati Pacitan
 Nomor :
 Tanggal :

**KODE DAN KLASIFIKASI
 URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI**

Kode	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
1	2
1.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1.01.	PENDIDIKAN
1.02.	KESEHATAN
1.03.	PEKERJAAN UMUM
1.04.	PERUMAHAN
1.05.	PENATAAN RUANG
1.06.	SOSIAL
1.07.	TENAGA KERJA
1.08.	TRANSMIGRASI
1.09.	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
2.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
2.01.	PERHUBUNGAN
2.02.	LINGKUNGAN HIDUP
2.04.	PERTANAHAN
2.05.	KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2.06.	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.07.	KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA
2.08.	KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
2.09.	PENANAMAN MODAL
2.10.	KEBUDAYAAN
2.11.	PEMUDA DAN OLAH RAGA
2.12.	PARIWISATA
2.13.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
2.14.	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.15.	KEARSIPAN
2.16.	PERPUSTAKAAN
2.17.	KETAHANAN PANGAN
2.18.	PERDAGANGAN
2.19.	INDUSTRI
2.20.	STATISTIK
3.	URUSAN PILIHAN
3.01.	PERTANIAN
3.02.	KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.03.	KEHUTANAN
3.04.	ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
4.	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
4.01.	PERENCANAAN PEMBANGUNAN
4.02.	PEMERINTAHAN UMUM

Paraf Hierarki	
Sekda	
Asisten	
Kabag Hukum	

Paraf Koordinasi	
PD/ Bagian Pemrakarsa	
PD/ Bagian Terkait :	
1. _____	
2. _____	
3. _____	

Kode	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
1	2
1.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1.01.	PENDIDIKAN
1.01.01.	DINAS PENDIDIKAN
1.02.	KESEHATAN
1.02.01.	DINAS KESEHATAN
1.02.02.	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
1.03.	PEKERJAAN UMUM
1.03.01.	DINAS BINAMARGA DAN PENGAIRAN
1.04.	PERUMAHAN
1.04.01.	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1.05.	PENATAAN RUANG
1.05.01.	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.06.	SOSIAL
1.06.01.	DINAS SOSIAL
1.07.	TENAGA KERJA
1.08.	TRANSMIGRASI
1.09.	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
1.09.01.	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
1.09.02.	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.09.03.	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
2.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
2.01.	PERHUBUNGAN
2.01.01.	DINAS PERHUBUNGAN
2.02.	LINGKUNGAN HIDUP
2.02.01.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.04.	PERTANAHAN
2.05.	KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2.05.01.	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.06.	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.07.	KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA
2.07.01.	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK
2.08.	KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
2.08.01.	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
2.09.	PENANAMAN MODAL
2.09.01.	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.10.	KEBUDAYAAN
2.11.	PEMUDA DAN OL AHRAGA

Parat Hierarki	
Sekda	✓
Asisten	f
Kabag Hukum	Q

Parat Koordinasi	
PD/ Bagian Pemrakaraa	✓
PD/ Bagian Terkait :	
1. _____	
2. _____	
3. _____	

Kode	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
1	2
2.11.01.	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2.12.	PARIWISATA
2.13.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
2.13.01.	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.14.	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.14.01.	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.15.	KEARSIPAN
2.16.	PERPUSTAKAAN
2.16.01.	DINAS PERPUSTAKAAN
2.17.	KETAHANAN PANGAN
2.17.01.	DINAS PANGAN
2.18.	PERDAGANGAN
2.19.	INDUSTRI
2.19.01.	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2.20.	STATISTIK
3.	URUSAN PILIHAN
3.01.	PERTANIAN
3.01.01.	DINAS PERTANIAN
3.02.	KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.02.01.	DINAS PERIKANAN
3.03.	KEHUTANAN
3.04.	ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
4.	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
4.01.	PERENCANAAN PEMBANGUNAN
4.01.01.	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
4.02.	PEMERINTAHAN UMUM
4.02.00.	PPKD
4.02.01.	DPRD
4.02.02.	BUPATI / WAKIL BUPATI
4.02.03.	SEKRETARIAT DAERAH
4.02.04.	SEKRETARIAT DPRD
4.02.05.	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
4.02.06.	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
4.02.07.	INSPEKTORAT
4.02.08.	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
4.02.09.	BADAN PENDAPATAN DAERAH
4.02.10.	KECAMATAN DONOROJO
4.02.11.	KECAMATAN PUNUNG
4.02.12.	KECAMATAN PRINGKUKU
4.02.13.	KECAMATAN PACITAN
4.02.14.	KECAMATAN KEBONAGUNG
4.02.15.	KECAMATAN ARJOSARI
4.02.16.	KECAMATAN NAWANGAN

Paraf Hierarki	
Sekda	✓
Asisten	✓
Kabag Hukum	✓

Paraf Koordinasi	
SKFD/ Bagian Femrakarsa	✓
SKPD/ Bagian Terkait:	
1. _____	
2. _____	
3. _____	

Kode	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
1	2
4.02.17.	KECAMATAN BANDAR
4.02.18.	KECAMATAN TEGALOMBO
4.02.19.	KECAMATAN TULAKAN
4.02.20.	KECAMATAN NGADIROJO
4.02.21.	KECAMATAN SUDIMORO

Bupati Pacitan



INDARTATO



Lampiran II : Peraturan Bupati Pacitan



Nomor :

Tanggal :

**PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2017**


Urusan : - NON URUSAN	
KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN
1	2
01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
01.01.	Penyediaan jasa sural menyural
01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
01.03.	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
01.04.	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS
01.05.	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
01.06.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
01.07.	Penyediaan jasa administrasi keuangan
01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor
01.09.	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
01.10.	Penyediaan alat tulis kantor
01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
01.12.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
01.13.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
01.14.	Penyediaan peralatan rumah tangga
01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
01.16.	Penyediaan bahan logistik kantor
01.17.	Penyediaan makanan dan minuman
01.18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
01.19.	Peningkatan dan Pengelolaan Administrasi Perkantoran
01.20.	Pengelolaan Administrasi Kepegawaian
01.21.	Pengelolaan Administrasi Aset
01.22.	Pengelolaan Administrasi Kepegawaian
01.23.	Peningkatan dan Pengelolaan Administrasi Perkantoran Bagi UPT
02.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
02.01.	Pembangunan rumah jabatan
02.02.	Pembangunan rumah dinas
02.03.	Pembangunan gedung kantor
02.04.	Pengadaan mobil jabatan
02.05.	Pengadaan kendaraan dinas/operasional
02.06.	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas
02.07.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor
02.08.	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas
02.09.	Pengadaan peralatan gedung kantor
02.10.	Pengadaan mebeleur
02.11.	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan
02.12.	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
02.13.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
02.14.	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
02.15.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
02.16.	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas
02.17.	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

Paraf Hierarki	
Sekda	
Asisten	
Kabag Hukum	




Paraf Koordinasi	
SKPD/ Bagian Pemrakarsa	
SKPD/ Eagian Terkait:	
1. _____	
2. _____	
3. _____	


KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN
1	2
15.06.	Pembangunan sarana dan prasarana olahraga
15.07.	Pembangunan sarana dan prasarana bermain
15.08.	Pembangunan ruang serba guna/aula
15.09.	Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir
15.10.	Pembangunan ruang unit kesehatan sekolah
15.11.	Pembangunan ruang ibadah
15.12.	Pembangunan perpustakaan sekolah
15.13.	Pembangunan jaringan instalasi listrik sekolah dan perlengkapannya
15.14.	Pembangunan sarana air bersih dan sanitary
15.15.	Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa
15.16.	Perigadaan pakaian seragam sekolah
15.17.	Pengadaan pakaian olahraga
15.18.	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa
15.19.	Pengadaan mebeluer sekolah
15.20.	pengadaan perlengkapan Sekolah
15.21.	Pengadaan alat rumah tangga sekolah
15.22.	Pengadaan sarana mobilitas sekolah
15.23.	Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah
15.24.	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah
15.25.	Pemeliharaan rutin/berkala ruang kelas sekolah
15.26.	Pemeliharaan rutin/berkala ruang guru sekolah
15.27.	Pemeliharaan rutin/berkala ruang locker siswa
15.28.	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olahraga
15.29.	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana bermain
15.30.	pemeliharaan rutin/berkala ruangan serba guna/aula
15.31.	Pemeliharaan rutin/berkala taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir
15.32.	Pemeliharaan rutin/berkala ruang unit kesehatan sekolah
15.33.	Pemeliharaan rutin/berkala ruang ibadah
15.34.	Pemeliharaan rutin/berkala perpustakaan sekolah
15.35.	Pemeliharaan rutin/berkala jaringan instalasi listrik sekolah dan perlengkapannya
15.36.	Pemeliharaan rutin/berkala sarana air bersih dan sanitary
15.37.	Pemeliharaan rutin/berkala alat praktik dan peraga siswa
15.38.	Pemeliharaan rutin/berkala mebeluer sekolah
15.39.	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan sekolah
15.40.	Pemeliharaan rutin/berkala alat rumah tangga sekolah
15.41.	Pemeliharaan rutin/berkala sarana mobilitas sekolah
15.42.	Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah
15.43.	Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah
15.44.	Rehabilitasi sedang/berat asrama siswa
15.45.	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah
15.46.	Rehabilitasi sedang/berat ruang guru sekolah
15.47.	Rehabilitasi sedang/berat ruang locker siswa
15.48.	Rehabilitasi sedang/berat sarana olahraga
15.49.	Rehabilitasi sedang/berat sarana bermain
15.50.	Rehabilitasi sedang/berat ruang serba guna/aula
15.51.	Rehabilitasi sedang/berat taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir
15.52.	Rehabilitasi sedang/berat ruang unit kesehatan sekolah
15.53.	Rehabilitasi sedang/berat ruang ibadah
15.54.	Rehabilitasi sedang/berat perpustakaan sekolah
15.55.	Rehabilitasi sedang/berat jaringan instalasi listrik sekolah dan perlengkapannya

Paraf Hierarki	
Sekda	
Asisten	
Kabag Hukum	

Paraf Koordinasi	
SKPD/ Bagian Pemrakarsa	
SKPD/ Bagian Terkait:	
1. _____	
2. _____	
3. _____	


KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN
1	2
15.56.	Rehabilitasi sedang/berat sarana air bersih dan sanitary
15.57.	Pelatihan Kompetensi tenaga pendidik
15.58.	Pengembangan Pendidikan anak Usia Dini
15.59.	Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini
15.60.	Pengembangan data dan informasi Pendidikan Anak Usia Dini
15.61.	Penyusunan kebijakan Pendidikan Anak Usia Dini
15.62.	Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini
15.63.	Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini
15.64.	Perencanaan dan penyusunan program Pendidikan Anak Usia Dini
15.65.	Publikasi dan sosialisasi pendidikan anak Usia Dini
15.66.	Monitoring, evaluasi dan Pelaporan
15.67.	Pembangunan talud dan pagar sekolah
15.68.	Penyelenggaraan akreditasi PAUD
15.69.	Bantuan operasional penyelenggaraan PAUD (DAK)
16.	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
16.01.	Pembangunan gedung sekolah
16.02.	Pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah
16.03.	pembangunan ruang kelas sekolah
16.04.	pembangunan ruang guru sekolah
16.05.	Pembangunan laboratorium dan ruang praktikum sekolah
16.06.	Pembangunan ruang locker siswa
16.07.	pembangunan sarana dan prasarana olahraga
16.08.	pembangunan ruang serba guna/aula
16.09.	Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir
16.10.	Pembangunan ruang unit kesehatan sekolah
16.11.	Pembangunan ruang ibadah
16.12.	peembangunan perpustakaan sekolah
16.13.	Pembangunan jaringan instalasi listrik sekolah dan perengkapannya
16.14.	Pembangunan sarana air bersih dan sanitary
16.15.	Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa
16.16.	Pengadaan pakaian seragam sekolah
16.17.	Pengadaan pakaian olahraga
16.18.	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa
16.19.	Pengadaan mebeluer sekolah
16.20.	Pengadaan Perlengkapan Sekolah
16.21.	Pengadaan alat rumah tangga sekolah
16.22.	Pengadaan sarana mobilitas sekolah
16.23.	Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah
16.24.	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah
16.25.	Pemeliharaan rutin/berkala ruang kelas sekolah
16.26.	Pemeliharaan rutin/berkala ruang guru sekolah
16.27.	pemeliharaan rutin/berkala ruang locker sekolah
16.28.	pemeliharaan rutin/berkala sarana prasarana olahraga
16.29.	Pemeliharaan rutin/berkala ruang serba guna/aula
16.30.	Pemeliharaan rutin/berkala taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir
16.31.	Pemeliharaan rutin/berkala ruang unit kesehatan sekolah
16.32.	Pemeliharaan rutin/berkala ruang ibadah
16.33.	Pemeliharaan rutin/berkala perpustakaan sekolah
16.34.	Pemeliharaan rutin/berkala jaringan instalasi listrik sekolah dan perengkapannya

Paraf Hierarki	
Sekda	
Asisten	
Kabag Hukum	

Paraf Koordinasi	
SxPD/ Bagian Pemrakarsa	
SxPD/ Bagian Ferkail:	
1. _____	
2. _____	
3. _____	

KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN
1	2
16.35.	Pemeliharaan rutin/berkala sarana air bersih dan sanitary
16.36.	Pemeliharaan rutin/berkala alat praktik dan peraga siswa
16.37.	Pemeliharaan rutin/berkala mebeluer sekolah
16.38.	Perueliharaan rutin/berkala perlengkapan sekolah
16.39.	Pemeliharaan rutin/berkala alat rumah tangga sekolah
16.40.	Pemeliharaan rutin/berkala sarana ruobilitas sekolah
16.41.	Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah
16.42.	Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah
16.43.	Rehabilitasi sedang/berat asrama siswa
16.44.	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah
16.45.	Rehabilitasi sedang/berat ruang guru sekolah
16.46.	Rehabilitasi sedang/berat laboratorium dan ruang praklikum sekolah
16.47.	Rehabilitasi sedang/berat sarana mobilitas sekolah
16.48.	Rehabilitasi sedang/berat ruang locker siswa
16.49.	Rehabilitasi sedang/berat sarana olahraga
16.50.	Rehabilitasi sedang/berat ruang serba guna/aula
16.51.	Rehabilitasi sedang/berat taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir
16.52.	Rehabilitasi sedang/berat ruang unit kesehatan sekolah
16.53.	rehabilitasi sedang/berat ruangan ibadah
16.54.	Rehabilitasi sedang/berat perpustakaan sekolah
16.55.	Rehabilitasi sedang/berat jaringan instalasi listrik sekolah dan perengkapannya
16.56.	Rehabilitasi sedang/berat sarana air bersih dan sanitary
16.57.	pelatihan kompetensi tenaga pendidik
16.58.	Pelatihan Kompetensi siswa berpreslasi
16.59.	Pelatihan Penyusunan kurikulum
16.60.	Pembinaan forum masyarakat peduli pendidikan
16.61.	Pembinaan SMP Terbuka
16.62.	Penambahan ruang kelas baru SMP/MTS/SMPLB
16.63.	Penyediaan bantuan Operasional Sekolah (SOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan non-Islam Setara SD dan SMP
16.64.	Penyediaan Biaya Operasional Madrasah
16.65.	Penyediaan buku pelajaran untuk SD/MI/SDLB dan SMP/MTS
16.66.	Penyediaan dana pengembangan sekolah Untuk SD/MI dan SMP/MTS
16.67.	Penyelenggaraan Paket A Setara SD
16.68.	Penyelenggaraan Paket B Setara SMP
16.69.	Pembinaan keiembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di satuan Pendidikan Dasar
16.70.	Pembinaan ruinat, bakat, dan kreativitas siswa
16.71.	Pengerubahan Comprehensive Teaching And Learning (CTL)
16.72.	Pengembangan materi belajar mengajar dan metode pembelajaran dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi
16.73.	Penyebariausan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar
16.74.	Penyediaan beasiswa retrieval untuk anak putus sekolah
16.75.	Penyediaan beasiswa transisi
16.76.	Penyelenggaraan akreditasi sekolah dasar
16.77.	Penyelenggaraan Multi-Grade Teaching di daerah terpencil
16.78.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
16.79.	Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) Dan Festival/Lomba Seni Siswa Nasional (Fis2N) SD Dan SMP
16.80.	Penyelenggaraan akreditasi sekolah dasar

Paraf Hierarki	
Sekda	
Asisten	
Kabag Hukum	




Paraf Koordinasi	
SKPD/ Bagian Pemrakarsa	
SKPD/ Bagian Terkait:	
1. _____	
2. _____	
3. _____	


KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN
1	2
16.81.	Penyediaan prasarana pendidikan dasar (DAK)
16.82.	Olympiade MIPA SD/SMP
16.83.	Pembinaan Gugus Sekolah Dasar
16.84.	Pembangunan Pagar Talud SD/ SMP
16.85.	Penyelenggaraan Ujian Nasional / Ujian Sekolah
16.86.	Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah
16.87.	Penerimaan Siswa Baru SD dan SMP
17.	Program Pendidikan Menengah
17.01.	Pembangunan gedung sekolah
17.02.	Pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah
17.03.	Penambahan ruang kelas sekolah
17.04.	Penambahan ruang guru sekolah
17.05.	Pembangunan laboratorium dan ruang praktikum sekolah (laboratorium bahasa, komputer, IPA, IPS dan lain-lain)
17.06.	Pembangunan ruang locker siswa
17.07.	Pembangunan sarana dan prasarana olahraga
17.08.	Pembangunan gedung serba guna/aula
17.09.	Pembangunan laman, lapangan upacara dan fasilitas parkir
17.10.	Pembangunan ruang unit kesehatan sekolah
17.11.	pembangunan ruang ibadah
17.12.	Pembangunan perpustakaan sekolah
17.13.	Pembangunan jaringan instalasi listrik sekolah dan perengkapannya
17.14.	Pembangunan sarana air bersih dan sanitary
17.15.	Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa
17.16.	Pengadaan pakaian seragam sekolah
17.17.	Pengadaan pakaian olahraga
17.18.	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa
17.19.	Pengadaan mebeluer sekolah
17.20.	Pengadaan Perlengkapan Sekolah
17.21.	Pengadaan alat rumah tangga sekolah
17.22.	Pengadaan sarana mobilitas sekolah
17.23.	Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah
17.24.	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah
17.25.	Pemeliharaan rutin/berkala ruang kelas sekolah
17.26.	Pemeliharaan rutin/berkala ruang guru sekolah
17.27.	Pemeliharaan rutin/berkala ruang locker siswa
17.28.	pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasana olahraga
17.29.	Pemeliharaan rutin/berkala ruang serba guna/aula
17.30.	Pemeliharaan rutin/berkala taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir
17.31.	Pemeliharaan rutin/berkala ruang unit kesehatan sekolah
17.32.	pemeliharaan rutin/berkala ruang ibadah
17.33.	Pemeliharaan rutin/berkala perpustakaan sekolah
17.34.	pemeliharaan rutin/berkala jaringan instalasi listrik sekolah dan perlengkapannya
17.35.	pembangunan rutin/berkala sarana air bersih dan sanitary
17.36.	Pemeliharaan rutin/berkala alat praktik dan peraga siswa
17.37.	Pemeliharaan rutin/berkala mebeluer sekolah
17.38.	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan sekolah
17.39.	Pemeliharaan rutin/berkala alat rumah tangga sekolah
17.40.	Pemeliharaan rutin/berkala sarana mobilitas sekolah
17.41.	Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah

Paraf Hierarki	
Sekda	✓
Asisten	✓
Kabag Hukum	✓



Paraf Koordinasi	
SKPD/ Bagian Pemrakarsa	✓
SKPD/ Bagian Terkait:	
1. _____	
2. _____	
3. _____	


KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN
1	2
17.42.	Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah
17.43.	Rehabilitasi sedang/berat asrama siswa
17.44.	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah
17.45.	Rehabilitasi sedang/berat ruang guru sekolah
17.46.	Rehabilitasi sedang/berat laboratorium dan ruang praktikum sekolah
17.47.	Rehabilitasi sedang/berat ruang locker siswa
17.48.	Rehabilitasi sedang/berat sarana olahraga
17.49.	Rehabilitasi sedang/berat ruang serba guna/aula
17.50.	Rehabilitasi sedang/berat taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir
17.51.	Rehabilitasi sedang/berat ruang unit kesehatan sekolah
17.52.	Rehabilitasi sedang/berat ruang ibadah
17.53.	Rehabilitasi sedang/berat perpustakaan sekolah
17.54.	Rehabilitasi sedang/berat jaringan instalasi listrik sekolah dan perengkapannya
17.55.	Rehabilitasi sedang/berat sarana air bersih dan sanitary
17.56.	Rehabilitasi sedang/berat sarana mobilitas sekolah
17.57.	Pelatihan Kompetensi tenaga pendidikan
17.58.	Pelatihan Penyusunan kurikulum
17.59.	Pembinaan forum masyarakat peduli pendidikan
17.60.	Pengembangan alternatif layanan pendidikan menengah untuk daerah-daerah perdesaan, terpencil dan kepulauan
17.61.	Penyediaan Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM)
17.62.	Penyediaan beasiswa bagi keluarga tidak mampu
17.63.	Penyelenggaraan Paket C setara SMU
17.64.	Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)
17.65.	Pengembangan metode belajar dan mengajar dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi
17.66.	Peningkatan Kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri
17.67.	Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan menengah
17.68.	Penyelenggaraan akreditasi sekolah menengah
17.69.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
17.70.	Dst....
18.	Program Pendidikan Non Formal
18.01.	Pemberdayaan tenaga pendidik non formal
18.02.	Pemberian bantuan operasional pendidikan non formal
18.03.	Pembinaan pendidikan kursus dan keiembagaan
18.04.	Pengembangan pendidikan keaksaraan
18.05.	Pengembangan pendidikan kecakapan hidup
18.06.	Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan non formal
18.07.	Pengembangan data dan informasi pendidikan non formal
18.08.	Pengembangan kebijakan pendidikan non formal
18.09.	Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan non formal
18.10.	Pengembangan sertifikasi pendidikan non formal
18.11.	Perencanaan dan penyusunan program pendidikan non formal
18.12.	Publikasi dan sosialisasi pendidikan non formal
18.13.	Monitoring, evaluasi dan Pelaporan
18.14.	Pembinaan Peserta Hari Aksara Internasional (HAI)
18.15.	Penyelenggaraan Peserta Hari Anak Nasional (HAN)
18.16.	Penyelenggaraan pendidikan kesetaraan
18.17.	Pendamping penyelenggaraan ujian nasional paket A, B dan C

Paraf Hierarki	
Sekda	
Asisten	
Kabag Hukum	




Paraf Koordinasi	
SKPD/ Bagian Pemrakarsa	
SKPD/ Bagian Terkait:	
1. _____	
2. _____	
3. _____	



KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN
1	2
18.18.	Penyelenggaraan kejar paket A, B, dan C
18.19.	Jambore PTK PNF
18.20.	Pembinaan tenaga pendidik dan kependidikan PNF
18.21.	Pendidikan kewirausahaan masyarakat
18.22.	Pembinaan Lembaga Pendidikan Non Formal
18.23.	Pembinaan Dan Penguatan Lembaga Rumah Pintar Mini (RPM)
19.	Program Pendidikan Luar Biasa
19.01.	pembangunan gedung sekolah
19.02.	pembangunan rumah dinas kepada sekolah, guru, penjaga sekolah
19.03.	Penambahan ruang kelas sekolah
19.04.	Penambahan ruang guru sekolah
19.05.	Pembangunan labolatorium dan ruang pratikum sekolah (labolatorium bahasa, komputer, IPA, IPS dan lain-lain)
19.06.	Pembangunan ruang locker siswa
19.07.	pembangunan sarana dan prasarana olahraga
19.03.	Pembangunan ruang serba guna/aula
19.09.	pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir
19.10.	Pembangunan ruang unit kesehatan sekolah
19.11.	pembangunan ruang ibadah
19.12.	Pembangunan perpustakaan sekolah
19.13.	Pembangunan jaringan instalasi listrik sekolah dan perlengkapannya
19.14.	pembangunan sarana air bersih dan sanitary
19.15.	Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa
19.16.	Pengadaan pakaian seragam sekolah dan kelengkapannya serta pakaian olahraga
19.17.	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa
19.18.	Pengadaan mebeluer sekolah
19.19.	Pengadaan Perlengkapan Sekolah
19.20.	Pengadaan alat rumah tangga sekolah
19.21.	Pengadaan sarana mobilitas sekolah
19.22.	Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah
19.23.	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah
19.24.	Pemeliharaan rutin/berkala ruang kelas sekolah
19.25.	Pemeliharaan rutin/berkala ruang guru sekolah
19.26.	pemeliharaan rutin/berkala ruang locker siswa
19.27.	pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olahraga
19.28.	pemeliharaan rutin/berkala ruang serba guna/aula
19.29.	Pemeliharaan rutin/berkala taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir
19.30.	Pemeliharaan rutin/berkala ruang unit kesehatan sekolah
19.31.	pemeliharaan rutin/berkala ruang ibadah
19.32.	Pemeliharaan rutin/berkala perpustakaan sekolah
19.33.	pemeliharaan rutin/berkala jaringan instalasi listrik sekolah dan perengkapannya
19.34.	Pemeliharaan rutin/berkala sarana air bersih dan sanitary
19.35.	Pemeliharaan rutin/berkala buku-buku ajar
19.36.	Pemeliharaan rutin/berkala alat praktik dan peraga siswa
19.37.	Pemeliharaan rutin/berkala mebeluer sekolah
19.38.	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan sekolah
19.39.	Pemeliharaan rutin/berkala alat rumah tangga sekolah
19.40.	Pemeliharaan rutin/berkala sarana mobilitas sekolah
19.41.	Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah
19.42.	Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah

Paraf Hierarki	
Sekda	
Asisten	
Kabag Hukum	



Paraf Koordinasi	
SKPD/Bagian Pemrakarsa	
SKPD/Bagian Terkait:	
1. _____	
2. _____	
3. _____	


KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN
1	2
19.43.	Rehabilitasi sedang/berat asrama siswa
19.44.	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah
19.45.	Rehabilitasi sedang/berat ruang guru sekolah
19.46.	Rehabilitasi sedang/berat laboratorium dan ruang praktikum sekolah
19.47.	Rehabilitasi sedang/berat ruang locker siswa
19.48.	Rehabilitasi sedang/berat sarana olahraga
19.49.	Rehabilitasi sedang/berat ruang serba guna/aula
19.50.	Rehabilitasi sedang/berat taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir
19.51.	Rehabilitasi sedang/berat ruang unit kesehatan sekolah
19.52.	Rehabilitasi sedang/berat ruang ibadah
19.53.	Rehabilitasi sedang/berat perpustakaan sekolah
19.54.	Rehabilitasi sedang/berat jaringan instalasi listrik sekolah dan perengkapannya
19.55.	Rehabilitasi sedang/berat sarana air bersih dan sanitary
19.56.	pelatihan kompetensi tenaga pendidik
19.57.	Pelatihan Penyusunan kurikulum
19.58.	Pembinaan forum masyarakat peduli pendidikan
19.59.	monitoring, evaluasi dan pelaporan
19.60.	Dst....
20.	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
20.01.	Pelaksanaan sertifikasi pendidik
20.02.	Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan
20.03.	Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi
20.04.	Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG)
20.05.	Pembinaan Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP)
20.06.	Pembinaan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Guru (PPPG)
20.07.	Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi
20.08.	Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan
20.09.	Pengembangan sistem pendataan dan pernetaan pendidik dan tenaga kependidikan
20.10.	Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik
20.11.	Pengembangan sistem perencanaan dan pengendalian program profesi pendidik dan tenaga kependidikan
20.12.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
20.13.	Pengembangan Keprofesional Berkelanjutan
20.14.	Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional
20.15.	Seleksi Galon Kepala Sekolah
20.16.	Penguatan Kepengawasan Sekolah
20.17.	Olimpiade sains guru
20.18.	Pengembangan SIM-Pendidik dan Tenaga Kependidikan
20.19.	Penilaian Kinerja Guru
20.20.	Pengembangan materi belajar mengajar dan metode pembelajaran dengan menggunakan TIK
20.21.	Workshop Publikasi Ilmiah
20.22.	Seleksi Guru Berprestasi
20.23.	Pengembangan sistem perencanaan dan pengendalian program profesi pendidik dan tenaga kependidikan
20.24.	Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan
20.25.	Pembinaan tenaga pendidik dan kependidikan PNF
20.26.	Pelatihan Kompetensi tenaga pendidik PAUD

Paraf Hierarki	
Sekda	
Asisten	
Kabag Hukum	

Paraf Koordinasi	
SK/PD/Bagian Pemrakarsa	
SK/PD/Bagian Terkait:	
1. _____	
2. _____	
3. _____	

KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN
1	2
21.	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
21.01.	Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar
21.02.	Pengembangan minat dan budaya baca
21.03.	Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat
21.04.	Pelaksanaan koordinasi pengembangan perpustakaan
21.05.	Penyediaan bantuan pengembangan perpustakaan dan minat baca di daerah
21.06.	Penyelenggaraan koordinasi pengembangan budaya baca
21.07.	Perencanaan dan penyusunan program budaya baca
21.08.	Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca
21.09.	Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah
21.10.	monitoring, evaluasi dan pelaporan
21.11.	Pembinaan Tenaga Pengelola Perpustakaan Sekolah
21.12.	Penyelenggaraan Lomba Perpustakaan (karya tulis ilmiah dan lomba mading SD)
21.13.	Pembinaan Perpustakaan Sekolah
21.14.	Pengadaan Buku Rumah Pintar Dan TBM
21.15.	Pelayanan Perpustakaan Umum
21.16.	Pelayanan Perpustakaan Keliling
21.17.	Pengembangan minat dan budaya baca
21.18.	Pembinaan Perpustakaan Sekolah
22.	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
22.01.	Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan
22.02.	Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan di bidang pendidikan
22.03.	Pengendalian dan pengawasan penerapan azas efisiensi dan efektivitas penggunaan dana dekonsentrasi dan dana pembantuan
22.04.	Sosialisasi dan advokasi berbagai Peraturan Pemerintah di bidang pendidikan
22.05.	Pembinaan dewan Pendidikan
22.06.	Pembinaan Komite Sekolah
22.07.	Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan
22.08.	Penyelenggaraan pelatihan, seminar dan lokakarya, serta diskusi ilmiah tentang berbagai isu pendidikan
22.09.	monitoring, evaluasi dan pelaporan
22.10.	Sinkronisasi Perencanaan Pendidikan
22.11.	Penyusunan Profil Pendidikan
22.12.	Penerapan Sistem dan Informasi Manajemen Pendidikan
22.13.	Penyelenggaraan jejaring pendidikan Nasional (JARDIKNAS)
22.14.	Pengembangan Program Adiwiyata
22.15.	Peningkatan manajemen pendidikan (pengelolaan aset, keuangan dan kepegawaian dan keiembagaan)
22.16.	Workshop Penguatan Peran Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah
22.17.	Pembinaan Dewan Pendidikan
22.18.	Penunjang Program Grindulu Mapan
22.19.	Penunjang Operasional Bantuan Siswa Miskin (BSM)
	Urusan : 1.02. - KESEHATAN
15.	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
15.01.	Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
15.02.	Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan
15.03.	Peningkatan keterjangkauan harga obat dan perbekalan kesehatan terutama untuk penduduk

Paraf Hierarki	
Sekda	
Asisten	
Kabag Hukum	




Paraf Koordinasi	
SKPD/ Bagian Pemrakarsa	
SKPD/ Bagian Terkait:	
1. _____	
2. _____	
3. _____	


KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN
1	2
	miskin
15.04.	Peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas dan rumah sakit
15.05.	Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
15.06.	Monitoring, evaluasi dan Pelaporan
15.07.	Pengadaan Obat Penunjang Pelayanan Kesehatan
15.08.	Pelayanan Obat dan Alat Kesehatan di Gudang Farmasi Kabupaten
16.	Program Upaya Kesehatan Masyarakat
16.01.	Pelayanan kesehatan penduduk miskin di puskesmas jaringannya
16.02.	Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan
16.03.	Pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya
16.04.	Penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular dan wabah
16.05.	Perbaikan gizi masyarakat
16.06.	Revitalisasi sistem kesehatan
16.07.	Pelayanan kefarmasian dan alat kesehatan
16.08.	Pengadaan peralatan dan perbekalan kesehatan termasuk obat generik esensial
16.09.	Peningkatan kesehatan masyarakat
16.10.	Peningkatan pelayanan kesehatan bagi pengungsi korban bencana
16.11.	Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan
16.12.	Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan
16.13.	Penyelenggaraan penyehatan lingkungan
16.14.	Monitoring, evaluasi dan Pelaporan
16.15.	Pelayanan Kesehatan dasar Puskesmas
16.16.	Peningkatan SDM Kesehatan
16.17.	Pembinaan kesehatan anak, remaja dan usila
16.18.	Peningkatan Pelayanan Laboratorium Kesehatan Daerah
16.19.	Peningkatan Sarana dan Regulasi Kesehatan
16.20.	Penyelenggaraan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan masyarakat
16.21.	Pelayanan Kesehatan Dasar Program JKN
16.22.	Peningkatan Puskesmas Rawat Inap Menjadi Puskesmas Rawat Inap Standar dan Rawat Inap Plus (BK)
16.23.	Perluasan fungsi Polindes Menjadi Poskesdes (BK)
16.24.	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) (DAK)
16.25.	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat
17.	Program Pengawasan Obat dan Makanan
17.	Program Pengembangan Obat Asli Indonesia
17.01.	Peningkatan pemberdayaan konsumen/masyarakat di bidang obat dan makanan
17.01.	Fasilitasi pengembangan dan penelitian teknologi produksi tanaman obat
17.02.	Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya
17.02.	Pengembangan standarisasi tanaman obat bahan alam Indonesia
17.03.	Peningkatan kapasitas laboratorium pengawasan obat dan makanan
17.03.	Peningkatan promosi obat bahan alam Indonesia di dalam dan di luar negeri
17.04.	Peningkatan penyidikan dan penegakan hukum di bidang obat dan makanan
17.04.	Pengembangan sistem dan layanan informasi terpadu
17.05.	Monitoring, evaluasi dan Pelaporan
17.05.	Peningkatan kerjasama antar lembaga penelitian dan industri terkait
17.06.	Dst ...
17.06.	Monitoring, evaluasi dan Pelaporan
17.07.	Dst ...
19.	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Paraf Hierarki	
Sekda	<i>[Signature]</i>
Asisten	<i>[Signature]</i>
Kabag Hukum	<i>[Signature]</i>




Paraf Koordinasi	
SKPD/ Bagian Pemrakarsa	<i>[Signature]</i>
SKPD/ Bagian Terkait:	
1. _____	
2. _____	
3. _____	


KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN
1	2
19.01.	Pengembangan media promosi dari informasi sadar hidup sehat
19.02.	Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat
19.03.	Peningkatan pemanfaatan sarana kesehatan
19.04.	Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh kesehatan
19.05.	Monitoring, evaluasi dan Pelaporan
19.06.	Peningkatan promosi dan pemberdayaan masyarakat
19.07.	Pengembangan Desa Siaga
20.	Program Perbaikan Gizi Masyarakat
20.01.	Penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi
20.02.	Pemberian tambahan makanan dan vitamin
20.03.	Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibal Kurang Vodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya
20.04.	Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi
20.05.	Penanggulangan Gizi-Lebih
20.06.	Monitoring, evaluasi dan Pelaporan
20.07.	Pengadaan MP-ASI dan Obat Penunjang Gizi
20.08.	Penanganan Gizi Buruk pada Balita dan Ibu Hamil
20.09.	Peningkatan Pemanfaatan ASI Eksklusif
21.	Program pengembangan lingkungan sehat
21.01.	Pengkajian pengembangan lingkungan sehat
21.02.	Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat
21.03.	Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat
21.04.	Monitoring, evaluasi dan Pelaporan
21.05.	Penyelenggaraan Lingkungan Sehat
21.06.	Pengembangan Kabupaten Sehat
21.07.	Pengembangan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat
21.08.	Pengawasan dan Pengendalian Keamanan Pangan
22.	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
22.01.	Penyemprotan/fogging sarang nyamuk
22.02.	Pengadaan alat fogging dan bahan-bahan fogging
22.03.	Pengadaan vaksin penyakit menular
22.04.	Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah
22.05.	Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
22.06.	Pencegahan penularan penyakit Endemik/Epidemik
22.07.	Pemusnahan/karantina sumber penyebab penyakit menular
22.08.	Peningkatan Imunisasi
22.09.	Peningkatan Surveillance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah
22.10.	Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi (kie) pencegahan dan pemberantasan penyakit
22.11.	Monitoring, evaluasi dan Pelaporan
22.12.	Pemberantasan Penyakit Menular
22.13.	Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular
23.	Program standarisasi pelayanan kesehatan
23.01.	Penyusunan standar pelayanan kesehatan
23.02.	Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan
23.03.	Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan
23.04.	Penyusunan naskah akademis standar pelayanan kesehatan
23.05.	Penyusunan standar analisis belanja pelayanan kesehatan
23.06.	Monitoring, evaluasi dan Pelaporan

Paraf Hierarki	
Sekda	
Asisten	
Kabag Hukum	

Paraf Koordinasi	
SKPD/ Bagian Pemrakarsa	
SKPD/ Bagian Terkait:	
1. _____	
2. _____	
3. _____	

KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN
1	2
23.07.	Pengembangan Standarisasi Puskesmas
23.08.	Peningkatan SDM Kesehatan
23.09.	Peningkatan Sarana dan Regulasi Kesehatan
23.10.	Peningkatan Puskesmas Rawat Inap Menjadi Puskesmas Rawat Inap Standar dan Rawat Inap Plus
23.11.	Perluasan fungsi Polindes Menjadi Poskesdes
23.12.	Akreditasi Puskesmas
24.	Program pelayanan kesehatan Penduduk miskin
24.01.	Pelayanan operasi katarak
24.02.	Pelayanan kesehatan THT
24.03.	Pelayanan operasi bibir sumbing
24.04.	Pelayanan sunatan masal
24.05.	Penanggulangan ISPA
24.06.	Penanggulangan penyakit cacngan
24.07.	Pelayanan kesehatan kulit dan kelamin
24.08.	Pelayanan kesehatan akibat gizi buruk/busung lapar
24.09.	Pelayanan kesehatan akibat lumpuh layu
24.10.	Monitoring, evaluasi dan Pelaporan
24.11.	Dst....
25.	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya
25.01.	Pembangunan puskesmas
25.02.	Pembangunan puskesmas pembantu
25.03.	Pengadaan puskesmas peralran
25.04.	Pengadaan puskesmas keliling
25.05.	Pembangunan posyandu
25.06.	Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas
25.07.	Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas pembantu
25.08.	Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas perairan
25.09.	Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas keliling
25.10.	Pengadaan sarana dan prasarana posyandu
25.11.	Peningkatan puskesmas menjadi puskesmas rawat inap
25.12.	Peningkatan puskesmas pembantu menjadi puskesmas
25.13.	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas
25.14.	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas pembantu
25.15.	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas perairan
25.16.	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas keliling
25.17.	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana posyandu
25.18.	Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu
25.19.	Rehabilitasi sedang/berat puskesmas peralran
25.20.	Monitoring, evaluasi dan Pelaporan
25.21.	Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas (DAK)
25.22.	Pembangunan Poskesdes
25.23.	Rehab sedang/berat polindes
25.24.	Rehabilitasi Gedung Laboratorium Kesehatan Daerah
25.25.	Pengadaan Peralatan Kesehatan (DAK)
25.26.	Penyediaan/Pemeliharaan sarana pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang terkena penyakit akibat dampak konsumsi rokok dan penyakit lainnya
25.27.	Rehabilitasi Instalasi Gudang Farmasi (DAK)
26.	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit

Paraf Hierarki	
Sekda	
Asisten	
Kabag Hukum	

Paraf Koordinasi	
SKPD/ Bagian Pemrakarsa	
SKPD/ Bagian Terkait:	
1. _____	
2. _____	
3. _____	

KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN
1	2
	jiwa/rumah Sakit paru-paru/rumah sakit mata
26.01.	Pembangunan rumah sakit
26.02.	Pembangunan ruang poliklinik rumah sakit
26.03.	Pembangunan gudang obat/apotik
26.04.	Penambahan ruang rawat inap rumah sakit (VVIP, VIP, Kelas 1, II dan III)
26.05.	Pengembangan ruang gawat darurat
26.06.	Pengembangan ruang ICU, ICCU, NICU
26.07.	Pengembangan ruang operasi
26.08.	Pengembangan ruang terapi
26.09.	Pengembangan ruang isolasi
26.10.	Pengembangan ruang bersalin
26.11.	Pengembangan ruang inkubator
26.12.	Pengembangan ruang bayi
26.13.	Pengembangan ruang rontgen
26.14.	Pengembangan ruang laboratorium rumah sakit
26.15.	Pembangunan kamar jenazah
26.16.	Pembangunan instalasi pengolahan limbah rumah sakit
26.17.	Rehabilitasi bangunan rumah sakit
26.18.	Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit
26.19.	Pengadaan obat-obatan rumah sakit
26.20.	Pengadaan ambulance/mobil jenazah
26.21.	Pengadaan mebeuleur rumah sakit
26.22.	Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dan lain-lain)
26.23.	Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit
26.24.	Pengadaan pencetakan administrasi dan sural menyurat rumah sakit
26.25.	Pengembangan tipe rumah sakit
26.26.	Monitoring, evaluasi dan Pelaporan
26.27.	Peningkatan Derajat Kesehatan dengan Penyediaan Fasilitas Perawatan Kesehatan Bagi Penderita Akibat Dampak Asap Rokok melalui Pengembangan Ruang Rawat Inap, pengadaan alat Kesehatan dan/atau pengadaan perlengkapan ruang pasien untuk Penanganan Penyakit Akibat Dampak Rokok
26.28.	Pembangunan Gedung Kantor Rumah Sakit
26.29.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Rujukan (DAK)
27.	Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata
27.01.	Pemeliharaan Rutin/berkala Rumah Sakit
27.02.	Pemeliharaan rutin/berkala ruang poliklinik rumah sakit
27.03.	Pemeliharaan rutin/berkala gudang obat/apotik
27.04.	Pemeliharaan rutin/berkala ruang rawat inap rumah sakit (VVIP, VIP, Kelas 1, II dan III)
27.05.	Pemeliharaan rutin/berkala ruang gawat darurat
27.06.	Pemeliharaan rutin/berkala ruang ICU, ICCU, NICU
27.07.	Pemeliharaan rutin/berkala ruang operasi
27.08.	Pemeliharaan rutin/berkala ruang terapi
27.09.	Pemeliharaan rutin/berkala ruang isolasi
27.10.	Pemeliharaan rutin/berkala ruang bersalin
27.11.	Pemeliharaan rutin/berkala ruang inkubator
27.12.	Pemeliharaan rutin/berkala ruang bayi
27.13.	Pemeliharaan rutin/berkala ruang rontgen

Parat Hierarchy	
Sekda	✓
Asisten	✓
Kabag Hukum	✓

Parat Koordinasi	
SKPD/ Bagian Pemrakarsa	✓
SKPD/ Bagian Terkait:	
1. _____	
2. _____	
3. _____	

KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN
1	2
27.14.	Pemeliharaan rutin/berkala ruang laboratorium rumah sakit
27.15.	Pemeliharaan rutin/berkala kamar jenazah
27.16.	Pemeliharaan rutin/berkala instalasi pengolahan limbah rumah sakit
27.17.	Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit
27.18.	Pemeliharaan rutin/berkala mobil ambulance/jenazah
27.19.	Pemeliharaan rutin/berkala mebeuleur rumah sakit
27.20.	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah sakit
27.21.	Monitoring, evaluasi dan Pelaporan
27.22.	Pelayanan Kesehatan Rujukan
28.	Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan
28.01.	Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat
28.02.	Kemitraan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular
28.03.	Kemitraan pengoiahan limbah rumah sakit
28.04.	Kemitraan alih teknologi kedokteran dan kesehatan
28.05.	Kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedis
28.06.	Kemitraan pengobatan lanjutan bagi pasien rujukan
28.07.	Kemitraan pengobatan bagi pasien kurang mampu
28.08.	Monitoring, evaluasi dan Pelaporan
28.09.	Dst ...
29.	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita
29.01.	Penyuluhan kesehatan anak balita
29.02.	Immunisasi bagi anak balita
29.03.	Rekrutmen tenaga pelayanan kesehatan anak balita
29.04.	Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita
29.05.	Pembangunan sarana dan prasarana khusus pelayanan perawatan anak balita
29.06.	Pembangunan panti asuhan anak terlantar balita
29.07.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
29.08.	Peningkatan Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak
30.	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia
30.01.	Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan
30.02.	Rekrutmen tenaga perawat kesehatan
30.03.	Pendidikan dan pelatihan perawatan kesehatan
30.04.	Pembangunan pusat-pusat pelayanan kesehatan
30.05.	Pembangunan panti asuhan
30.05.	Pelayanan kesehatan Lansia
30.07.	Monitoring, evaluasi dan Pelaporan
30.08.	Dst....
31.	Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan
31.01.	Pengawasan keamanan dan kesehatan makanan hasil industri
31.02.	Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan hasil produksi rumah tangga
31.03.	Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan restaurant
31.04.	Monitoring, evaluasi dan Pelaporan
31.05.	Dst ...
32.	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak
32.01.	Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu
32.02.	Perawatan secara berkala bagi ibu hamil bagi keluarga kurang mampu
32.03.	Pertolongan persalinan bagi ibu dari keluarga kurang mampu
32.04.	Jaminan Persalinan (Jampersal) DAK
32.05.	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak

Paraf Hiera'ki	
Sekda	✓
Asisten	7/6
Kabag Hukum	6



Paraf Koordinasi	
SKPD/ Bagian Pemrakarsa	✓
SKPD/ Bagian Terkait:	
1. _____	
2. _____	
3. _____	


KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN
1	2
32.06.	Pembinaan kesehatan anak dan remaja
33.	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD
33.01.	Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan
33.02.	Pengadaan sarana dan prasarana Rumah Sakit
34.	Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Kesehatan
34.02.	Penyediaan/pemeliharaan sarana pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang terkena penyakit akibat dampak konsumsi rokok dan penyakit lainnya
Urusan : 1.03. - PEKERJAAN UMUM	
15.	Program pembangunan jalan dan jembatan
15.01.	Perencanaan pembangunan jalan
15.02.	Survei kontur jalan dan jembatan
15.03.	Pembangunan jalan
15.04.	Perencanaan pembangunan jembatan
15.05.	Pembangunan jembatan
15.06.	monitoring, evaluasi dan pelaporan
15.07.	Dst....
16.	Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
16.01.	Perencanaan pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
16.02.	Survei kontur saluran drainase/gorong-gorong
16.03.	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
16.04.	monitoring, evaluasi dan pelaporan
16.05.	Pemeliharaan Rutin Saluran Drainase Kota
16.06.	Normalisasi saluran drainase
16.07.	Operasional penyediaan sarana prasarana sanitasi
16.08.	Perbaikan saluran Tutup (trotoar) Kota
16.09.	Penyediaan prasarana dan sarana air limbah
17.	Program pembangunan turap/talud/bronjong
17.01.	Perencanaan lurap/talud/bronjong
17.02.	Survei kemiringan lereng turap/talud/bronjong
17.03.	Pembangunan turap/talud/bronjong
17.04.	monitoring, evaluasi dan pelaporan
17.05.	Dst ...
18.	Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan
18.01.	Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jalan
18.02.	Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jembatan
18.03.	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan
18.04.	Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan
18.05.	monitoring, evaluasi dan pelaporan
18.06.	Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan
18.07.	Inspeksi Kondisi Jalan
18.08.	Inspeksi Kondisi Jembatan
18.09.	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan (DAK)
19.	Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan
19.01.	Inspeksi kondisi jalan
19.01.	Rehabilitasi jalan dalam kondisi tanggap darurat
19.01.	Penyusunan sistem informasi/data base jalan
19.01.	Pembangunan gedung balai latihan kebinamargaan
19.01.	Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan talud/bronjong

Paraf Hierarki	
Sekda	<i>[Signature]</i>
Asisten	<i>[Signature]</i>
Kabag Hukum	<i>[Signature]</i>

Paraf Koordinasi	
SKPD/ Bagian Pemrakarsa	<i>[Signature]</i>
SKPD/ Bagian Terkait:	
1. _____	
2. _____	
3. _____	

KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN
1	2
19.02.	Inspeksi kondisi jembatan
19.02.	Rehabilitasi jembatan dalam kondisi tanggap darurat
19.02.	Penyusunan sistem informasi/data base jembatan
19.02.	Pembangunan gedung workshop
19.02.	Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan talud/bronjong
19.03.	Evaluasi dan pelaporan
19.03.	monitoring, evaluasi dan pelaporan
19.03.	monitoring, evaluasi dan pelaporan
19.03.	Pembangunan laboratorium kebinamargaan
19.03.	monitoring, evaluasi dan pelaporan
19.04.	Pengadaan alat-alat berat
19.05.	Pengadaan peralatan dan perlengkapan bengkel alat-alat berat
19.06.	Pengadaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan
19.07.	Rehabilitasi/pemeliharaan gedung balai latihan kebinamargaan
19.08.	Rehabilitasi/pemeliharaan gedung workshop
19.09.	Rehabilitasi/pemeliharaan laboratorium kebinamargaan
19.10.	Rehabilitasi/pemeliharaan Rutin alat-alat berat
19.11.	Rehabilitasi/pemeliharaan peralatan dan perlengkapan bengkel alat-alat berat
19.12.	Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan
19.13.	monitoring, evaluasi dan pelaporan
19.14.	Dst....
24.	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
24.01.	Perencanaan pembangunan jaringan irigasi
24.02.	Perencanaan pembangunan jaringan air bersih/air minum
24.03.	Perencanaan pembangunan reservoir
24.04.	Perencanaan pembangunan pintu air
24.05.	Perencanaan normalisasi saluran sungai
24.06.	Pembangunan jaringan air bersih/air minum
24.07.	Pembangunan reservoir
24.03.	Pembangunan pintu air
24.09.	Pelaksanaan normalisasi saluran sungai
24.10.	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi
24.11.	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan air bersih/air minum
24.12.	Rehabilitasi/pemeliharaan reservoir
24.13.	Rehabilitasi/pemeliharaan pintu air
24.14.	Rehabilitasi/pemeliharaan normalisasi saluran sungai
24.15.	Optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun
24.16.	Pemberdayaan petani pemakai air
24.17.	monitoring, evaluasi dan pelaporan
24.18.	Pembangunan Jaringan Irigasi
24.19.	Perencanaan Aset Irigasi (PAI)
24.20.	Rehabilitasi/Peningkatan Jaringan Irigasi
24.21.	Rehabilitasi/Peningkatan Jaringan Irigasi (DAK)
25.	Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku
25.01.	Pembangunan prasarana pengambilan dan saluran pembawa
25.02.	Rehabilitasi prasarana pengambilan dan saluran pembawa
25.03.	Pemeliharaan prasarana pengambilan dan saluran pembawa
25.04.	Pembangunan sumur-sumur air tanah
25.05.	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air

Paral Hierarki	
Sekda	
Asisten	
Kabag Hukum	

Paral Koordinasi	
SKPD/ Bagian Pemrakarsa	
SKPD/ Bagian Terkait:	
1. _____	
2. _____	
3. _____	

KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN
1	2
25.06.	Peningkatan distribusi penyediaan air baku
25.07.	monitoring, evaluasi dan pelaporan
26.	Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya
26.01.	Pembangunan embung, dan bangunan penampung air lainnya
26.02.	Pemeliharaan dan rehabilitasi embung, dan bangunan penampung air lainnya
26.03.	Rehabilitasi kawasan kritis daerah tangkapan sungai dan danau
26.04.	Rehabilitasi kawasan lindung daerah tangkapan sungai dan danau
26.05.	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sungai, danau, dan sumber daya air lainnya
26.06.	Peningkatan konservasi air tanah
26.07.	monitoring, evaluasi dan pelaporan
26.08.	Rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai
26.09.	Mengendalikan banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan sungai
26.10.	Pembangunan Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya
27.	Program Pengembangan kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
27.01.	Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah
27.02.	Penyediaan prasarana dan sarana air limbah
27.03.	Pengembangan teknologi pengolahan air minum dan air limbah
27.04.	Fasilitasi pembinaan teknik pengolahan air limbah
27.05.	Fasilitasi pembinaan teknik pengolahan air minum
27.06.	Pengembangan sistem distribusi air minum
27.07.	Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air minum
27.08.	Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air limbah
27.09.	monitoring, evaluasi dan pelaporan
27.10.	Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan
27.11.	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Air BersihPerdesaan (DAK)
27.12.	Operasional Penyediaan Sarana Prasarana Sanitasi
28.	Program Pengendalian Banjir
28.01.	Pembangunan reservoir pengendali banjir
28.02.	Rehabilitasi dan pemeliharaan reservoir pengendali banjir
28.03.	Rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai
28.04.	Pengembangan pengelolaan daerah rawa dalam rangka pengendalian banjir
28.05.	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan banjir
28.06.	Mengendalikan banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan sungai
28.07.	Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali
28.08.	Peningkatan pembangunan pusat-pusat pengendali banjir
28.09.	Pembangunan prasarana pengaman pantai
28.10.	Pembangunan tanggul pemecah ombak
28.11.	monitoring, evaluasi dan pelaporan
28.12.	Dst....
29.	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
29.01.	Perencanaan pengembangan infrastruktur
29.02.	Pembangunan/peningkatan infrastruktur
29.03.	monitoring, evaluasi dan pelaporan
29.04.	Pembangunan Tugu Batas
29.05.	Pembangunan/peningkatan infrastruktur KSCT (OAK)
29.06.	Pemeliharaan rutin taman kota dan jalur hijau
29.07.	Pemeliharaan Rutin Penerangan Jalan Umum (PJU)

Paraf Hierarchy	
Sekda	<i>[Signature]</i>
Asisten	<i>[Signature]</i>
Kabag Hukum	<i>[Signature]</i>


Paraf Koordinasi	
SK/PD/ Bagian Ferkarsa	<i>[Signature]</i>
SK/PD/ Bagian Terkait:	
1. _____	
2. _____	
3. _____	


KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN
1	2
29.08.	Pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU)
29.09.	Pembangunan kawasan wisata
29.10.	Peningkatan Taman Kota dan Jalur Hijau
30.	Program pembangunan Infrastruktur perdesaaan
30.01.	Penataan lingkungan pemukiman penduduk perdesaaan
30.02.	Pembangunan jalan dan jembatan perdesaaan
30.03.	Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaaan
30.04.	Pembangunan pasar perdesaaan
30.05.	Rehabilitasi/Pemeliharaan jalan dan jembatan perdesaaan
30.06.	Rehabilitasi/Pemeliharaan sarana dan prasarana air bersih perdesaaan
30.07.	Rehabilitasi/Pemeliharaan pasar perdesaaan
30.08.	monitoring, evaluasi dan pelaporan
30.09.	Monitoring dan Evaluasi Jalan dan Jembatan Perdesaan
31.	Program penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman.
31.01.	Pembangunan jalan lingkungan
31.02.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
31.03.	Pengadaan Bahan Infrastruktur Perdesaan
31.04.	Operasional program peningkatan kualitas pemukiman (P2KP)
31.05.	Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum
Urusan : 1.04. - PERUMAHAN	
15.	Program Pengembangan Perumahan
15.01.	Penetapan kebijakan, strategi, dan program perumahan
15.02.	Penyuluhan Norma, Standar, Pedoman, dan Manual (NSPM)
15.03.	Koordinasi penyelenggaraan pengembangan perumahan
15.04.	Sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang perumahan
15.05.	Koordinasi pembangunan perumahan dengan lembaga/badan usaha
15.06.	Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu
15.07.	Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat
15.08.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
15.09.	Fasilitasi dan Stimulasi Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)
16.	Program Lingkungan Sehat Perumahan
16.01.	Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan tentang pembangunan perumahan
16.02.	Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin
16.03.	Penyuluhan dan pengawasan kualitas lingkungan sehat perumahan
16.04.	Pengendalian dampak resiko pencemaran lingkungan
16.05.	Penetapan kebijakan dan strategi penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang
16.06.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
16.07.	Fasilitasi dan Stimulasi Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)
16.08.	Peningkatan Kualitas Perumahan Dan Permukiman (DAK)
17.	Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan
17.01.	Fasilitasi pemberian kredit mikro untuk pembangunan dan perbaikan perumahan
17.02.	Fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana dasar permukiman berbasis masyarakat
17.03.	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pelestarian lingkungan perumahan
17.04.	Peningkatan sistem pemberian kredit pemilikan rumah
17.05.	Sosialisasi dan fasilitasi jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum
17.06.	Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang

Paraf Hierarki	
Sekda	<i>[Signature]</i>
Asisten	<i>[Signature]</i>
Kabag Hukum	<i>[Signature]</i>

Paraf Koordinasi	
SKPD/ Bagian Pemrakarsa	<i>[Signature]</i>
SKPD/ Bagian Terkait:	
1. _____	
2. _____	
3. _____	

KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN
1	2
	perumahan
17.07.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
17.08.	Dst...
18.	Program perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial
18.01.	Fasilitasi dan stimulasi rehabilitasi rumah akibat bencana alam
18.02.	Fasilitasi dan stimulasi rehabilitasi rumah akibat bencana sosial
18.03.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
18.04.	Dst...
19.	Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran
19.01.	Penyusunan norma, standar, prosedur dan manual pencegahan bahaya kebakaran
19.02.	Sosialisasi norma, standar, prosedur dan manual pencegahan bahaya kebakaran
19.03.	Koordinasi perijinan pemanfaatan gedung
19.04.	Pengawasan pelaksanaan kebijakan pencegahan kebakaran
19.05.	Kegiatan pendidikan dan pelatihan pertolongan dan pencegahan kebakaran
19.06.	Kegiatan rekrutmen tenaga sukarela pertolongan bencana kebakaran
19.07.	Kegiatan penyuluhan pencegahan bahaya kebakaran
19.08.	Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran
19.09.	Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran
19.10.	Rehabilitasi sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran
19.11.	Kegiatan pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran
19.12.	Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran
19.13.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
19.14.	Penyuluhan pencegahan bahaya kebakaran
19.15.	Operasional Pelaksanaan Kegiatan Pemadam Kebakaran (PMK)
20.	Program pengelolaan areal pemakaman
20.01.	Penyusunan kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual pengelolaan areal pemakaman
20.02.	Pengumpulan dan analisis data base jumlah jiwa yang meninggal
20.03.	Koordinasi pengelolaan areal pemakaman
20.04.	Koordinasi penataan areal pemakaman
20.05.	Pemberian perijinan pemakaman
20.06.	Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman
20.07.	Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman
20.08.	Monitoring dan evaluasi
20.09.	Dst...
21.	Program Penataan Dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman
21.01.	Pembangunan jalan lingkungan
21.02.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
21.03.	Pengadaan Bahan Infrastruktur Perdesaan
21.04.	Operasional program peningkatan kualitas pemukiman (P2KP)
21.05.	Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum
22.	Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Sarana Prasarana Permukiman
22.01.	Pemangunan/ Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan, Saluran Air Limbah, Sanitasi dan Air Bersih
Urusan : 1.05. - PENATAAN RUANG	
15.	Program Perencanaan Tata Ruang
15.01.	Penyusunan kebijakan tentang penyusunan rencana tata ruang

Paraf Hierarki	
Sekda	
Asisten	
Kabag Hukum	


Paraf Koordinasi	
SKPD/ Bagian Pemrakarsa	
SKPD/ Bagian Terkait:	
1. _____	
2. _____	
3. _____	


KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN
1	2
15.02.	Penetapan kebijakan tentang RDTRK, RTRK, dan RTBL
15.03.	Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang rencana tata ruang
15.04.	Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah
15.05.	Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan
15.06.	Penyusunan Rencana Teknis Ruang Kawasan
15.07.	Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan
15.08.	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang RTRW
15.09.	Fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam perencanaan tata ruang
15.10.	Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang
15.11.	Revisi rencana tata ruang
15.12.	Pelatihan aparat dalam perencanaan tata mang
15.13.	Survey dan pemetaan
15.14.	Koordinasi dan fasilitasi penyusunan rencana tata ruang lintas kabupaten/kota
15.15.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan rencana tata ruang
15.16.	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang RDTR
15.17.	Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
16.	Program Pemanfaatan Ruang
16.01.	Penyusunan kebijakan perizinan pemanfaatan ruang
16.02.	Penyusunan norma, standar, dan kriteria pemanfaatan mang
16.03.	Penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan mang
16.04.	Fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang
16.05.	Survey dan pemetaan
16.06.	Pelatihan aparat dalam pemanfaatan mang
16.07.	Sosialisasi kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual pemanfaatan mang
16.08.	Koordinasi dan fasilitasi penyusunan pemanfaatan ruang lintas kabupaten/kota
16.09.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan ruang
16.10.	Fasilitasi Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH)
17.	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
17.01.	Penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang
17.02.	Penyusunan prosedur dan manual pengendalian pemanfaatan ruang
17.03.	Fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan mang
17.04.	Pelatihan aparat dalam pengendalian pemanfaatan ruang
17.05.	Pengawasan pemanfaatan ruang
17.06.	Koordinasi dan fasilitasi pengendalian pemanfaatan ruang lintas kabupaten/kota
17.07.	Sosialisasi kebijakan pengendalian pemanfaatan mang
17.08.	monitoring, evaluasi dan pelaporan
17.09.	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang
Urusan : 1.06. - SOSIAL	
15.	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpendl (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan sosial (PMKS) Lainnya
15.01.	Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya
15.02.	Pelatihan ketrampilan berusaha bagi keluarga miskin
15.03.	Fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin
15.04.	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin
15.05.	Pelatihan keterampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial
15.06.	Pembangunan pemberdayaan daerah terpencil dan tertinggal P2DT2

Paraf Hiera-ki	
Sekda	✓
Asisten	✓
Kabag Hukum	✓

Paraf Koordinasi	
SKPD/ Bagian Pemrakarsa	✓
SKPD/ Bagian Terkait:	
1. _____	
2. _____	
3. _____	

KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN
1	2
15.07.	Pengembangan bakat dan ketrampilan anak berkebutuhan khusus
15.08.	Pengiriman anak ke PSPA ke Batu Malang
15.09.	Verifikasi dan Validasi data penerima bantuan sosial
15.10.	Verifikasi dan Validasi data kepesertaan JKN
15.11.	Pelatihan ketrampilan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
15.12.	Pelatihan ketrampilan para penyandang cacat dan trauma
15.13.	Peningkatan koordinasi dan pengendalian bantuan pangan masyarakat miskin
16.	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
16.01.	Pengembangan kebijakan tentang akses sarana dan prasarana publik bagi penyandang cacat dan lansia
16.02.	Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak
16.03.	Pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
16.04.	Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak carat, dan anak nakal
16.05.	Pelayanan psikososial bagi PMKS di trauma centre termasuk bagi korban bencana
16.06.	Pembentukan pusat informasi penyandang cacat dan trauma center
16.07.	Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan sosial Bagi PMKS
16.08.	Penyusunan kebijakan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
16.09.	Koordinasi perumusan kebijakan dan sinkronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan
16.10.	Penanganan Masalah-masalah Strategis yang menyangkut Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa
16.11.	monitoring, evaluasi dan pelaporan
16.12.	Rehabilitasi taman Makam Pahlawan Nasional
16.13.	Koordinasi perumusan kebijakan dan sinkronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan
16.14.	Pembinaan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia
17.	Program pembinaan anak terlantar
17.01.	Pembangunan sarana dan prasarana tempat penampungan anak terlantar
17.02.	Pelatihan ketrampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar
17.03.	Penyusunan data dan analisis permasalahan anak terlantar
17.04.	Pengembangan bakat dan ketrampilan anak terlantar
17.05.	Peningkatan keterampilan tenaga pembinaan anak terlantar
17.06.	monitoring, evaluasi dan pelaporan
18.	Program pembinaan pan penyandang cacat dan trauma
18.01.	Pendataan penyandang cacat dan penyakit kejiwaan
18.02.	Pembangunan sarana dan prasarana perawatan para penyandang cacat dan taruma
18.03.	Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma
18.04.	Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma
18.05.	Peningkatan keterampilan tenaga pelatih dan pendidik
19.	Program pembinaan panti asuhan /panti jompo
19.01.	Pembangunan sarana dan prasarana panti asuhan/jompo
19.02.	Rehabilitasi sedang/berat bangunan panti asuhan/jompo

Paraf Hierarki	
Sekda	
Asisten	
Kabag Hukum	

Paraf Koordinasi	
SKFE/ Bagian Pemrakarsa	
SKPD/ Bagian Terkait:	
1. _____	
2. _____	
3. _____	


KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN
1	2
19.03.	Operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana panti asuhan/jompo
19.04.	Pendidikan dan pelatihan bagi penghuni panti asuhan/jompo
19.05.	Peningkatan keterampilan tenaga pelatih dan pendidik
19.06.	monitoring, evaluasi dan pelaporan
19.07.	Pembinaan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia
20.	Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya) _
20.01.	Pendidikan dan pelatihan ketrampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial
20.02.	Pembangunan pusat bimbingan/konseling bagi eks penyandang penyakit sosial
20.03.	Pemantauan kemajuan perubahan sikap mental eks penyandang penyakit sosial
20.04.	Pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial
20.05.	monitoring, evaluasi dan pelaporan
20.06.	Perlindungan Sosial Anak yang berhadapan dengan Hukum
20.07.	Pembinaan dan Pelayanan Sosial Penderita HIV/AIDS dan Korban NAPZA
21.	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
21.01.	Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha
21.02.	Peningkatan jejaring kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat
21.03.	Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat
21.04.	Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial
21.05.	Pemuthakiran data PMKS
21.06.	Pendataan PMKS dan Pemberdayaan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)
21.07.	Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha
21.08.	Operasional Program Keluarga harapan (PKH)
21.09.	Pemberdayaan Peran Aktif Karang Taruna Dalam Dunia Usaha
21.10.	Peningkatan Lembaga Gerakan Orang Tua Asuh (LGOT)
21.11.	Kesiap-siagaan penanggulangan bencana alam berbasis masyarakat
Urusan : 1.07. - TENAGA KERJA	
15.	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
15.01.	Penyusunan data base tenaga kerja daerah
15.02.	Pembangunan balai latihan kerja
15.03.	Pengadaan peralatan pendidikan dan ketrampilan bagi pencari kerja
15.04.	Peningkatan profesionalisme tenaga kepelatihan dan instruktur BLK
15.05.	Pengadaan bahan dan materi pendidikan dan ketrampilan kerja
15.06.	Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja
15.07.	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana BLK
15.08.	Rehabilitasi sedang/berat sarana dan prasarana BLK
15.09.	monitoring, evaluasi dan pelaporan
15.10.	Pelatihan dan kelrampilan kerja masyarakat disekitar Daerah industry hasil tembakau dan /atau daerah penghasil bahan baku industri hasil tembakau (Cukai)
15.11.	Penguatan Sarana Dan Prasarana Kelembagaan Pelatihan Bagi Tenaga Kerja Industri Hasil Tembakau Di Balai latihan Kerja
15.12.	Pelatihan masyarakat untuk peningkatan SDM
15.13.	Penguatan Sarana Dan Prasarana Kelembagaan Pelatihan Bagi Tenaga Kerja Industri Hasil Tembakau Di Balai latihan Kerja
15.14.	Pelatihan masyarakat untuk peningkatan SDM

Paraf Hierarki	
Sekda	<i>[Signature]</i>
Asisten	<i>[Signature]</i>
Kabag Hukum	<i>[Signature]</i>




Paraf Koordinasi	
SKPD/ Bagian Pemrakarsa	<i>[Signature]</i>
SKPD/ Bagian terkait:	
1. _____	
2. _____	
3. _____	


KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN
1	2
15.15.	Fasilitas Penempatan Tenaga Kerja Melalui Mekanisme AKL, AKAD dan AKAN
15.16.	Penguatan ekonomi masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau dalam rangka pementasan kemiskinan, mengurangi pengangguran dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, dilaksanakan antara lain melalui bantuan permodalan dan sarana produksi
15.17.	Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan
15.18.	Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakkan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja
15.19.	Penetapan Upah Minimum Kabupaten
16.	Program Peningkatan Kesempatan Kerja
16.01.	Penyusunan informasi bursa tenaga kerja
16.02.	Penyebarian informasi bursa tenaga kerja
16.03.	Kerjasama pendidikan dan pelatihan
16.04.	Penyiapan tenaga kerja siap pakai
16.05.	Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan
16.06.	Pemberian fasilitasi dan mendorong sistem pendanaan pelatihan berbasis masyarakat
16.07.	monitoring, evaluasi dan pelaporan
16.08.	Fasilitas Penempatan Tenaga Kerja Melalui Mekanisme AKL, AKAD dan AKAN
16.09.	Penguatan ekonomi masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau dalam rangka pementasan kemiskinan, mengurangi pengangguran dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, dilaksanakan antara lain melalui bantuan permodalan dan sarana produksi
17.	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
17.01.	Pengendalian dan pembinaan lembaga penyalur tenaga kerja
17.02.	Fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial
17.03.	Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan
17.04.	Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan
17.05.	Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakkan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja
17.06.	Penyusunan kebijakan standarisasi lembaga penyalur tenaga kerja
17.07.	Pemantauan kinerja lembaga penyalur tenaga kerja
17.08.	monitoring, evaluasi dan pelaporan
18.	Program Pembinaan Lingkungan Sosial Ketenagakerjaan
18.01.	Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat, penguatan sarana dan prasarana keiembagaan pelatihan, serta pelayanan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja bagi pencari kerja
18.02.	Penguatan ekonomi masyarakat melalui kegiatan padat karya yang dapat mengentaskan kemiskinan, mengurangi pengangguran, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah
19.	Program Fasilitasi Transmigrasi
19.01.	Pengarahan dan fasilitasi perpindahan serta penempatan transmigrasi untuk memenuhi kebutuhan SDM
Urusan : 1.08. - TRANSMIGRASI	
15.	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi
15.01.	Penguatan SDM pemerintah daerah dan masyarakat transmigrasi di kawasan transmigrasi di perbatasan
15.02.	Peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam rangka

Paraf Hierarki	
Sekda	
Asisten	
Kabag Hukum	

Paraf Koordinasi	
SKPD/ Bagian Pemrakarsa	
SKPD/ Bagian Terkait:	
1. _____	
2. _____	
3. _____	

KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN
1	2
	pengembangan kawasan transmigrasi
15.03.	Penyediaan dan pengelolaan prasarana dan sarana sosial dan ekonomi di kawasan transmigrasi
15.04.	Penyediaan Lembaga Keuangan Daerah yang Membantu Modal Usaha di Kawasan Transmigrasi
15.05.	Pengerahan dan Fasilitas Perpindahan Serta Penempatan Transmigrasi Untuk Memenuhi Kebutuhan SDM
15.06.	Dst....
16.	Program Transmigrasi lokal
16.01.	Penyuluhan transmigrasi lokal
16.02.	Pelatihan transmigrasi lokal
16.03.	Dst ...
17.	Program Transmigrasi regional
17.01.	Penyuluhan transmigrasi regional
17.02.	Pelatihan transmigrasi regional
17.03.	Dst ...
Urusan : 1.09. - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI	
15.	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
15.01.	Penyiapan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan
15.02.	Pembangunan pos jaga/ronda
15.03.	Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan
15.04.	Pengendalian kebisingan, dan gangguan dari kegiatan masyarakat
15.05.	Pengendalian keamanan lingkungan
15.06.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
16.	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
16.01.	Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja
16.02.	Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan
16.03.	Kerjasama pengembangan kemampuan aparat polisi pamong praja dengan TNI/POLRI dan kejaksaan
16.04.	Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah
16.05.	Monitoring, evaluasi dan petaporan
16.06.	Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban
16.07.	Pengawasan dan Penertiban Rokok Ilegal
16.08.	Penyelidikan dan Penyidikan Pelanggaran Perda
16.09.	Pembinaan, Penyuluhan dan Pengawasan Pelaksanaan Perda
17.	Program pengembangan wawasan kebangsaan
17.01.	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama
17.02.	Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat
17.03.	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa
17.04.	Sosialisasi HAM
17.05.	Sosialisasi Wawasan Kebangsaan bagi tokoh Pemuda, Ormas dan Tomas
17.06.	Forum Kerukunan Umat Beragama
17.07.	Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat Kabupaten Pacitan
17.08.	Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat
17.09.	Sosialisasi Pembauran Kebangsaan
17.10.	Pemantauan dan Pengawasan Orang Asing dan Lembaga Asing
17.11.	Sosialisasi Bahaya radikalisme dan Terorisme di kalangan Pemuda, Pelajar, Mahasiswa dan

Paraf Hierarki	
Sekda	
Asisten	
Kabag Hukum	

Paraf Koordinasi	
SKPD/ Bagian Pemrakarsa	
SKPD/ Bagian Terkait:	
1. _____	
2. _____	
3. _____	

KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN
1	2
	Tokoh masyarakat
17.12.	Operasional Tim Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri
17.13.	Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Narkoba
17.14.	Kelompok Kerja Pusat Penyelenggaraan Pendidikan Wawasan Kebangsaan
17.15.	Komunitas Intelegen Daerah (KOMINDA)
18.	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan
18.01.	Fasilitasi pencapaian Halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan
18.02.	Seminar, talk show, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan
18.03.	Pentas seni dan budaya, festival, lomba cipta dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan
18.04.	Dst ...
19.	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan
19.01.	Pembentukan satuan keamanan lingkungan di masyarakat
19.02.	Pengamanan Daerah
19.03.	Operasional dan Pembinaan LINMAS
20.	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)
20.01.	Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba
20.02.	Penyuluhan pencegahan berkembangnya praktek prostitusi
20.03.	Penyuluhan pencegahan peredaran uang palsu
20.04.	Penyuluhan pencegahan dan penertiban aksi premanisme
20.05.	Penyuluhan pencegahan dan penertiban tindak penyelundupan
20.06.	Penyuluhan pencegahan praktek perjudian
20.07.	Penyuluhan pencegahan eksploitasi anak bawah umur
20.08.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
20.09.	Dst ...
21.	Program pendidikan politik masyarakat
21.01.	Penyuluhan kepada masyarakat
21.02.	Fasilitasi penyelesaian perselisihan partai politik
21.03.	Koordinasi forum-forum diskusi politik
21.04.	Penyusunan data base partai politik
21.05.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
21.06.	Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan
21.07.	Fasilitasi Administrasi Bantuan Keuangan Kepada Parpol
21.08.	Pelatihan pengelolaan keuangan kepada partai politik
21.09.	Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan
21.10.	Forum Lintas Partai Politik
21.11.	Peningkatan Pendidikan Politik Masyarakat
22.	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam
22.01.	Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam
22.02.	Pengadaan tempat penampungan sementara dan evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana alam
22.03.	Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana alam
22.04.	Pengadaan logistik dan obat-obatan bagi penduduk di tempat penampungan sementara
22.05.	Peningkatan SDM dan Operasi Tim Reaksi Cepat (TRC)
22.06.	Pendataan, Verifikasi dan Penyaluran Bantuan Pasca Bencana
22.07.	Pembentukan Relawan Penanggulangan Bencana

Paraf Hierarki	
Bekda	
Asisten	
Kabag Chukum	




Paraf Koordinasi	
SKPD/ Bagian Femrakarsa	
SKPD/ Bagian Terkait:	
1. _____	
2. _____	
3. _____	


KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN
1	2
22.08.	Peralatan Perlengkapan Penanggulangan Bencana
22.09.	Peningkatan Kapasitas Desa Tangguh Bencana
22.10.	Sosialisasi Edukasi Penanggulangan Bencana
22.11.	Penanganan Masalah Bencana Alam
22.12.	Fasilitasi Posko Penanggulangan Bencana
22.13.	Pembentukan Forum PRB
22.14.	Pelatihan Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (Jitu Pasna)
22.15.	Fasilitasi Tim Reaksi Cepat (TRC)
22.16.	Pendataan, Verifikasi dan Penyaluran Bantuan Pasca Bencana
23.	Program Peningkatan Keselamatan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran
23.01.	Penyuluhan Pencegahan Bahaya Kebakaran
23.02.	Operasional Pelaksanaan Kegiatan Pemadam Kebakaran (PMK)
Urusan : 2.01. - PERHUBUNGAN	
15.	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
15.01.	Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan
15.02.	Penyusunan kebijakan, norma, standar dan prosedur bidang perhubungan
15.03.	Koordinasi dalam pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan
15.04.	Sosialisasi kebijakan di bidang perhubungan
15.05.	Pembangunan sarana dan prasarana jembatan timbang
15.06.	Peningkatan pengelolaan terminal angkutan sungai, danau dan penyeberangan
15.07.	Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat
15.08.	monitoring, evaluasi dan pelaporan
15.09.	Intensifikasi PAD Bidang Perhubungan
15.10.	Fasilitasi Pelayanan Bidang Perhubungan
16.	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
16.01.	Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor
16.02.	Rehabilitasi/pemeliharaan prasarana balai pengujian kendaraan bermotor
16.03.	Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana jembatan timbang
16.04.	Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan
16.05.	Pemeliharaan Traffic Light (APILL)
17.	Program peningkatan pelayanan angkutan
17.01.	Kegiatan penyuluhan bagi para sopir/juru mudi untuk peningkatan keselamatan penumpang
17.02.	Kegiatan peningkatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan
17.03.	Kegiatan temu wicara pengelola angkutan umum guna meningkatkan keselamatan penumpang
17.04.	Kegiatan uji kelayakan sarana transportasi guna keselamatan penumpang
17.05.	Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya
17.06.	Kegiatan penciptaan keamanan dan kenyamanan penumpang di lingkungan terminal
17.07.	Kegiatan pengawasan peralatan keamanan dalam keadaan darurat dan perlengkapan pertolongan pertama
17.08.	Kegiatan penataan tempat-tempat pemberhentian angkutan umum
17.09.	Kegiatan penciptaan disiplin dan pemeliharaan kebersihan di lingkungan terminal
17.10.	Kegiatan penciptaan pelayanan cepat, tepat, murah dan mudah
17.11.	Pengumpulan dan analisis data base pelayanan angkutan
17.12.	Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan
17.13.	Fasilitasi perijinan di bidang perhubungan

Paraf Hierarki	
Sekda	<i>[Signature]</i>
Asisten	<i>[Signature]</i>
Kabag	<i>[Signature]</i>
ur-kum	




Paraf Koordinasi	
SXPD/ Bagian Pemrakarsa	<i>[Signature]</i>
SXPD/ Bagian Terkait:	
1.	
2.	
3.	


KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN
1	2
17.14.	Sosialisasi penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan
17.15.	Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudi (awak kendaraan angkutan umum teladan)
17.16.	Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan
17.17.	monitoring, evaluasi dan pelaporan
17.18.	Pengumpulan data base Bidang Perhubungan
18.	Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan
18.01.	Pembangunan gedung terminal
18.02.	Pembangunan Halte bus, taxi, gedung terminal
18.03.	Pembangunan jembatan penyebrangan gedung terminal
18.04.	Pengembangan pelayanan perhubungan laut
19.	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas
19.01.	Pengadaan rambu-rambu lalu lintas
19.02.	Pengadaan marka jalan
19.03.	Pengadaan pagar pengaman jalan
19.04.	Pembangunan Sarana Pengendali dan Pengaman Lalu Lintas (DAK)
19.05.	Pengendalian dan Penanggulangan Kecelakaan Lalu Lintas
19.06.	Pemeliharaan Rutin Penerangan Jalan Umum (PJU)
19.07.	Pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU)
20.	Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor
20.01.	Pembangunan Balai Pengujian Kendaraan Bermotor
20.02.	Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor
20.03.	Pelaksanaan Uji Petik Kendaraan Bermotor
20.04.	Dst ...
Urusan : 2.02. - LINGKUNGAN HIDUP	
15.	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
15.01.	Penyusunan kebijakan manajemen pengelolaan sampah
15.02.	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan
15.03.	Penyusunan kebijakan kerjasama pengelolaan persampahan
15.04.	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan
15.05.	Pengembangan teknologi pengolahan persampahan
15.06.	Bimbingan teknis persampahan
15.07.	Peningkatan kemampuan aparat pengelolaan persampahan
15.08.	Kerjasama pengelolaan sampah
15.09.	Kerjasama pengelolaan sampah antar daerah
15.10.	Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan
15.11.	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan
15.12.	monitoring, evaluasi dan pelaporan
15.13.	Dst ...
16.	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
16.01.	Koordinasi penilaian Kota Sehat/Adipura
16.02.	Koordinasi penilaian langit biru
16.03.	Pemantauan Kualitas Lingkungan
16.04.	Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup
16.05.	Koordinasi penerbitan kegiatan Pertambangan Tanpa Izin (PETI)
16.06.	Pengelolaan B3 dan Limbah B3
16.07.	Pengkajian dampak lingkungan
16.08.	Peningkatan pengelolaan lingkungan pertambangan

Paraf Hierarki	
Sekda	
Asisten	
Kabag	
Korukum	

Paraf Koordinasi	
SKPD/ Bagian Pemrakarsa	
SKPD/ Bagian Terkait:	
1. _____	
2. _____	
3. _____	

KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN
1	2
16.09.	Peningkatan peringkat kinerja perusahaan (proper)
16.10.	Koordinasi pengelolaan Prokasih/Superkasih
16.11.	Pengembangan produksi ramah lingkungan
16.12.	Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
16.13.	Koordinasi penyusunan AMDAL
16.14.	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup
16.15.	Pengkajian pengembangan sistem insentif dan disinsentif
16.16.	monitoring, evaluasi dan pelaporan
16.17.	Koordinasi Penilaian Adiwiyata
16.18.	Penguatan ekonomi masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau dalam rangka pengentasan kemiskinan mengurangi pengangguran, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, dilaksanakan antara lain melalui bantuan permodalan dan sarana produksi di bidang usaha terkait lingkungan hidup
17.	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
17.01.	Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air
17.01.	Pantai dan Laut Lestari
17.01.	Pengembangan dan Pemantapan Kawasan Konservasi Laut, Suaka Perikanan, dan Keanekaragaman Hayati Laut
17.01.	Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan
17.01.	Pengendalian Dampak Perubahan Iklim
17.01.	Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan
17.01.	Peningkatan Konservasi Daerah Tangkapan Air dan Sumber-Sumber Air
17.01.	Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan SDA
17.01.	Koordinasi pengelolaan konservasi SDA
17.01.	Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem
17.01.	Pengembangan dan Pengelolaan Kawasan World Heritage Laut
17.01.	Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kawasan Konservasi Laut Regional
17.01.	Koordinasi pengendalian Kebakaran Hutan
17.01.	Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA
17.01.	Koordinasi peningkatan pengelolaan kawasan konservasi
17.01.	monitoring, evaluasi dan pelaporan
17.01.	DsL...
18.	Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam
18.01.	Pengelolaan dan rehabilitasi terumbu karang, mangrove, padang lamun, estuaria dan teluk
18.02.	Perencanaan dan penyusunan program pembangunan pengendalian sumber daya alam dan lingkungan hidup
18.03.	Rehabilitasi hutan dan lahan
18.04.	Pengembangan kelembagaan rehabilitasi hutan dan lahan
18.05.	Penyusunan pedoman standar dan prosedur rehabilitasi terumbu karang, mangrove, dan padang lamun
18.06.	Sosialisasi pedoman standar dan prosedur rehabilitasi terumbu karang, mangrove, dan padang lamun
18.07.	Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi dan pemulihan cadangan SDA
18.08.	monitoring, evaluasi dan pelaporan
18.09.	DsL...
19.	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
19.01.	Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan

Paraf Hierarki	
Sekda	
Asisten	
Kabag Hukum	

Paraf Koordinasi	
SKPD/ Bagian Pemrakarsa	
SKPD/ Bagian Terkait:	
1. _____	
2. _____	
3. _____	


KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN
1	2
19.02.	Pengembangan data dan informasi lingkungan
19.03.	Penyusunan data sumberdaya alam dan neraca sumberdaya hutan (NSDH) nasional dan daerah
19.04.	Penguatan jejaring informasi lingkungan pusat dan daerah
19.05.	monitoring, evaluasi dan pelaporan
19.06.	Dst....
20.	Program peningkatan pengendalian polusi
20.01.	Pengujian emisi kendaraan bermotor
20.02.	Pengujian emisi/polusi udara akibat aktivitas industri
20.03.	Pengujian kadar polusi limbah padat dan limbah cair
20.04.	Pembangunan tempat pembuangan benda padat/cair yang menimbulkan polusi
20.05.	Penyuluhan dan pengendalian polusi dan pencemaran
20.06.	monitoring, evaluasi dan pelaporan
20.07.	Dst....
21.	Program pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan dikawasan-kawasan konservasi laut dan hutan
21.01.	Pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan dikawasan konservasi
21.02.	Pengembangan konservasi laut dan hutan wisata
21.03.	monitoring, evaluasi dan pelaporan
21.04.	Dst....
22.	Program pengendalian kebakaran hutan
22.01.	Pengadaan alat pemadam kebakaran hutan
22.02.	Pemetaan kawasan rawan kebakaran hutan
22.03.	Koordinasi pengendalian Kebakaran Hutan
22.04.	Penyusunan norma, standar, prosedur dan manual pengendalian kebakaran hutan
22.05.	Sosialisasi kebijakan pencegahan kebakaran hutan
22.05.	monitoring, evaluasi dan pelaporan
22.07.	Dst....
23.	Program pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut
23.01.	Pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut
23.02.	Pengembangan sistem manajemen pengelolaan pesisir laut
23.03.	Dst....
24.	Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)
24.01.	Penyusunan kebijakan, norma, standard, prosedur dan manual pengelolaan RTH
24.02.	Sosialisasi kebijakan, norma, standard, prosedur dan manual pengelolaan RTH
24.03.	Penyusunan dan analisis data/informasi pengelolaan RTH
24.04.	Penyusunan program pengembahan RTH
24.05.	Penataan RTH
24.06.	Pemeliharaan RTH
24.07.	Pengembangan taman rekreasi
24.08.	Pengawasan dan pengendalian RTH
24.09.	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan RTH
24.10.	monitoring dan evaiusi
24.11.	Pengelolaan taman kehati
25.	Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Lingkungan Hidup
25.01.	Penerapan sistem manajemen lingkungan hidup bagi masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau dan/atau penghasil bahan baku industri hasil tembakau
Urusan : 2.04. - PERTANAHAN	

Paraf Hierarki	
Sekda	✓
Asisten	✓
Kabag Hukum	✓


Paraf Koordinasi	
SKPD Bagian Pemrakarsa	✓
SKPD Bagian Terkait:	
1. _____	
2. _____	
3. _____	


KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN
1	2
15.	Program pembangunan sistem pendaftaran tanah
15.01.	Penyusunan sistem pendaftaran tanah
15.02.	Sosialisasi sistem pendaftaran tanah
15.03.	Dst...
16.	Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah
16.01.	Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah
16.02.	Penyuluhan hukum pertanahan
16.03.	Pelaksanaan Pengadaan Tanah
17.	Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan
17.01.	Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan
17.02.	Dst...
18.	Program pengembangan sistem informasi pertanahan
18.01.	Penyusunan sistem informasi pertanahan yang handal
18.02.	Dst ...
Urusan : 2.05. - KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	
15.	Program Penataan Administrasi Kependudukan
15.	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan
15.01.	Pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu
15.01.	Perumusan kebijakan peningkatan kualitas hidup perempuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi
15.02.	Pelatihan tenaga pengelola SIAK
15.02.	Perumusan kebijakan peningkatan peran dan posisi perempuan di bidang politik dan jabatan publik
15.03.	Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating dan pemeliharaan)
15.03.	Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
15.04.	Pembentukan dan Penataan Sistem Koneksi (Inter-Phase Tahap Awal) NIK
15.04.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
15.05.	Koordinasi pelaksanaan kebijakan Kependudukan
15.05.	Dst ...
15.06.	Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan
15.07.	Penyediaan informasi yang dapat diakses masyarakat
15.08.	pengelolaan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan
15.09.	Pengembangan data base kependudukan
15.10.	Penyusunan kebijakan kependudukan
15.11.	Peningkatan kapasitas aparat kependudukan dan catatan sipil
15.12.	Sosialisasi kebijakan kependudukan
15.13.	Peningkatan kapasitas keiambagaan kependudukan
15.14.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
15.15.	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
15.16.	Sosialisasi kebijakan kependudukan
15.17.	Penataan dan pengelolaan arsip kependudukan dan catatan sipil
16.	Program Penguatan Keiambagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
16.01.	Advokasi dan fasilitasi PUG bagi Perempuan
16.02.	Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2)
16.03.	Pemetaan potensi organisasi dan lembaga masyarakat yang berperan dalam pemberdayaan

Paraf Hierarki	
Sekda	
Asisten	
Kabag Hukum	




Paraf Koordinasi	
SKPD/ Bagian Pemrakarsa	
SKPD/ Bagian Terkait:	
1. _____	
2. _____	
3. _____	


KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN
1	2
	perempuan dan anak
16.04.	Pengembangan materi dan petaksanaan KIE tentang kesetaraan dan keadilan gender (KKG)
16.05.	Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
16.06.	Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak
16.07.	Evaluasi pelaksanaan PUG
16.08.	Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak
16.09.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
16.10.	Fasilitasi Forum Anak Kabupaten dan Kecamatan
17.	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
17.01.	Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan di daerah
17.02.	Pelatihan bagi pelatih (TOT) SDM pelayanan dan pendampingan korban KDRT
17.03.	Penyusunan sistem perlindungan bagi perempuan
17.04.	Sosialisasi dan advokasi kebijakan penghapusan buta aksara perempuan (PBAP)
17.05.	Sosialisasi dan advokasi kebijakan perlindungan tenaga kerja perempuan
17.06.	Sosialisasi sistem pencatatan dan pelaporan KDRT
17.07.	Penyusunan profil perlindungan perempuan lansia dan cacat
17.08.	Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan
17.09.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
17.10.	Fasilitasi dan advokasi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak
17.11.	Peningkatan SDM pelaksana P2TP2A
17.12.	Fasilitasi Bantuan Rehabilitasi Sosial terhadap perempuan dan anak korban kekerasan
18.	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan
18.01.	Kegiatan pembinaan organisasi perempuan
18.02.	Kegiatan pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan jender
18.03.	Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera
16.04.	Kegiatan bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha
18.05.	Kegiatan pameran hasil karya perempuan dibidang pembangunan
18.06.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
18.07.	Fasilitasi peningkatan peranan wanita menuju keluarga sehat sejahtera (P2WKSS)
18.08.	Pembinaan organisasi perempuan
18.09.	Bimbingan Ketrampilan dan manajemen usaha bagi perempuan
18.10.	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
18.11.	Monitoring, Evaluasi LAKIP dan Penilaian Mandiri
19.	Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
19.01.	Workshop peningkatan peran perempuan dalam pengambilan keputusan
19.02.	Pemberdayaan lembaga yang berbasis gender
19.03.	Dst....
Urusan : 2.06. - PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
15.	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak Dan Perempuan
15.01.	Perumusan kebijakan peningkatan kualitas hidup perempuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi
15.02.	Perumusan kebijakan peningkatan peran dan posisi perempuan di bidang politik dan jabatan publik

Paraf Hierarki	
Sekda	
Asisten	
Kabag Hukum	




Paraf Koordinasi	
SKPD/ Bagian Pemrakarsa	
SKPD/ Bagian Terkait:	
1. _____	
2. _____	
3. _____	


KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN
1	2
15.03.	Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
15.04.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
16.	Program Penguatan Kelembagaan Pangarusutamaan Gender Dan Anak
16.01.	Advokasi dan fasilitasi PUG bagi Perempuan
16.02.	Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2)
16.03.	Pemetaan potensi organisasi dan lembaga masyarakat yang berperan dalam pemberdayaan perempuan dan anak
16.04.	Pengembangan materi dan pelaksanaan KIE tentang kesetaraan dan keadilan gender (KKG)
16.05.	Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
16.06.	Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak
16.07.	Evaluasi pelaksanaan PUG
16.08.	Pengembangan Sistem informasi Gender dan Anak
16.09.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
16.10.	Fasilitasi Forum Anak Kabupaten dan Kecamatan
17.	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
17.01.	Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan di daerah
17.02.	Pelatihan bagi pelatih (TOT) SDM pelayanan dan pendampingan korban KDRT
17.03.	Penyusunan sistem perlindungan bagi perempuan
17.04.	Sosialisasi dan advokasi kebijakan penghapusan buta aksara perempuan (PBAP)
17.05.	Sosialisasi dan advokasi kebijakan perlindungan tenaga kerja perempuan
17.06.	Sosialisasi sistem pencatatan dan pelaporan KDRT
17.07.	Penyusunan profil perlindungan perempuan lansia dan cacat
17.08.	Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan
17.09.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
17.10.	Fasilitasi dan advokasi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak
17.11.	Peningkatan SDM pelaksana P2TP2A
17.12.	Fasilitasi Bantuan Rehabilitasi Sosial terhadap perempuan dan anak korban kekerasan
18.	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan Jender dalam pembangunan
18.01.	Kegiatan pembinaan organisasi perempuan
18.02.	Kegiatan pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan jender
18.03.	Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera
18.04.	Kegiatan bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha
18.05.	Kegiatan pameran hasil karya perempuan dibidang pembangunan
18.06.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
18.07.	Fasilitasi peningkatan peranan wanita menuju keluarga sehat sejahtera (P2WKSS)
18.08.	Pembinaan organisasi perempuan
18.09.	Bimbingan Ketrampilan dan manajemen usaha bagi perempuan
18.10.	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
18.11.	Monitoring, Evaluasi LAKIP dan Penilaian Mandiri
19.	Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
Urusan : 2.07. - KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA	

Paraf Hierarki	
Sekda	
Asisten	
Kabag Humas	




Paraf Koordinasi	
SKPDI Bagian Pemrakarsa	
SKPDI Bagian Terkait:	
1. _____	
2. _____	
3. _____	


KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN
1	2
15.	Program Keluarga Berencana
15.01.	Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin
15.02.	Pelayanan KIE
15.03.	Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi Individu
15.04.	Promosi Pelayanan Khiba
15.05.	Pembinaan Keluarga Berencana
15.06.	Pengadaan sarana mobilitas tim KB keliling
15.07.	Pengadaan Sarana Prasarana Pengelolaan Program KB (DAK)
15.08.	Penunjang Kegiatan Hari Keluarga Nasional (HARGANAS)
15.09.	Bantuan Operasional KB (DAK)
15.10.	Peningkatan Kapasitas Kader Tribina
16.	Program Kesehatan Reproduksi Remaja
16.01.	Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)
16.02.	Memperkuat dukungan dan partisipasi masyarakat
16.03.	Dst ...
17.	Program pelayanan kontrasepsi
17.01.	Pelayanan konseling KB
17.02.	Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB
17.03.	Pengadaan alat kontrasepsi
17.04.	Pelayanan KB medis operasi
17.05.	Dst...
18.	Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri
18.01.	Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB
18.02.	Pengelolaan Data dan Informasi Program KB
18.03.	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin
18.04.	Fasilitasi sarana dan prasarana kelompok BKB, BKR, BKL dan UPPKS (Pos Daya)
19.	Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan dimasyarakat
19.01.	Penyuluhan kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan dimasyarakat
19.02.	Dst....
20.	Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR
20.01.	Pendirian pusat pelayanan informasi dan konseling KRR
20.02.	Fasilitasi forum pelayanan KRR bagi kelompok remaja dan kelompok sebaya diluar sekolah
20.03.	Fasilitasi Pendataan keluarga
21.	Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS
21.01.	Penyuluhan penanggulangan narkoba dan PMS di sekolah
21.02.	Dst....
22.	Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak
22.01.	Pengumpulan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak
22.02.	Dst....
23.	Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga
23.01.	Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di kecamatan
23.02.	Pelatihan kader dan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di kecamatan
24.	Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU
24.01.	Pengkajian pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU
24.02.	Dst....

Paraf Hierarki	
Sekda	
Asisten	
Kabag Tekum	

Paraf Koordinasi	
SKPD/ Bagian Pemrakarsa	
SKPD/ Bagian Terkait:	
1. _____	
2. _____	
3. _____	


KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN
1	2
Urusan : 2.08. - KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	
15.	Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang kondusif
15.01.	Penyusunan kebijakan tentang Usaha Kecil Menengah
15.02.	Sosialisasi kebijakan tentang Usaha Kecil Menengah
15.03.	Fasilitasi kemudahan formalisasi badan usaha Usaha Kecil Menengah
15.04.	Pendirian unit penanganan pengaduan
15.05.	Pengkajian dampak regulasi/kebijakan nasional
15.06.	Perencanaan, koordinasi, dan pengembangan Usaha Kecil Menengah
15.07.	Pengembangan jaringan infrastruktur Usaha Kecil Menengah
15.08.	Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah
15.09.	Fasilitasi permasalahan proses produksi Usaha Kecil Menengah
15.10.	Pemberian fasilitasi pengamanan kawasan Usaha Kecil Menengah
15.11.	monitoring, evaluasi dan pelaporan
15.12.	Fasilitasi Pengembangan Usaha Mikro
16.	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
16.01.	Fasilitasi pengembangan Inkubator teknologi dan bisnis
16.02.	Memfasilitasi peningkatan kemitraan investasi Usaha Kecil Menengah dengan perusahaan asing
16.03.	Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
16.04.	Peningkatan kerjasama di bidang HAKI
16.05.	Fasilitasi pengembangan sarana promosi hasil produksi
16.06.	Penyelenggaraan pelalihan kewirausahaan
16.07.	Pelalihan manajemen pengelolaan Koperasi/KUD
16.08.	Sosialisasi HAKI kepada Usaha Mikro Kecil Menengah
16.09.	Sosialisasi dan pelatihan pola pengelolaan limbah industri dalam menjaga kelestarian kawasan Usaha Mikro Kecil Menengah
16.10.	monitoring, evaluasi dan pelaporan
16.11.	Pameran Produk Unggulan
16.12.	Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah
16.13.	Pemanfaatan fasilitas pemerintah untuk UMKM dan Koperasi sebagai penunjang Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT)
17.	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
17.01.	Sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan
17.02.	Pengembangan klaster bisnis
17.03.	Koordinasi pemanfaatan fasilitas pemerintah untuk Usaha Kecil Menengah dan koperasi
17.04.	Koordinasi penggunaan dana pemerintah bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
17.05.	Pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
17.06.	Pengembangan sarana pemasaran produk Usaha Mikro Kecil Menengah
17.07.	Peningkatan jaringan kerjasama antar lembaga
17.08.	Penyelenggaraan pembinaan industri rumah tangga, industri kecil dan industri menengah
17.09.	Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro Kecil Menengah
17.10.	Pengembangan kebijakan dan program peningkatan ekonomi lokal
17.11.	monitoring, evaluasi dan pelaporan
17.12.	Fasilitasi Dana Bergulir

Paraf Hierarki	
Sekda	
Asisten	
Kabag kum	

Paraf Koordinasi	
SKPD/ Bagian Pemrakarsa	
SKPD/ Bagian Terkait:	
1. _____	
2. _____	
3. _____	

KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN
1	2
18.	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
18.01.	Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan koperasi
18.02.	Peningkatan sarana dan prasana pendidikan dan pelatihan perkoperasian
18.03.	Pembangunan sistem informasi perencanaan pengembangan Perkoperasian
18.04.	Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian
18.05.	Pembinaan, pengawasan, dan penghargaan koperasi berprestasi
18.06.	Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi
18.07.	Penyebaran model-model pola pengembangan koperasi
18.08.	Rintis penerapan teknologi sederhana/manajemen modern pada jenis usaha koperasi
18.09.	monitoring, evaluasi dan pelaporan
18.10.	Pembinaan kelembagaan koperasi
18.11.	Diklat Teknis Perkoperasian
18.12.	Penilaian Kesehatan KSP/USP
Urusan : 2.09. - PENANAMAN MODAL	
15.	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
15.01.	Peningkatan fasilitasi terwujudnya kerjasama strategis antara usaha besar dan Usaha Kecil Menengah
15.02.	Pengembangan potensi unggulan daerah
15.03.	Fasilitasi dan koordinasi percepatan pembangunan kawasan produksi daerah tertinggal (P2KPDT)
15.04.	Koordinasi antar lembaga dalam pengendalian pelaksanaan investasi PMDN/PMA
15.05.	Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal
15.06.	Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha
15.07.	Pengawasan dan evaluasi kinerja dan aparatur Badan Penanaman Modal Daerah
15.08.	Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal
15.09.	Peningkatan kualitas SDM guna peningkatan pelayanan Investasi
15.10.	Penyelenggaraan pameran investasi
15.11.	monitoring, evaluasi dan pelaporan
15.12.	Dst....
16.	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
16.01.	Penyusunan kebijakan investasi bagi pembangunan fasilitas infrastruktur
16.02.	Memfasilitasi dan koordinasi kerjasama di bidang investasi
16.03.	Penyusunan Cetak Biru (Master Plan) pengembangan penanaman modal
16.04.	Pengembangan System Informasi Penanaman Modal
16.05.	Penyusunan sistem informasi penanaman modal di daerah
16.06.	Penyederhanaan prosedur perijinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal
16.07.	Kajian kebijakan penanaman modal
16.08.	Pemberian insentif investasi di wilayah tertinggal
16.09.	monitoring, evaluasi dan pelaporan
16.10.	Peningkatan Manajemen Investasi Daerah
16.11.	Pendampingan ISO
16.12.	Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Publik
16.13.	Penatalaksanaan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
16.14.	Sosialisasi Kebijakan Penanaman modal dan Pelayanan Perizinan
17.	Program penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah

Paraf Hierarki	
Sekda	
Asisten	
Kabag Hukum	

Paraf Koordinasi	
SKPD/Bagian Pemrakarsa	
SKPD/Bagian Terkait:	
1. _____	
2. _____	
3. _____	

KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN
1	2
17.01.	Kajian potensi sumberdaya yang terkait dengan investasi
17.02.	Dst....
18.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemanfaatan Energi dan Sumber Daya Mineral
18.01.	Fasilitasi Ijin ESDM
Urusan : 2.10. - KEBUDAYAAN	
15.	Program Pengembangan Nilai Budaya
15.01.	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah
15.02.	Penatagunaan naskah kuno nusantara
15.03.	Penyusunan kebijakan tentang budaya lokal daerah
15.04.	Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan nilai budaya
15.05.	Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang budaya
15.06.	Pendukungn pengelolaan museum dan taman budaya di daerah
15.07.	Pengembangan Nilai dan Geografis Sejarah
16.	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
16.01.	Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya
16.02.	Pelestarian fisik dan kandungan bahan pustaka termasuk naskah kuno
16.03.	Penyusunan kebijakan pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah
16.04.	Sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya bakal daerah
16.05.	Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air
16.06.	Pengembangan kebudayaan dan pariwisata
16.07.	Pengembangan nilai dan geografi sejarah
16.08.	Perekaman dan digitalisasi bahan pustaka
16.09.	Perumusan kebijakan sejarah dan purbakala
16.10.	Pengawasan, Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program pengelolaan kekayaan budaya
16.11.	Pendukungn pengelolaan museum dan taman budaya di daerah
16.12.	Pengelolaan karya cetak dan karya rekam
16.13.	Pengembangan database sistem informasi sejarah purbakala
16.14.	Pengembangan Nilai dan Geografis Sejarah
17.	Program Pengelolaan Keragaman Budaya
17.01.	Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah
17.02.	Penyusunan sistem informasi database bidang kebudayaan
17.03.	Penyelenggaraan dialog kebudayaan
17.04.	Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah
17.05.	Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah
17.06.	Seminar dalam rangka revitalisasi dan reaktualisasi budaya lokal
17.07.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengembangan keanekaragaman budaya
17.08.	Dst....
18.	Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya
18.01.	Fasilitasi pengembangan kemitraan dengan LSM dan perusahaan swasta
18.02.	Fasilitasi pembentukan kemitraan usaha profesi antar daerah
18.03.	Membangun kemitraan pengelolaan kebudayaan antar daerah
18.04.	monitoring, evaluasi dan pelaporan
18.05.	Dst....

Paraf Hierarki		Paraf Koordinasi	
Sekda	<input checked="" type="checkbox"/>	SKPD/ Bagian Pemrakarsa	<input checked="" type="checkbox"/>
Asisten	<input checked="" type="checkbox"/>	SKPD/ Bagian Terkait:	
Kabag Hukum	<input checked="" type="checkbox"/>	1. _____	
		2. _____	
		3. _____	


KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN
1	2
Urusan : 2.11. - PEMUDA DAN OLAHRAGA	
15.	Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda
15.01.	Pendataan potensi kepemudaan
15.02.	Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan pemuda
15.03.	Penelitian dan pengkajian kebijakan-kebijakan pembangunan kepemudaan
15.04.	Pengembangan sistem informasi manajemen kepemudaan berbasis E-YOUTH
15.05.	Peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepemudaan
15.06.	Penyusunan pedoman komunikasi, informasi, edukasi, dan advokasi tentang kepemimpinan pemuda
15.07.	Penyusunan rancangan pola kemitraan antar pemuda dengan masyarakat
15.08.	Perluasan penyusunan rencana aksi daerah bidang kepemudaan
15.09.	Perumusan kebijakan kewirausahaan bagi pemuda
15.10.	monitoring, evaluasi dan pelaporan
15.11.	Dst...
16.	Program peningkatan peran serta kepemudaan
16.01.	Pembinaan organisasi kepemudaan
16.02.	Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan
16.03.	Fasilitasi aksi bhakti sosial kepemudaan
16.04.	Fasilitasi pekan temu wicara organisasi pemuda
16.05.	Penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba dikalangan generasi muda
16.06.	Lomba kreasi dan karya tulis ilmiah dikalangan pemuda
16.07.	Pembinaan pemuda pelopor keamanan lingkungan
16.08.	Pameran prestasi hasil karya pemuda
16.09.	monitoring, evaluasi dan pelaporan
16.10.	Pembinaan Organisasi Kepemudaan
16.11.	Pembinaan Dan Pengiriman PASKIBRAKA
17.	Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda
17.01.	Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda
17.02.	Pelatihan ketrampilan bagi pemuda
17.03.	Dst...
18.	Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba
18.01.	Pemberian penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda
18.02.	Dst...
19.	Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga
19.01.	Peningkatan mutu organisasi dan tenaga keolahragaan
19.02.	Pengembangan Sistem sertifikasi dan standardisasi profesi
19.03.	Pengembangan perencanaan olah raga terpadu
19.04.	Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengembangan olahraga
19.05.	Pembinaan manajemen organisasi olahraga
19.06.	Pengkajian kebijakan-kebijakan pembangunan olahraga
19.07.	Penyusunan pola kemitraan pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan dan pengembangan industri olahraga
19.08.	monitoring, evaluasi dan pelaporan
19.09.	Dst...
20.	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
20.01.	Pelaksanaan identifikasi bakat dan potensi pelajar dalam olahraga
20.02.	Pelaksanaan identifikasi dan pengembangan olahraga unggulan daerah
20.03.	Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat
20.04.	Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah

Paraf Hierarki	
Sekda	<i>[Signature]</i>
Asisten	<i>[Signature]</i>
Kabag	<i>[Signature]</i>

Paraf Kelembagaan	
SKPD/ Bagian Pemrakarsa	<i>[Signature]</i>
SKPD/ Bagian Terkait:	
1. _____	
2. _____	
3. _____	


KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN
1	2
20.05.	Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi
20.06.	Penyelenggaraan kompetisi olahraga
20.07.	Pemassalan olah raga bagi pelajar, mahasiswa, dan masyarakat
20.08.	Pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan berprestasi
20.09.	Pengembangan dan pemanfaatan IPTEK olahraga sebagai pendorong peningkatan prestasi olahraga
20.10.	Pengembangan olahraga lanjut usia termasuk penyandang cacat
20.11.	Pengembangan olahraga rekreasi
20.12.	Peningkatan jaminan kesejahteraan bagi masa depan atlet, pelatih, dan teknisi olahraga
20.13.	Peningkatan jumlah dan kualitas serta kompetensi pelatih, peneliti, praktisi, dan teknisi olahraga
20.14.	Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat
20.15.	Peningkatan manajemen organisasi olahraga tingkat perkumpulan dan tingkat daerah
20.16.	Peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam pendanaan dan pembinaan olahraga
20.17.	Kerjasama peningkatan olahragawan berbakat dan berprestasi dengan lembaga/instansi lainnya
20.18.	Pemeliharaan rutin dan berkala sarana dan prasarana olah raga
21.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga
21.01.	Peningkatan kerjasama pola kemitraan antara pemerintah dan masyarakat untuk pembangunan sarana dan prasarana olahraga
21.02.	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olah raga
21.03.	Pemantauan dan evaluasi pembangunan sarana dan prasarana olahraga
21.04.	
21.05.	Pengembangan dan pemanfaatan iptek dalam pengembangan sarana dan prasarana olahraga
21.06.	Peningkatan peran dunia usaha dalam pengembangan sarana dan prasarana olahraga
21.07.	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olah raga
21.08.	Dst....
Urusan : 2.12. - PARIWISATA	
15.	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
15.01.	Analisa pasar untuk promosi dan pemasaran objek pariwisata
15.02.	Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata
15.03.	Pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata
15.04.	Koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata
15.05.	Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri
15.06.	Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan pemasaran pariwisata
15.07.	Pengembangan Statistik Kepariwisata
15.08.	Pelatihan pemandu wisata terpadu
15.09.	Dst....
16.	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
16.01.	Pengembangan objek pariwisata unggulan
16.02.	Peningkatan pembangunan sarana dan perasarana pariwisata
16.03.	Pengembangan jenis dan paket wisata unggulan
16.04.	Pelaksanaan koordinasi pembangunan objek pariwisata dengan lembaga/dunia usaha

Paraf Hierarki	
Sekda	
Asisten	
Kabag	

Paraf Koordinasi	
SKPD/ Bagian Pemrakarsa	
SKPD/ Bagian Terkait:	
1. _____	
2. _____	
3. _____	

KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN
1	2
16.05.	Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan destinasi pemasaran pariwisata
16.06.	Pengembangan daerah tujuan wisata
16.07.	Pengembangan, sosialisasi, dan penerapan serta pengawasan standarisasi
16.08.	Pemeliharaan sarana prasarana pariwisata
16.09.	Pengembangan SDM dan Profesionalisme Bidang Pariwisata
16.10.	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata
16.11.	Pembahasan perda tentang jasa Pariwisata
16.12.	Peningkatan pembangunan sarana dan perasarana pariwisata (DAK)
17.	Program Pengembangan Kemitraan
17.01.	Pengembangan dan penguatan informasi dan database
17.02.	Pengembangan dan penguatan litbang, kebudayaan dan pariwisata
17.03.	Pengembangan SDM di bidang kebudayaan dan pariwisata bekerjasama dengan lembaga lainnya
17.04.	Fasilitasi pembentukan forum komunikasi antar pelaku industri pariwisata dan budaya
17.05.	Pelaksanaan koordinasi pembangunan kemitraan pariwisata
17.06.	Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program peningkatan kemitraan
17.07.	Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata
17.08.	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata
17.09.	monitoring, evaluasi dan pelaporan
17.10.	Dst ...
Urusan : 2.13. - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	
15.	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
15.01.	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
15.02.	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat
15.03.	Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Desa
15.04.	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
15.05.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemberdayaan masyarakat
15.06.	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bantuan Keuangan
15.07.	Tilik warga Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan
15.08.	Optimalisasi Pokja Pengaduan Masyarakat TKPK
15.09.	Pemeliharaan Pasca Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd)
15.10.	Identifikasi Sumber Mata Air (SMA)
15.11.	Program Jalin Matra Propinsi Jawa Timur
16.	Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan
16.01.	Pelatihan ketrampilan usaha budidaya tanaman
16.02.	Pelatihan ketrampilan manajemen badan usaha milik desa
16.03.	Pelatihan ketrampilan usaha industri kerajinan
16.04.	Pelatihan ketrampilan usaha pertanian dan peternakan
16.05.	Fasilitasi permodalan bagi usaha mikro kecil dan menengah di pedesaan
16.06.	Fasilitasi kemitraan swasta dan usaha mikro kecil dan menengah di pedesaan
16.07.	monitoring, evaluasi dan pelaporan
16.08.	Pemberdayaan BUMDes
16.09.	Pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG) Perdesaan
16.10.	Pembinaan pasar desa dan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) pedesaan
16.11.	Pembinaan Pengembangan Penghidupan Berkelanjutan (P2B)

Paraf Hierarki	
Sekda	
Asisten	
Kabag Hukum	

Paraf Koordinasi	
SKPD/Bagian Pemrakarsa	
SKPD/Bagian Terkait:	
1. _____	
2. _____	
3. _____	

KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN
1	2
16.12.	Peningkatan Usaha Ekonomi Masyarakat (PUEM)
17.	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
17.01.	Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa
17.02.	Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa
17.03.	Pemberian stimulan pembangunan desa
17.04.	monitoring, evaluasi dan pelaporan
17.05.	Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)
17.06.	Penguatan Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPM/LPMD)
17.07.	Pembinaan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa
17.08.	Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa
18.	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa
18.01.	Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pembangunan kawasan perdesaan
18.02.	Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa
18.03.	Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa
18.04.	monitoring, evaluasi dan pelaporan
18.05.	Periombaan Desa dan Penilaian Pengelola APBDES terbaik
18.06.	Peningkatan kapasitas aparatur dalam penataan dan administrasi desa
18.07.	Pendataan Profil Desa/Kelurahan
18.08.	Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan dan aset desa
18.09.	Pembinaan aparatur pemerintah desa
18.10.	Sosialisasi aset dan kekayaan desa
19.	Program peningkatan peran perempuan di perdesaan
19.01.	Pelatihan perempuan di perdesaan dalam bidang usaha ekonomi produktif
19.02.	Peningkatan kesejahteraan keluarga
19.03.	Pelatihan perempuan di perdesaan dalam usaha ekonomi produktif
19.04.	Operasional TP-PKK Kabupaten dan Kecamatan dalam Pelaksanaan 10 Program Pokok PKK
Urusan : 2.14. - KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
15.	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
15.01.	Fasilitasi penyempurnaan peraturan perundangan penylaran dan KMIP
15.02.	Pembinaan dan Pengembangan jaringan Komunikasi dan Informasi
15.03.	Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi
15.04.	Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
15.05.	Pengadaan alat studio dan komunikasi
15.06.	Pengkajian dan pengembangan sistem informasi
15.07.	Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi
15.08.	Pengembangan website pacitankab.go.id
15.09.	Peningkatan Layanan Akses Teknologi Informasi bagi Masyarakat
15.10.	Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang dan Jasa melalui Implementasi E-Procurement
16.	Program pengkajian dan penelitian bidang Informasi dan komunikasi
16.01.	Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi
16.02.	Dst ...
17.	Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi
17.01.	Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi
17.02.	Dst ...
18.	Program kerjasama Informasi dengan mas media

Paraf Hierarki	
Sekda	✓
Asisten	✍
Kabag Hukum	✍




Paraf Koordinasi	
SKPD/ Bagian Pemrakarsa	✍
SKPD/ Bagian Terkait:	
1. _____	
2. _____	
3. _____	


KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN
1	2
18.01.	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah
18.02.	Penyebarluasan Informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah
18.03.	Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat
19.	Program Pengembangan tata Kelola Pemerintahan Berbasis Teknologi Informatika
19.01.	Pembinaan dan Pengembangan jaringan Komunikasi dan Informasi
19.02.	Pengkajian dan pengembangan sistem informasi
19.03.	Peningkatan Layanan Akses Teknologi Informasi bagi Masyarakat
19.04.	Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang dan Jasa melalui Implementasi E-Procurement
19.05.	Pengembangan e-gov
20.	Penyebarluasan Informasi Publik Dan Kerja Sama Media Massa
20.01.	Pembinaan Dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi Dan Informasi
20.02.	Penyebarluasan Informasi yang bersifat Penyuluhan Bagi Masyarakat
20.03.	Penyebarluasan Informasi Melalui Siaran Radio
21.	Program Pengembangan Data /Informasi Statistik Daerah
21.01.	Penyusunan Data Statistik Sektoral
22.	Program Penyelenggaraan Persandian Daerah
22.01.	Pengadaan, Pemeliharaan Peralatan Persandian dan Peningkatan Kapasitas Personil Persandian
Urusan : 2.15. - KEARSIPAN	
15.	Program perbaikan sistem administrasi kearsipan
15.01.	Pembangunan data base informasi kearsipan
15.02.	Pengumpulan data
15.03.	Pengkiasifikasian data
15.04.	Penyusunan sistem katalog data
15.05.	Pengadaan sarana penyimpanan
15.06.	Kajian sistem administrasi kearsipan
16.07.	Pemeliharaan peralatan jaringan informasi kearsipan
15.08.	Pembinaan Arsip Desa
15.09.	Bimbingan Teknis Kearsipan SKPD
16.	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah
16.01.	Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip
16.02.	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah
16.03.	Penduplikatan dokumen/arsip daerah dalam bentuk informatika
16.04.	Pembangunan sistem keamanan penyimpanan data
16.05.	Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah
17.	Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan
17.01.	Pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip
17.02.	Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah
17.03.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan kondisi situasi data
17.04.	Dst....
18.	Program peningkatan kualitas pelayanan Informasi
18.01.	Penyusunan dan penerbitan naskah sumber arsip
18.02.	Penyediaan sarana layanan informasi arsip
18.03.	Sosialisasi/penyuluhan kearsipan di lingkungan instansi pemerintah/swasta
18.04.	Dst....

Paraf Hierarki	
Sekda	✓
Asisten	✓
Kabag Tekum	✓

Paraf Koordinasi	
SKPD/ Bagian Pemrakarsa	✓
SKPD' Bagian Terkait:	
1. _____	
2. _____	
3. _____	


KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN
1	2
Urusan : 2.16. - PERPUSTAKAAN	
Urusan : 2.17. - KETAHANAN PANGAN	
Urusan : 2.18. - PERDAGANGAN	
15.	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
15.01.	Koordinasi peningkatan hubungan kerja dengan lembaga perlindungan konsumen
15.02.	Fasilitasi penyelesaian permasalahan-permasalahan pengaduan konsumen
15.03.	Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa
15.04.	Operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrioogian daerah
15.05.	Peningkatan Layanan Sidang Tera dan Tera Ulang UTTP
15.06.	Pengumpulan informasi hasil tembakau yang dilekati / tidak dilekati Pita Cukai di Peredaran atau Tempat Penjualan Eceran
15.07.	Sosialisasi Perlindungan Konsumen
16.	Program Peningkatan Karjasama Perdagangan Internasional
16.01.	Penyiapan data base kuota setiap jenis barang dan jasa
16.02.	Penyebartuasan informasi data base kuota setiap jenis barang dan jasa
16.03.	Penyuluhan tim daerah dalam perundingan perdagangan intemasional
16.04.	Fasilitasi penyelesaian sengketa dagang
16.05.	koordinasi pengelolaan isu-isu perdagangan intemasional
16.06.	Dst...
17.	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor
17.01.	Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pengembangan industri
17.02.	Pengembangan informasi peluang pasar perdagangan luar negeri
17.03.	Sosialisasi kebijakan penyederhanaan prosedur dan dokumen ekspor dan impor
17.04.	Pengembangan data base informasi potensi unggulan
17.05.	Kerjasama standardisasi mutu produk baik nasional, bilateral, regional dan intemasional
17.06.	Kerjasama dengan lembaga intemasional dalam rangka pengembangan produk
17.07.	Koordinasi penyelesaian masalah produksi dan distribusi sektor industri
17.08.	Membangun jejaring dengan eksportir
17.09.	Koordinasi program pengembangan ekspor dengan instansi terkait /asosiasi /pengusaha
17.10.	Pengembangan Kluster produk ekspor
17.11.	Peningkatan kapasitas lab penguji mutu barang ekspor dan impor
17.12.	Pembangunan promosi perdagangan intemasional
18.	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
18.01.	Penyempurnaan perangkat peraturan, kebijakan dan pelaksanaan operasional
18.02.	Fasilitasi kemudahan perijinan pengembangan usaha
18.03.	Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk
18.04.	Pengembangan keiembagaan kerjasama kemitraan
18.05.	Pengembangan pasar lelang daerah
18.06.	Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan
18.07.	Sosialisasi peningkatan penggunaan produk dalam negeri
18.08.	Revitalisasi pasar Daerah
18.09.	Pemeliharaan Pasar Daerah
18.10.	Penyempurnaan Pasar Daerah
18.11.	Pembinaan dan Evaluasi UPTD Pasar Daerah
18.12.	Pembangunan dan Peningkatan Pasar Daerah
19.	Program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan

Paraf Hierarki	
Sekda	
Asisten	
Kabag Hukum	




Paraf Koordinasi	
SKPD/ Bagian Pemrakarsa	
Sr.PD/ Bagian Terkait:	
1. _____	
2. _____	
3. _____	


KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN
1	2
19.01.	Kegiatan pembinaan organisasi pedagang kakilima dan asongan
19.02.	Kegiatan penyuluhan peningkatan disiplin pedagang kakilima dan asongan
19.03.	Kegiatan penataan tempat berusaha bagi pedagang kakilima dan asongan
19.04.	Kegiatan fasilitasi modal usaha bagi pedagang kakilima dan asongan
19.05.	Kegiatan pengawasan mutu dagangan pedagang kakilima dan asongan,
19.06.	Kegiatan pembangunan gudang penyimpanan barang pedagang kakilima dan asongan
19.07.	Dst ...
20.	Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Perdagangan dan Jasa
20.01.	Revitalisasi pasar Daerah (DAK)
20.02.	Rehabilitasi/Pemeliharaan Pasar Daerah
20.03.	Penyempurnaan Pasar Daerah
20.04.	Pembinaan dan Evaluasi Pasar Daerah
20.05.	Pembangunan dan Peningkatan Pasar Daerah
21.	Program pengembangan sentra-sentra Industri potensial
21.01.	Penguatan Ekonomi Masyarakat Dilingkungan Industri Hasil Tembakaou dalam rangka Pengentasan Kemiskinan, Mengurangi Pengangguran dan Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah Dilaksanakan Melalui bantuan Permodalan dan Sarana Produksi bagi IKM
21.02.	Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Kerja Masyarakat dilingkungan Industri hasil Tembakau dan atau Daerah Penghasil Bahan Baku Industri Hasil Tembakau melalui Peningkatan SDM Bagi Pelaku Industri Kecil Menengah
21.03.	Pengembangan Produk Unggulan
22.	Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Perdagangan
22.01.	Pengumpulan informasi hasil tembakau yang dilekati/tidak dilekati pita cukai di peredaran atau tempat penjualan eceran
23.	Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Perindustrian
23.01.	Pembinaan kemampuan dan ketrampilan kerja masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau dan/atau daerah penghasil tembakau melalui peningkatan SDM bagi pelaku IKM
Urusan : 2.19. - INDUSTRI	
15.	Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi
15.01.	Koordinasi modal ventura bagi industri berbasis teknologi
15.02.	Pelayanan pengembangan modal ventura dan Inkubator
15.03.	Pengembangan infrastruktur kelembagaan standarisasi
15.04.	Pengembangan kapasitas pranata pengukuran, standardisasi, pengujian dan kualitas
15.05.	Pengembangan sistem inovasi teknologi industri
15.06.	Penguatan kemampuan industri berbasis teknologi
16.	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
16.01.	Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya
16.02.	Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri
16.03.	Penyusunan kebijakan industri terkait dan industri penunjang industri kecil dan menengah
16.04.	Pemberian kemudahan izin usaha industri kecil dan menengah
16.05.	Pemberian fasilitas kemudahan akses perbankan bagi industri kecil dan menengah
16.06.	Fasilitasi kerjasama kemitraan industri mikro, kecil dan menengah dengan swasta
16.07.	Pendataan Industri Kecil Menengah Kabupaten Pacitan

Paraf Hierarki	
Sekda	
Asisten	
Kabag Eksekutif	




Paraf Koordinasi	
SKPD/ Bagian Pemrakarsa	
SKPD/ Bagian Terkait:	
1. _____	
2. _____	
3. _____	


KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN
1	2
16.08.	Pembinaan Industri Kecil Menengah
16.09.	Fasilitasi Pokmas industri
16.10.	Pengembangan Produk Unggulan
17.	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
17.01.	Pembinaan kemampuan teknologi industri
17.02.	Pengembangan dan peyayanan teknologi industri
17.03.	Perluasan penerapan SNI untuk mendorong daya saing industri manufaktur
17.04.	Perluasan penerapan standar produk industri manufaktur
17.05.	Dst....
18.	Program Penataan Struktur Industri
18.01.	Kebijakan keterkaitan industrri hulu-hilir
18.02.	Penyediaan sarana maupun prasarana klaster industri
18.03.	Pembinaan keterkaitan produksi industri hulu hingga ke hilir
18.04.	Dst ...
19.	Program pengembangan sentra-sentra Industri potensial
19.01.	Pembangunan akses transportasi sentra-sentra industri potensial
19.02.	Penyediaan sarana informasi yang dapat diakses masyarakat
19.03.	Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau yang Dilekati /Tidak Dilekati Pita Cukai di Peredaran atau Tempat Penjualan Eceran
20.	Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang PerIndustrlan
20.01.	Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembakau dan/atau Daerah Penghasil Tembakau Melalui Peningkatan SDM Bagi Pelaku IKM
Urusan : 2.20. - STATISTIK	
15.	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah
15.01.	Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah
15.02.	Pengolahan, updating dan analisis data dan statistik daerah
15.03.	Penyusunan dan pengumpulan data PDRB
15.04.	Pengolahan, updating dan analisis data PDRB
15.05.	Penyusunan Data Statistik Sektoral
Urusan : 3.01. - PERTANIAN	
15.	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
15.01.	Pelalihan petani dan pelaku agribisnis
15.02.	Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis
15.03.	Peningkatan kemampuan lembaga petani
15.04.	Peningkatan sistem insentif dan disinsentif bagi petani/kelompok tani
15.05.	Penyuluhan dan bimbingan pemanfaatan dan produktivitas lahan tidur
15.06.	DsL...
16.	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)
16.01.	Penanganan daerah rawan pangan
16.02.	Penyusunan data base potensi produksi pangan
16.03.	Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan
16.04.	Analisis rasio jumlah penduduk terhadap jumlah kebutuhan pangan
16.05.	Laporan berkala kondisi ketahanan pangan daerah
16.06.	Kajian rantai pasokan dan pemasaran pangan
16.07.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan perberasan

Paraf Hierarki	
Sekda	
Asisten	
Kabag	
Ketum	

Paraf Koordinasi	
SKPD/ Bagian Pemrakarsa	
Sr.PD/ Bagian Terkait:	
1. _____	
2. _____	
3. _____	

KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN
1	2
16.08.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan subsidi pertanian
16.09.	Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan
16.10.	Pemantauan dan analisis akses pangan masyarakat
16.11.	Pemantauan dan analisis harga pangan pokok
16.12.	Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian
16.13.	Pengembangan cadangan Pangan Daerah
16.14.	Pengembangan desa mandiri pangan
16.15.	Pengembangan intensifikasi bnaman padi, palawija
16.16.	Pengembangan diversifikasi tanaman
16.17.	Pengembangan pertanian pada lahan kering
16.18.	Pengembangan lumbung pangan desa
16.19.	Pengembangan model distribusi pangan yang efisien
16.20.	Pengembangan perbenihan/perbibitan
16.21.	Pengembangan sistem informasi pasar
16.22.	Peningkatan mutu dan keamanan pangan
16.23.	Koordinasi kebijakan perberasan
16.24.	Koordinasi perumusan kebijakan pertanahan dan infrastruktur pertanian dan perdesaan
16.25.	Penelitian dan pengembangan sumberdaya pertanian
16.26.	Penelitian dan pengembangan teknologi bloteknologi
16.27.	Penelitian dan pengembangan teknologi budidaya
16.28.	Penelitian dan pengembangan teknologi pasca panen
16.29.	Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan, produk pertanian
16.30.	Penyuluhan sumber pangan alternatif
16.31.	monitoring, evaluasi dan pelaporan
16.32.	Pemanfaatan perkarangan untuk pengembangan pangan
16.33.	Pengembangan kawasan rumah pangan lestari
16.34.	Fasilitasi pengembangan lumbung pangan desa
16.35.	Laporan berkala kondisi ketahanan pangan daerah
16.36.	Penyusunan data base potensi produksi pangan
16.37.	Penanganan daerah rawan pangan
16.38.	Fasilitasi dewan ketahanan pangan
16.39.	Pengembangan cadangan pangan daerah
16.40.	Pembangunan gudang cadangan pangan dan penyediaan sarana pendukung
16.41.	Peningkatan mutu pangan
16.42.	Peningkatan keamanan pangan
16.43.	Pemantauan dan analisis akses pangan pokok
16.44.	Pemantauan dan analisis rantai pasokan dan pemasaran pangan
16.45.	Analisis dan penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)
16.45.	Peningkatan penganekaragaman konsumsi pangan
16.47.	Penyusunan dan analisis Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi
17.	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan
17.01.	Penelitian dan pengembangan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan
17.02.	Fasilitasi Kerjasama regional/nasional/internasional penyediaan hasil produksi pertanian/perkebunan komplementer
17.03.	Pembangunan sarana dan prasarana pasar kecamatan/perdesaan produksi hasil pertanian/perkebunan
17.04.	Pembangunan pusat-pusat etalase/eksebisipromosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan

Paraf Hierarki	
Sekda	
Asisten	
Kabag Hukum	

Paraf Koordinasi	
SKPD/ Bagian Pemrakarsa	
SKPD/ Bagian Terkait:	
1. _____	
2. _____	
3. _____	

KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN
1	2
17.05.	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana pasar kecamatan/perdesaan produksi hasil pertanian/perkebunan
17.06.	Pemeliharaan rutin/berkala pusat-pusat etalase/eksebis/prcmosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan
17.07.	Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah
17.08.	Penyuluhan pemasaran produksi pertanian/perkebunan guna menghindari tengkulak dan sistem ijon
17.09.	Pembangunan pusat-pusat penampungan produksi hasil pertanian/perkebunan masyarakat yang akan dipasarkan
17.10.	Pengolahan informasi permintaan pasar atas hasil produksi pertanian/perkebunan masyarakat
17.11.	Penyuluhan distribusi pemasaran atas hasil produksi pertanian/perkebunan masyarakat
17.12.	Penyuluhan kualitas dan teknis kemasan hasil produksi pertanian/perkebunan yang akan dipasarkan
17.13.	monitoring, evaluasi dan pelaporan
17.14.	Dst...
18.	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan
18.01.	Penelitian dan pengembangan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna
18.02.	Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna (DAK)
18.03.	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna
18.04.	Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna
18.05.	Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi pertanian/perkebunan tepat guna
18.06.	Pelatihan penerapan teknologi pertanian/perkebunan modern bercocok tanam
18.07.	monitoring, evaluasi dan pelaporan
18.08.	Pendampingan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian (PPSP)
18.09.	Pemeliharaan Rutin/berkala prasarana Teknologi Pertanian/Perkebunan
18.10.	Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi pertanian/perkebunan
18.11.	Pengadaan Sarana Prasarana Teknologi Pertanian/Perkebunan
18.12.	Rehabilitasi Prasarana Teknologi Pertanian/Perkebunan
19.	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan
19.01.	Penyuluhan peningkatan produksi pertanian/perkebunan
19.02.	Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan
19.03.	Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan
19.04.	Sertifikasi bibit unggul pertanian/perkebunan
19.05.	Penyusunan kebijakan pencegahan alih fungsi lahan pertanian
19.06.	monitoring, evaluasi dan pelaporan
19.07.	Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan
19.08.	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan
19.09.	Anti Poverty Program (APP) Bidang Pertanian
19.10.	Anti Poverty Program (APP) Bidang Perkebunan
19.11.	Pengembangan Pertanian Lahan Kering
19.12.	Peningkatan produktifitas dan Mutu Produksi Pertanian Serta Pengembangan Kawasan
19.13.	Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah
19.14.	Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan
19.15.	Pengembangan Pupuk Organik

Parat Hierarki	
Sekda	<input checked="" type="checkbox"/>
Asisten	<input checked="" type="checkbox"/>
Kabag Tekum	<input checked="" type="checkbox"/>

Parat Koordinasi	
SKPD/ Bagian Pemrakarsa	<input checked="" type="checkbox"/>
SKPD/ Bagian Terkait:	
1. _____	
2. _____	
3. _____	

KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN
1	2
19.16.	Bimbingan teknis pengamatan, identifikasi dan pengendalian OPT Tanaman Pangan Dan Hortikultura
19.17.	Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT)
19.18.	Pengembangan Tanaman Perkebunan Pendukung Kawasan Agropolitan
19.19.	Pengembangan Agenia Hayati
19.20.	Penanganan Panen dan Pasca Panen bahan baku (DBHCT)
19.21.	Pembangunan Jalan Produksi
19.22.	Promosi atas hasil produksi pertanian perkebunan unggulan daerah
19.23.	Peremajaan dan Intensifikasi dan Rehabilitasi tanaman Perkebunan
19.24.	Optimalisasi Sumberdaya dan Sarana Prasarana Pengendalian OPT Perkebunan
19.25.	Penguatan Ekonomi masyarakat di lingk. Industri hasil tembakau hasil tembakau dalam rangka pengentasan kemiskinan, mengurangi pengangguran dan mendorong pertumbuhan Ekonomi daerah ,dilaksanakan anatar lain melalui bantuan sarana produksi tanaman perkebunan (DBHCHT)
19.26.	Standarisasi Kualitas Bahan Baku melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana Produksi (DBHCHT)
20.	Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan
20.01.	Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan
20.02.	Peningkatan kesejahteraan tenaga penyuluh pertanian/perkebunan
20.03.	Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan
21.	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit tenak
21.01.	Pendataan masalah peternakan
21.02.	Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular temak
21.03.	Pemusnahan ternak yang terjangkit penyakit endemik
21.04.	Pengawasan perdagangan temak antar daerah
21.05.	monitoring, evaluasi dan pelaporan
21.06.	Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak
22.	Program peningkatan produksi hasil peternakan
22.01.	Pembangunan sarana dan prasarana pembibitan temak
22.02.	Pembibitan dan perawatan temak
22.03.	Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat
22.04.	Penyuluhan pengelolaan bibit temak yang didistribusikan kepada masyarakat
22.05.	Penelitian dan pengolahan gizi dan pakan temak
22.06.	Pembelian dan pendistribusian vaksin dan pakan temak
22.07.	Penyuluhan kualitas gizi dan pakan temak
22.08.	Pengembangan agribisnis peternakan
22.09.	monitoring, evaluasi dan pelaporan
22.10.	Pendistribusian bibit ternak kepada Masyarakat
22.11.	Pengembangan Agribisnis Peternakan
22.12.	Pengembangan Inseminasi buatan
22.13.	Peningkatan Pengawasan Bahan Asal Hewan (BAH) yang ASUH
22.14.	Promosi atas hasil produksi peternakan unggulan daerah
23.	Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan
23.01.	Penelitian dan pengembangan pemasaran hasil produksi peternakan
23.02.	Fasilitasi Kerjasama regional/nasional/internasional penyediaan hasil produksi peternakan komplementer
23.03.	Pembangunan sarana dan prasarana pasar produksi hasil peternakan
23.04.	Pembangunan pusat-pusat etalase/eksebis/promosi atas hasil produksi peternakan
23.05.	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana pasar produksi hasil peternakan
23.06.	Pemeliharaan rutin/berkala pusat-pusat etalase/eksebis/promosi atas hasil produksi peternakan

Paraf Hierarki	
Sekda	<input checked="" type="checkbox"/>
Asisten	<input checked="" type="checkbox"/>
Kabag Hukum	<input checked="" type="checkbox"/>

Paraf Koordinasi	
SKPD/ Bagian Pemrakarsa	<input checked="" type="checkbox"/>
SKPD/ Bagian Terkait:	
1. _____	
2. _____	
3. _____	

KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN
1	2
23.07.	Promosi alas hasil produksi peternakan unggulan daerah
23.08.	Penyuluhan pemasaran produksi peternakan
23.09.	Pembangunan pusat-pusat penampungan produksi hasil peternakan masyarakat
23.10.	Pengolahan informasi permintaan pasar atas hasil produksi peternakan masyarakat
23.11.	Penyuluhan distribusi pemasaran atas hasil produksi peternakan masyarakat
23.12.	Penyuluhan kualitas dan teknis kemasan hasil produksi peternakan yang akan dipasarkan
23.13.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
23.14.	Dst....
24.	Program peningkatan penerapan teknologi peternakan
24.01.	Penelitian dan pengembangan teknobgi peternakan tepat guna
24.02.	Pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna
24.03.	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna
24.04.	Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi peternakan tepat guna
24.05.	Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi peternakan tepat guna
24.06.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
24.07.	Dst...
25.	Program Peningkatan Kapasitas Peiaku Usaha Pertanian/Perkebunan
25.01.	Penyuluhan Dan Pendampingan Petani Dan Pelaku Agribisnis
25.02.	Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani
25.03.	Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuih Pertanian/Perkebunan
25.04.	Penyuih Dan Pendampingan Bagi Pertanian/Perkebunan
26.	Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku
26.01.	Standarisasi Kualitas Bahan Baku
26.02.	Penanganan Panen Dan Pasca Panen Bahan Baku
Urusan : 3.02. - KELAUTAN DAN PERIKANAN	
15.	Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir
15.01.	Pembinaan kelompok ekonomi masyarakat pesisir
15.02.	Sosialisasi dan Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan Regulasi Bidang Kelautan dan Perikanan
15.03.	Fasilitasi bidang kelautan dan perikanan
15.04.	Pendampingan Program Nasional Bidang Kelautan dan Perikanan
15.05.	Penyusunan Sistem informasi Perikanan
15.06.	Pendampingan Program Sertifikasi hak atas tanah masyarakat perikanan
16.	Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya lautan
16.01.	Pembentukan kelompok masyarakat swakarsa pengamanan sumberdaya kelautan
16.02.	Dst ...
17.	Program peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut
17.01.	Penyuluhan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut
17.02.	Dst ...
18.	Program peningkatan mitigasi bencana alam laut dan prakiraan iklim laut
18.01.	Kajian mitigasi bencana alam laut dan prakiraan iklim laut
18.02.	Dst ...
19.	Program peningkatan kegiatan budaya kelautan dan wawasan maritim kepada masyarakat

Parat Hierarki	
Sekda	6
Asisten	71
Kabag Hukum	1

Parat Koordinasi	
SKPD/ Bagian Pemrakarsa	1
SKPD/ Bagian Terkait:	
1.	
2.	
3.	

KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN
1	2
19.01.	Penyuluhan budaya kelautan
19.02.	Dst...
20.	Program pengembangan budidaya perikanan
20.01.	Pengembangan bibit ikan unggul
20.02.	Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan
20.03.	Pembinaan dan pengembangan perikanan
20.04.	Pengembangan Budidaya Mina Padi
20.05.	Optimalisasi sarana dan prasarana tambak (DAK)
20.06.	Pendampingan Program Sertifikasi hak atas tanah Pembudidaya Ikan
20.07.	Pengembangan Budidaya Sidat
20.08.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan (DAK)
20.09.	Anty Poverty Program (APP) Bidang Perikanan
20.10.	Pengembangan Unit Pembenihan Rakyat (UPR)
20.11.	Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar
20.12.	Pengembangan budidaya udang intensif
21.	Program pengembangan perikanan tangkap
21.01.	Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap
21.02.	Pembangunan tempat pelelangan ikan
21.03.	Pemeliharaan rutin/berkala tempat pelelangan ikan
21.04.	Rehabilitasi sedang/berat tempat pelelangan ikan
21.05.	Pengembangan lembaga usaha perdagangan perikanan tangkap
21.06.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendaratan Ikan (DAK)
21.07.	Restocking Ikan dan Pembinaan Kelompok di Perairan Umum
21.08.	Pengembangan Sarana Penangkapan Ikan (DAK)
21.09.	Peningkatan Kapasitas KUB Dan POKMASWAS
21.10.	Pemberdayaan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan
21.11.	Penyediaan Sarana dan Prasarana Konservasi (DAK)
21.12.	Pembangunan Pos Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan
22.	Program pengembangan sistem penyuluhan perikanan
22.01.	Kajian sistem penyuluhan perikanan
22.02.	Dst...
23.	Program optimalisasi pengelolaan dan Pemasaran produksi perikanan
23.01.	Kajian optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan
23.02.	Pelatihan Pengolahan Ikan
23.03.	Bimbingan Teknis Pelaku Utama Perikanan
23.04.	Optimalisasi Kelembagaan Pelaku Usaha
23.05.	Pengawasan mutu hasil perikanan
23.06.	Peningkatan sarana prasarana pengolahan dan pemasaran (DAK)
23.07.	Peningkatan mutu hasil perikanan
23.08.	Promosi produk perikanan
24.	Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar
24.01.	Kajian kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar
24.02.	Dst...
25.	Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Perikanan
25.01.	Sosialisasi Dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan Regulasi Bidang Kelautan dan Perikanan
25.02.	Fasilitasi Bidang Kelautan Dan Perikanan
25.03.	Penyusunan Sistem informasi Perikanan
25.04.	Pendampingan Program Sertifikasi hak atas tanah Masyarakat Perikanan

Paraf Hierarki	
Sekda	✓
Asisten	✓
Kabag Hukum	✓

Paraf Koordinasi	
SKPD/ Bagian Pemrakarsa	✓
SKPD/ Bagian Terkait:	
1. _____	
2. _____	
3. _____	


KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN
1	2
26.	Program optimalisasi pengelolaan produksi perikanan
26.01.	Bimbingan Teknis Pelaku Utama Perikanan
26.02.	Optimalisasi Kelembagaan Pelaku Usaha
26.03.	Peningkatan sarana prasarana pengolahan dan pemasaran (DAK)
26.04.	Peningkatan mutu hasil perikanan
26.05.	Promosi produk perikanan
Urusan : 3.03. - KEHUTANAN	
15.	Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan
15.01.	Pembentukan kesatuan pengelolaan hutan produksi
15.02.	Pengembangan hutan tanaman
15.03.	Pengembangan hasil hutan non-kayu
15.04.	Perencanaan dan pengembangan hutan masyarakat
15.05.	Optimalisasi PNB
15.06.	Pengelolaan dan pemanfaatan hutan
15.07.	Pengembangan industri dan pemasaran hasil hutan
15.08.	Pengembangan pengujian dan pengendalian peredaran hasil hutan
15.09.	monitoring, evaluasi dan pelaporan
16.	Program rehabilitasi hutan dan lahan
16.01.	Koordinasi penyelenggaraan reboisasi dan penghijauan hutan
16.02.	Pembuatan bibit/benih tanaman kehutanan
16.03.	Penanaman pohon pada kawasan hutan industri dan hutan wisata
16.04.	Pemeliharaan kawasan hutan industri dan hutan wisata
16.05.	Pembinaan, pengendalian dan pengawasan gerakan rehabilitasi hutan dan lahan
16.06.	Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan
16.07.	monitoring, evaluasi dan pelaporan
16.03.	Dst...
17.	Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan
17.01.	Pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan
17.02.	Sosialisasi pencegahan dan dampak kebakaran hutan dan lahan
17.03.	Bimbingan teknis pengendalian kebakaran hutan dan lahan
17.04.	Penanggulangan kebakaran hutan dan lahan
17.05.	Penyuluhan kesadaran masyarakat mengenai dampak perusakan hutan
17.06.	Dst...
18.	Program pemanfaatan kawasan hutan industri
18.01.	Pertanian tanaman palawija, padi gogorancah
18.02.	Dst ...
19.	Program pembinaan dan penertiban industri hasil hutan
19.01.	Penyusunan peraturan daerah mengenai pengelolaan industri hasil hutan
19.02.	Sosialisasi peraturan daerah mengenai pengelolaan industri hasil hutan
19.03.	Pengawasan dan penertiban pelaksanaan peraturan daerah mengenai pengelolaan industri hasil hutan
19.04.	Perluasan akses layanan informasi pemasaran hasil hutan
19.05.	monitoring, evaluasi dan pelaporan
19.06.	Dst ...
20.	Program perencanaan dan pengembangan hutan
20.01.	Pengembangan hutan masyarakat adat
20.02.	Pendampingan kelompok usaha perhutanan rakyat
20.03.	Dst ...

Parat Hierarki	
Sekda	✓
Asisten	✓
Kabag Teknik	✓

Parat Koordinasi	
SK.PD/ Bagian Pemrakarsa	✓
SK.PD/ Bagian Terkait:	
1. _____	
2. _____	
3. _____	

KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN
1	2
Urusan : 3.04. - ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	
15.	Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan
15.01.	Penyusunan regulasi mengenai kegiatan penambangan bahan galian C
15.02.	Sosialisasi regulasi mengenai kegiatan penambangan bahan galian C
15.03.	Monitoring dan pengendalian kegiatan penambangan bahan galian C
15.04.	Koordinasi dan pendataan tentang hasil produksi dibidang pertambangan
15.05.	Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan penambangan galian C
15.06.	monitoring, evaiuasi dan pelaporan
15.07.	Pembinaan dan pengendalian ijin pertambangan umum
16.	Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan
16.01.	Pengawasan penertiban kegiatan pertambangan rakyat
16.02.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan dampak kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan rakyat
16.03.	Penyebaran Peta Daerah Rawan Bencana Alam Geologi
16.04.	Dst...
17.	Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagallstrikan
17.01.	Koordinasi pengembangan tenaga listrik
17.02.	Pengembangan energi baru dan terbarukan (biogas)
Urusan : 4.01. - PERENCANAAN PEMBANGUNAN	
15.	Program pengembangan data/informasi
15.01.	Pengumpulan, updating, dan analisis data infomusi capaian target kinerja program dan kegiatan
15.02.	Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan
15.03.	Penyusunan dan analisis data/informasi perencanaan pembangunan kawasan rawan bencana
15.04.	Penyusunan dan analisis data/informasi perencanaan pembangunan ekonomi
15.05.	Penyusunan profile daerah
15.06.	Dst ...
16.	Program kerjasama pembangunan
16.01.	Koordinasi kerjasama wilayah perbatasan
16.02.	koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah
16.03.	Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha/lembaga
16.04.	Koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah daerah
16.05.	monitoring, evaluasi dan pelaporan
16.06.	Dst ...
17.	Program Pengembangan Wilayah Perbatasan
17.01.	Koordinasi penyelesaian masalah perbatasan antar daerah
17.02.	Sosialisasi kebijakan Pemerintah dalam penyelesaian perbatasan antar negara
17.03.	Koordinasi penetapan rencana tata ruang perbatasan
17.04.	Penyusunan perencanaan pengembangan perbatasan
17.05.	monitoring, evaluasi dan pelaporan
17.06.	Dst ...
18.	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
18.01.	Sosialisasi kebijakan Pemerintah dalam pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh

Paraf Hierarki	
Sekda	
Asisten	
Kabag Teknis	


Paraf Koordinasi	
SKPD/ Bagian Pemrakarsa	
SKPD/ Bagian Terkait:	
1. _____	
2. _____	
3. _____	


KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN
1	2
18.02.	Koordinasi penetapan rencana rata ruang wilayah strategis dan cepat tumbuh
18.03.	Penyusunan perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh
18.04.	monitoring, evaluasi dan pelaporan
18.05.	Fasilitasi Perencanaan Fisik dan Prasarana Di Kawasan Strategis Dan Cepat Tumbuh
19.	Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar
19.01.	Koordinasi penyelesaian permasalahan penanganan sampah perkotaan
19.02.	Koordinasi penyelesaian permasalahan transportasi perkotaan
19.03.	Koordinasi penanggulangan dan penyelesaian bencana alam/sosial
19.04.	Koordinasi perencanaan penanganan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi
19.05.	Koordinasi perencanaan penanganan pusat-pusat industri
19.06.	Koordinasi perencanaan penanganan pusat-pusat pendidikan
19.07.	Koordinasi perencanaan penanganan perumahan
19.08.	Koordinasi perencanaan penanganan perpajakan
19.09.	Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan
19.10.	Koordinasi penanggulangan limbah rumah tangga dan industri perkotaan
19.11.	monitoring, evaluasi dan pelaporan
20.	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah
20.01.	Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana
20.02.	Sosialisasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah
20.03.	Bimbingan teknis tentang perencanaan pembangunan daerah
20.04.	Dst....
21.	Program perencanaan pembangunan daerah
21.01.	Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik
21.02.	Penyusunan rancangan RPJPD
21.03.	Penyelenggaraan musrenbang RPJPD
21.04.	Penetapan RPJPD
21.05.	Penyusunan rancangan RPJMD
21.06.	Penyelenggaraan musrenbang RPJMD
21.07.	Penetapan RPJMD
21.08.	Penyusunan rancangan RKPD
21.09.	Penyelenggaraan musrenbang RKPD
21.10.	Penetapan RKPD
21.11.	Koordinasi penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah
21.12.	Koordinasi penyusunan Laporan Keterangan Perbrgung Jawaban (LKPJ)
21.13.	Monitoring, evaluasi, pengendalian, dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah
21.14.	Pengumpulan dan analisis data perencanaan pembangunan daerah
21.15.	Penyusunan strategi, pengendalian, analisis kewilayahan dan konektivitas perencanaan pembangunan daerah
21.16.	Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah
21.17.	Fasilitasi, Sinkronisasi dan Harmonisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah
21.18.	Koordinasi Perencanaan Dan Penyusunan Laporan Kinerja Pembangunan Daerah
21.19.	Peningkatan Pengelolaan Perencanaan Pembangunan Daerah
21.20.	Pengelolaan Informasi Pembangunan dan Profil Daerah
21.21.	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
21.22.	Koordinasi perumusan program dan pemecahan masalah-masalah pembangunan daerah

Paraf Hierarki	
Sekda	<input checked="" type="checkbox"/>
Asisten	<input checked="" type="checkbox"/>
Kabag Hukum	<input checked="" type="checkbox"/>

Paraf Koordinasi	
SKPD/ Bagian Pemrakarsa	<input checked="" type="checkbox"/>
SKPD/ Bagian Terkait:	
1. _____	
2. _____	
3. _____	

KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN
1	2
21.23.	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah
21.24.	Review Dokumen RPJMD 2016-2021
21.25.	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan berbasis kewilayahan
22.	Program perencanaan pembangunan ekonomi
22.01.	Penyusunan masterplan pembangunan ekonomi daerah
22.02.	Penyusunan indikator ekonomi daerah
22.03.	Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat
22.04.	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi
22.05.	Penyusunan tabel input output daerah
22.06.	Penyusunan masterplan penanggulangan kemiskinan
22.07.	Penyusunan indikator dan pemetaan daerah rawan pangan
22.08.	monitoring, evaluasi dan pelaporan
22.09.	Fasilitasi dan pembinaan teknis perencanaan pembangunan bidang ekonomi
22.10.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan bidang ekonomi
22.11.	Penyusunan analisis, strategi dan kerangka regulasi pembangunan bidang ekonomi
22.12.	Penyusunan Data Base Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi
22.13.	Fasilitasi Pengembangan Kawasan Agropolitan Dan Program Anti Proverty (APP)
22.14.	Penyusunan Data Base Infrastruktur Perekonomian Daerah
22.15.	Penyusunan Masterplan Pembangunan Ekonomi Daerah
22.16.	Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah
22.17.	Fasilitasi Perencanaan Bidang Ekonomi
23.	Program perencanaan sosial dan budaya
23.01.	Koordinasi penyusunan masterplan pendidikan
23.02.	Koordinasi penyusunan masterplan kesehatan
23.03.	Koordinasi dan Sinkronisasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya
23.04.	monitoring, evaluasi dan pelaporan
23.05.	Fasilitasi dan pembinaan teknis perencanaan pembangunan bidang sosial budaya
23.06.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan bidang sosial budaya
23.07.	Penyusunan analisis, strategi dan kerangka regulasi pembangunan bidang sosial budaya
23.08.	Penyusunan Data Base Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya
23.09.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan Bidang Sosial Budaya
23.10.	Fasilitasi Bidang Sosial Budaya
23.11.	Koordinasi, Fasilitasi dan penyusunan kerangka regulasi Penanggulangan Kemiskinan
23.12.	Penyusunan indikator daerah di bidang sosial budaya
23.13.	Updating Data Base Bidang Sosial Budaya
23.14.	Penyusunan dokumen perencanaan bidang Sosbud
24.	Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam
24.01.	Koordinasi penyusunan masterplan prasarana perhubungan daerah
24.02.	Koordinasi penyusunan masterplan pengendalian sumber daya alam dan lingkungan hidup
24.03.	monitoring, evaluasi dan pelaporan
24.04.	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan infrastruktur, Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam
24.05.	Fasilitasi dan pembinaan teknis perencanaan pembangunan Infrastruktur, Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

Paraf Hierarki	
Sekda	
Asisten	
Kabag Hukum	

Paraf Koordinasi	
SKPD/ Bagian Pemrakarsa	
SKPD/ Bagian Terkait:	
1. _____	
2. _____	
3. _____	


KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN
1	2
24.06.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan Infrastruktur, Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam
24.07.	Penyusunan analisis, strategi dan kerangka regulasi pembangunan Infrastruktur, Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam
24.08.	Penyusunan Data Base Perencanaan Pembangunan Infrastruktur, Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam
24.09.	Fasilitasi Perencanaan Prasarana Wilayah
24.10.	Fasilitasi Perencanaan Prasarana Pemukiman Dan Lingkungan Hidup
24.11.	Fasilitasi Perencanaan Prasarana Perhubungan, Pengairan Dan Sumber Daya Alam
24.12.	Fasilitasi, koordinasi dan analisis perencanaan tata ruang daerah
25.	Program perencanaan pembangunan daerah rawan bencana
25.01.	Koordinasi penyusunan profile daerah rawan bencana
25.02.	Koordinasi pembangunan daerah rawan bencana
25.03.	monitoring, evaluasi dan pelaporan
25.04.	Dst...
Urusan : 4.02. - PEMERINTAHAN UMUM	
15.	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah
15.01.	Pembahasan rancangan peraturan daerah
15.02.	Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/lokokh agama
15.03.	Rapat-rapat alat kelengkapan dewan
15.04.	Rapat-rapat paripurna
15.05.	Kegiatan Reses
15.06.	Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah
15.07.	Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD
15.08.	Sosialisasi peraturan perundang-undangan
15.09.	Kegiatan peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah
15.10.	Kegiatan Penyusunan sistim informasi terhadap layanan publik
15.11.	Penyusunan Raperda Inisiatif
16.	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah
16.01.	Diaiog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan.
16.02.	Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lembaga pemerintah non departemen/luar negeri
16.03.	Rapat koordinasi unsur MUSPIDA
16.04.	Rapat koordinasi pejabat pemerintahan daerah
16.05.	Kunjungan kerja/inspeksi kepala daerah /wakil kepala daerah
16.06.	Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya
16.07.	Operasional Rumah Tangga Kepala daerah / Wakil Kepala Daerah
16.08.	Pelayanan Keprotokolan
16.09.	Pelayanan Kehumasan
17.	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
17.01.	Penyusunan analisa standar belanja
17.02.	Penyusunan Standar Satuan Harga
17.03.	Penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah
17.04.	Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah

Paraf Hierarki	
Sekda	<i>[Signature]</i>
Asisten	<i>[Signature]</i>
Kabag Hukum	<i>[Signature]</i>

Paraf Koordinasi	
SKPD/ Bagian Pemrakarsa	<i>[Signature]</i>
SKPD/ Bagian Terkait:	
1. _____	
2. _____	
3. _____	

KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN
1	2
17.05.	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi
17.06.	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD
17.07.	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD
17.08.	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD
17.09.	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD
17.10.	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBO
17.11.	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
17.12.	Penyusunan sistem informasi keuangan daerah
17.13.	Penyusunan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah
17.14.	Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah
17.15.	Bimbingan leknis implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah
17.16.	Peningkatan manajemen aset/barang daerah
17.17.	Peningkatan manajemen investasi daerah
17.18.	Revaluasi/appraisal aset/barang daerah
17.19.	Fasilitasi Penyusunan Potensi Pendapatan Daerah
17.20.	Penyusunan dan Pengelolaan Administrasi Pembukuan Pembiayaan
17.23.	Peningkatan Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah
17.24.	Peningkatan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
17.30.	Penyelesaian keberatan dan restitusi Wajib Pajak dan Wajib Retribusi Daerah
17.32.	Operasional Penagihan Pajak dan Retribusi Daerah
17.34.	Evaluasi Pengelolaan SPJ Fungsional SKPD
17.35.	Koordinasi dan Sinkronisasi dana Bagi Hasil
17.38.	Evaluasi dan Rekonsiliasi Pendapatan Asli Daerah
17.39.	Sosialisasi Raperda APBD dan Perubahan APBD
17.42.	Kalibrasi Data, Penyusunan Klasifikasi Tanah dan NJOP
17.50.	Fasilitasi Penyusunan RKA, DPA dan SPD SKPD
17.51.	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah
17.53.	Penunjang Pelaksanaan Penertiban Bagi Hasil Pajak Daerah
17.55.	inventarisasi Aset Daerah
17.56.	Penertiban Pengelolaan Aset Daerah
17.57.	Pengamanan Aset Daerah
17.62.	Fasilitasi Evaluasi dan Rekonsiliasi Data Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan yang Sah
17.69.	Pengelolaan dan Pengembangan Aplikasi SIPKD
17.71.	Penyusunan Rencana Pemeliharaan Barang Milik Daerah
17.73.	Analisa Standar Biaya
17.74.	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah
17.75.	Peningkatan Pelayanan Kasda
17.77.	Peningkatan pengelolaan benda-benda berharga/karcls daerah
17.82.	Optimalisasi Penerimaan PBB P2
17.83.	Pengembangan Sistem Informasi PBB P2
17.84.	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus
17.85.	Pengelolaan Administrasi Gaji PNSD
17.87.	Penyusunan profil aset daerah
17.88.	Fasilitasi Pelunasan Pemungutan PBB-P2
17.89.	Fasilitasi Pelaksanaan Dana BK, Hibah dan Bansos
17.90.	Sistem Penganggaran Terintegrasi

Paraf Hierarki	
Sekda	
Asisten	
Kabag Stukum	

Paraf Koordinasi	
SKPD/ Bagian Pemrakarsa	
SKPD/ Bagian Terkait:	
1. _____	
2. _____	
3. _____	

KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN
1	2
17.91.	Pemutakhiran data dan Pendampingan PBB P2
17.92.	Penyelesaian Permasalahan Pengelolaan Keuangan Daerah
17.93.	Pasilitasi dan Rekonsiliasi Data Pajak dan IWP
17.97.	Pemutakhiran Data Piutang Pajak dan Retribusi Daerah
17.98.	Penyusunan pengelolaan administrasi pembukuan pendapatan daerah
17.99.	Pendataan Bangunan PBB P2
17.999.	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah
18.	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota
18.01.	Evaluasi rancangan peraturan daerah tentang APBD kabupaten/kota
18.02.	Evaluasi rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD kabupaten/kota
18.03.	Evaluasi rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota
18.04.	Penyusunan standar evaluasi rancangan peraturan daerah tentang APBD kabupaten/kota
18.05.	Asistensi penyusunan rancangan regulasi pengelolaan keuangan daerah kabupaten/kota
18.06.	Dst....
19.	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa
19.01.	Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa
19.02.	Evaluasi rancangan peraturan desa tentang pendapatan desa
19.03.	Penyusunan pedoman pengelolaan keuangan desa
19.04.	DsL....
20.	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
20.01.	Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala
20.02.	Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah
20.03.	Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
20.04.	Penanganan kasus pada wilayah pemerintahan dibawahnya
20.05.	Inventarisasi temuan pengawasan
20.06.	Tindak lanjut hasil temuan pengawasan
20.07.	Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif
20.08.	Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan
20.09.	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan
20.10.	Penyusunan EKPPD
20.11.	Penyusunan LKPJ
20.12.	Penyusunan LPPD
20.13.	Pembinaan dan evaluasi kinerja kecamatan
20.14.	Reviu Dokumen Rencana Pembangunan, Anggaran Tahunan Daerah
20.15.	Pengawasan Pemerintahan Desa Dan Tujuan Tertentu
20.16.	Reviu SAKIP dan Evaluasi LKj.IP
20.17.	Sistem Pengendalian Internal Pemerintah
20.18.	Pengawasan Reformasi Birokrasi
20.19.	Penanganan ijin perceraian PNS
20.20.	Pengawasan Internal Secara Berkala
20.21.	Review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
21.	Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
21.01.	Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
21.02.	Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja
21.03.	Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Bidang Pengawasan
21.04.	Peningkatan Kualitas Pengawas

Paraf Hierarchy	
Sekda	✓
Asisten	✓
Kabag Hukum	✓




Paraf Koordinasi	
SKPD/ Bagian Pemrakarsa	✓
SKPD/ Bagian Terkait:	
1. _____	
2. _____	
3. _____	


KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN
1	2
22.	Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan
22.01.	Penyusunan naskah akademik kebijakan sistem dan prosedur pengawasan
22.02.	Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan
22.03.	Dst...
23.	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
23.01.	Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik
23.02.	Dst....
24.	Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat
24.01.	Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat
24.02.	Unit Pengaduan Masyarakat dan Penanganan Kasus Pengaduan
25.	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah
25.01.	Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah dalam penyediaan pelayanan publik
25.02.	Fasilitasi/pembentukan perkuatan kerjasama antar daerah pada bidang ekonomi
25.03.	Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah di bidang hukum
25.04.	Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah dalam penyediaan sarana dan prasarana publik
25.05.	Dst...
26.	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
26.01.	Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan
26.02.	Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan
26.03.	Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan
26.04.	Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan
26.05.	Publikasi peraturan perundang-undangan
26.06.	kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru, lebih tinggi dan keserasian antar peraturan perundang-undangan daerah
26.07.	Penyusunan Produk Hukum Daerah
26.08.	Pertimbangan Hukum, Bantuan Hukum dan Penyelesaian Perkara Hukum
26.09.	Peningkatan Sistem Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (SJDIH)
27.	Program Penataan Daerah Otonomi Baru
27.01.	Fasilitasi penyiapan data dan informasi pendukung proses pemekaran daerah
27.02.	Fasilitasi percepatan penyerahan P3D dan daerah induk ke daerah pemekaran
27.03.	Fasilitasi percepatan penyelesaian tapal batas wilayah administrasi antar daerah
27.04.	Fasilitasi pematapan SOTK pemerintah daerah otonom baru
27.05.	Koordinasi Dan Fasilitasi Pelaksanaan Pembangunan Bidang Administrasi Pemerintahan
27.06.	Fasilitasi Dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa
27.07.	Penyusunan Kebijakan Bidang Pemerintahan Desa
28.	Program Kelitbangan/Inovasi Daerah
28.01.	Pengembangan dan Penguatan Inovasi dan teknologi
28.02.	Iptek Bagi Wilayah
28.03.	Pengkajian aktual Bidang Sosial dan Pemerintahan
28.04.	Pengkajian aktual Bidang Ekonomi dan Pembangunan
28.05.	Pengkajian aktual Bidang Pemerintahan dan Keuangan daerah
28.06.	Pengkajian aktual Bidang Ekonomi dan Pembangunan
28.07.	Pengkajian Aktual Bidang Sosial Budaya Dan Kemasyarakatan
28.08.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kelitbangan
28.09.	Fasilitasi Pengembangan Desa Inovatif Di Kabupaten Pacitan
28.10.	Fasilitasi Dewan Riset Daerah Kabupaten Pacitan

Parat Hierarki	
Sekda	✓
Asisten	✓
Kabag Hukum	✓


Parat Koordinasi	
SKPD/ Bagian Pemrakarsa	✓
SKPD/ Bagian Terkait:	
1.	
2.	
3.	


KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN
1	2
28.11.	Penelitian Bidang Sosial dan Pemerintahan
28.12.	Penelitian Bidang Ekonomi dan Pembangunan
28.13.	Penelitian Regrouping Sekolah Dasar Di Kabupaten Pacitan
28.14.	Penelitian Analisa Dampak Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan Terhadap Tingkal Konsumsi Ikan Anak Sekolah
28.15.	Penelitian Pengelolaan Keselamatan Wisata Alam Di Kabupaten Pacitan
28.16.	Penelitian Pengembangan Kawasan Pelabuhan Laut Di Kabupaten Pacitan
28.17.	Penelitian Pembangunan Jalur Lingkar Di Kabupaten Pacitan
28.18.	Penelitian Pengembangan Sistem Informasi Pariwisata Di Kabupaten Pacitan
28.19.	Penelitian Pemanfaatan Teknologi Pengolahan Biofarmaka Di Kabupaten Pacitan
28.20.	Penelitian Pengelolaan Belanja Pemerintah Daerah Terhadap Projob, Pro Poor, Poor Growth, Pro Environment Di Kabupaten Pacitan
28.21.	Penelitian Efektivitas Program Penanggulangan Kemiskinan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Kabupaten Pacitan
28.22.	Penelitian Pengalokasian Belanja Pembangunan Berdasarkan Isu Strategis Daerah
28.23.	Penelitian Pengembangan Komoditas Pertanian
30.	Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
30.01.	Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
30.02.	Peningkatan Kualitas Pengawas
30.03.	Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Bidang Pengawasan
31.	Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan
31.01.	Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan
32.	Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat
32.01.	Unit pengaduan masyarakat dan penanganan kasus pengaduan
33.	Program pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH bidang pemerintahan umum
33.01.	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan
33.02.	Penyusunan EKPPD
33.03.	Penyusunan LKPJ
33.04.	Penyusunan LPPD
33.05.	Pembinaan dan evaluasi kinerja kecamatan
34.	Program koordinasi, sinkronisasi, monitoring dan evaluasi bidang administrasi pembangunan
34.01.	Peningkatan profesionalisme dan pemahaman personil pelaksanaan pengadaan barang dan jasa
34.02.	Koordinasi pelaksanaan administrasi pembangunan
34.03.	Sosialisasi Pengadaan Barang / Jasa
34.04.	Pembinaan Jasa Konstruksi
34.05.	Pelaksanaan Sistem Monitoring Informasi TEPR (SISMONTEP)
34.06.	Peningkatan Evaluasi dan Peiaporan Pelaksanaan Pembangunan
34.07.	Monitoring dan Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan
34.08.	Penyusunan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan
34.09.	Pelaksanaan pemilihan barang dan jasa melalui Unit Layanan Pengadaan Barang Jasa (ULP)
35.	Program koordinasi, sinkronisasi, dan monitoring bidang administrasi perekonomian
35.01.	Peningkatan koordinasi dan pengendalian program raskin
35.02.	Koordinasi penyusunan kebijakan bidang perekonomian

Paraf Hierarki	
Sekda	
Asisten	
Kabag Hukum	


Paraf Koordinasi	
SKPD/ Bagian Pemrakarsa	
SKPD/ Bagian Terkait:	
1. _____	
2. _____	
3. _____	


KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN
1	2
35.03.	Penyampaian Ketentuan di Bidang Cukai Kepada Masyarakat Yang Bertujuan Agar Masyarakat Mengetahui, Memahami dan Mematuhi Ketentuan di Bidang Cukai
35.04.	Koordinasi pelaksanaan pembangunan Bidang Pangan, Pertanian dan Perikanan
35.05.	Pemantauan dan pengawasan penyaluran saprodi
35.06.	Koordinasi pelaksanaan pembangunan Bidang Koperasi, Usaha Mikro, Industri, Perdagangan
35.07.	Peningkatan stabilitas harga sembako
35.08.	Peningkatan koordinasi pemasaran produk daerah
35.09.	Koordinasi dan fasilitasi industri kecil pedesaan
35.10.	Koordinasi pelaksanaan pembangunan Bidang Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Penanaman Modal, BUMD dan Perbankan
35.11.	Koordinasi pelaksanaan pembangunan Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
36.	Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai
36.01.	Penyampaian informasi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai kepada masyarakat dan/atau pemangku kepentingan, serta pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai
37.	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
37.01.	Pelayanan Keprotokolan
37.02.	Penerbitan tabloid, majalah, leaflet dan bookleaf
37.03.	Penyebar Luasan Informasi Pembangunan Daerah
37.04.	Penyebarnyaan Informasi yang bersifat Penyuluhan Bagi Masyarakat
37.05.	Pengembangan website pacilankab.go.id
37.06.	Peningkatan Layanan Akses Teknologi Informasi bagi Masyarakat
37.07.	Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang dan Jasa melalui implementasi E-Procurement
37.08.	Pengelolaan Data Secara Elektronik
37.09.	Penyebarnyaan Informasi Melalui Siaran Radio
37.10.	Pengembangan e-gov
37.11.	Pengadaan alat studio
38.	Program Peningkatan Kerjasama Daerah
38.01.	Peningkatan Kerjasama dengan Dunia Usaha /Lembaga
38.02.	Peningkatan koordinasi kerjasama antar daerah
38.03.	Pengembangan wilayah perbatasan
38.04.	Koordinasi kerjasama pembangunan yang ditangani
39.	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
39.01.	Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan
39.02.	Pertimbangan Hukum, Bantuan Hukum dan Penyelesaian Perkara Hukum
39.03.	Peningkatan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (SJDIH)
39.04.	Penyusunan Produk Hukum Daerah
40.	Program Penataan Daerah Otonom
40.01.	Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pembangunan bidang administrasi pemerintahan
40.02.	Penamaan Rupabumi Wilayah
40.03.	Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa
40.04.	Penyusunan Kebijakan Bidang Pemerintahan Desa
40.05.	Penyusunan Raperda tentang Desa
40.06.	Penyusunan Raperbub tentang Desa
40.07.	Fasilitasi BPD
40.08.	Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Paraf Hierarki	
Sekda	
Asisten	
Kabag Hukum	




Paraf Koordinasi	
SKFD/ Bagian Pemrakarsa	
SKPD/ Bagian Terkait:	
1. _____	
2. _____	
3. _____	


KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN
1	2
41.	Program koordinasi, fasilitasi, dan monitoring bidang administrasi sumber daya alam
41.01.	Koordinasi pelaksanaan pembangunan Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
41.02.	Monev bidang SDA
41.03.	Sosialisasi pengelolaan sumber daya air
41.04.	Sosialisasi keistarian pesisir pantai
41.05.	Fasilitasi koordinasi pengelolaan wisata geopark
42.	Program koordinasi, fasilitasi, dan monitoring bidang kesejahteraan rakyat
42.01.	Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pembangunan bidang Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
42.02.	Koordinasi Pembinaan UKS/M
42.03.	Peningkatan Pemberdayaan Lansia
42.04.	Penanggulangan NAPZA dan PMS
42.05.	Pembinaan Drumband
42.06.	Fasilitasi Lembaga Sosial Masyarakat
42.07.	Fasilitasi Seni Budaya dan Peringatan Hari Besar Nasional
42.08.	Peningkatan koordinasi dan fasilitasi organisasi wanita
42.09.	Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pembangunan bidang Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
42.10.	Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pembangunan bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
42.11.	Peningkatan Koordinasi dan fasilitasi Organisasi Pemuda
42.12.	Peningkatan koord. dan fasilitasi pengembangan olahraga
43.	Program peningkatan kerukunan umat beragama
43.01.	Pembinaan mental spiritual
43.02.	Pembinaan dai dan khotib
43.03.	Peningkatan koordinasi bantuan keagamaan
43.04.	Pembinaan dan Pengiriman Peserta MTQ
43.05.	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan bidang kesejahteraan masyarakat
43.06.	Monitoring bidang sosial masyarakat
43.07.	Monitoring Bantuan hibah dan bansos
44.	Program Penataan Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik
44.01.	Peningkatan pelayanan publik
44.02.	Penyusunan Laporan Survey Kepuasan Masyarakat
44.03.	Monitoring dan Evaluasi Penerapan SOP
44.04.	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan SPM
45.	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kecamatan
45.01.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan
45.02.	Fasilitasi Pelestarian dan Aktualisasi Kebudayaan Daerah, Pemuda dan Olahraga
45.03.	Fasilitasi Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pembinaan PKK
45.04.	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan dan Monitoring Musrenbang Desa
45.05.	Fasilitasi pelayanan kesejahteraan sosial dan penanggulangan kemiskinan
45.06.	Fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa
45.07.	Fasilitasi penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
45.08.	Fasilitasi Pemungutan Pajak Daerah
45.09.	Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat
46.	Program Pendidikan Kedinasan

Paraf Hierarki	
Sekda	
Asisten	
Kabag Hukum	

Paraf Koordinasi	
SKPD/ Bagian Pemrakarsa	
SKPD/ Eagian Terkait:	
1. _____	
2. _____	
3. _____	

KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN
1	2
46.01.	Pendidikan dan pelatihan teknis
46.02.	Pendidikan penjenjangan struktural
46.03.	Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan
46.04.	Pembuatan buku juknis/juklak
46.05.	Pengembangan kurikulum pendidikan dan pelatihan
46.06.	Peningkatan keterampilan dan profesionalisme
47.	Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur
47.01.	Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah
47.02.	Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah
47.03.	Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS Daerah
47.04.	Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNS Daerah
47.05.	Diklat Teknis ASN
47.06.	Diklat Fungsioanal ASN
47.07.	Pengukuran Kompetensi Aparatur Sipil Negara
48.	Program pembinaan dan pengembangan aparatur
48.01.	Penyusunan rencana pembinaan karir PNS
48.02.	Seleksi penerimaan calon PNS
48.03.	Penempatan PNS
48.04.	Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS
48.05.	Pembangunan/pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah
48.06.	Penyusunan instrumen analisis jabatan PNS
48.07.	Seleksi dan penetapan PNS untuk tugas belajar
48.08.	Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi
48.09.	Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS
48.10.	Kajian sistem dan kualitas materi diklat PNS
48.11.	Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas
48.12.	Pemberian bantuan penyelenggaraan penerimaan Praja IPDN
48.13.	Penyelenggaraan diklat teknis, fungsional dan kepemimpinan
48.14.	Pengembangan diklat (Analisis Kebutuhan Diklat, Penyusunan Silabi, Penyusunan Modul, Penyusunan Pedoman Diklat)
48.15.	monitoring, evaluasi dan pelaporan
48.16.	Koordinasi penyelenggaraan diklat
48.17.	Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG)
48.18.	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
48.19.	Penempatan PNS
48.20.	Pembinaan PNS dan Non PNS
48.21.	Pengurusan Kesejahteraan Pegawai
48.22.	Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah
48.23.	Pemeliharaan dan Pengadaan Kartu Identitas Pegawai (KIP)
48.24.	Administrasi Kepegawaian
48.25.	Administrasi Pensiun
48.26.	Administrasi jabatan Fungsional
48.27.	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
48.28.	Pengelolaan LHKPN dan LHKASN
48.29.	Pemeliharaan Arsip PNS
48.30.	Pengukuran Kompetensi Aparatur Sipil Negara
48.31.	Penyusunan Formasi Pegawai
48.32.	Evaluasi Sasaran Kerja Pegawai (SKP)
48.33.	Penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS
49.	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah

Paraf Hierarki	
Sekda	
Asisten	
Kabag Urut	

Paraf Koordinasi	
SKPD/ Bagian Pemrakarsa	
SKPD/ Bagian Terkait:	
1. _____	
2. _____	
3. _____	

KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN
1	2
49.01.	Forum Komunikasi Pendayagunaan Aparatur Negara
49.02.	Monitoring, Evaluasi dan Analisis Keiembagaan Pemerintah Daerah
49.03.	Pengembangan Kapasitas dan Kapabilitas Unit Kerja Keiembagaan
50.	Program Peningkatan Pendapatan Daerah
50.01.	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah
50.02.	Penyelesaian Keberatan dan Restitusi Wajib Pajak dan Wajib Retribusi Daerah
50.03.	Operasional Penagihan Pajak dan Retribusi Daerah
50.04.	Evaluasi dan Rekonsiliasi Pendapatan Asli Daerah
50.05.	Penunjang Pelaksanaan Penertiban Bagi Hasil Pajak Daerah
50.06.	Peningkatan Pengelolaan Benda-benda Berharga/ Karcis Daerah
50.07.	Optimalisasi Penerimaan PBB P2
50.08.	Pengembangan Sistem Informasi PBB P2
50.09.	Pemutakhiran Data dan Pendampingan PBB P2
50.10.	Pemutakhiran Data Piutang Pajak dan Retribusi Daerah
50.11.	Penyusunan Pengelolaan Administrasi Pembukuan Pendapatan Daerah
51.	Program Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring Dan Evaluasi Bidang Administrasi Pemerintahan
51.01.	Koordinasi Dan Fasilitasi Pelaksanaan Pembangunan Bidang Administrasi Pemerintahan
51.02.	Fasilitasi Dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
51.03.	Penyusunan Kebijakan Bidang Pemerintahan Desa

BUPATI PACITAN




INDARTATO

Lampiran III : Peraturan Bupati Pacitan
 Nomor :
 Tanggal :

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
 SUSUNAN REKENING PENDAPATAN
 TAHUN ANGGARAN 2017

Kode	Uraian
1	2
4.	PENDAPATAN DAERAH
4.1.	Pendapatan Asli Daerah
4.1.1.	Hasil Pajak Daerah I)
4.1.1.01.	Pajak Hotel
4.1.1.01.01.	Hotel Bintang Lima Berlian
4.1.1.01.02.	Hotel Bintang Lima
4.1.1.01.03.	Hotel Bintang Empat
4.1.1.01.04.	Hotel Bintang Tiga
4.1.1.01.05.	Hotel Bintang Dua
4.1.1.01.06.	Hotel Bintang Satu
4.1.1.01.07.	Hotel Melati Tiga
4.1.1.01.08.	Hotel Melati Dua
4.1.1.01.09.	Hotel Melati Satu
4.1.1.01.10.	Motel
4.1.1.01.11.	Cottage
4.1.1.01.12.	Losmen/Rumah Penginapan/Pesanggraha/Hostel/Rumah Kos
4.1.1.01.13.	Wisma Pariwisata
4.1.1.01.14.	Gubuk Pariwisata
4.1.1.01.15.	Dst....
4.1.1.02.	Pajak Restoran
4.1.1.02.01.	Restoran
4.1.1.02.02.	Rumah Makan
4.1.1.02.03.	Café
4.1.1.02.04.	Kantin
4.1.1.02.05.	Katering
4.1.1.02.06.	Warung
4.1.1.02.07.	Bar
4.1.1.02.08.	Jasa Boga
4.1.1.02.09.	Dst ...
4.1.1.03.	Pajak Hiburan
4.1.1.03.01.	Tontonan Film/Bioskop
4.1.1.03.02.	Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana
4.1.1.03.03.	Kontes Kecantikan
4.1.1.03.04.	Kontes Binaraga
4.1.1.03.05.	Pameran
4.1.1.03.06.	Diskotik
4.1.1.03.07.	Karaoke
4.1.1.03.08.	Klub Malam

Paraf Hierarki	
Sekda	
Asisten	
Kabag Hukum	




Paraf Koordinasi	
SKPD/ Bagian Pemrakarsa	
SKPD/ Bagian Terkait:	
1. _____	
2. _____	
3. _____	


Kode	Uraian
1	2
4.1.1.03.09.	Sirkus/Akrobat/Sulap
4.1.1.03.10.	Permainan Biliar
4.1.1.03.11.	Permainan Golf
4.1.1.03.12.	Permainan Bowling
4.1.1.03.13.	Pacuan Kuda
4.1.1.03.14.	Balap Kendaraan Bermotor
4.1.1.03.15.	Permainan Ketangkasan
4.1.1.03.16.	Panti Pijat/Refleksi
4.1.1.03.17.	Mandi Dap/Spa
4.1.1.03.18.	Pusat Kebugaran
4.1.1.03.19.	Pertandingan Olahraga
4.1.1.03.20.	Dst.....
4.1.1.04.	Pajak Reklame
4.1.1.04.01.	Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron
4.1.1.04.02.	Reklame Kain
4.1.1.04.03.	Reklame Melekat/Stiker
4.1.1.04.04.	Reklame Selebaran
4.1.1.04.05.	Reklame Berjalan
4.1.1.04.06.	Reklame Udara
4.1.1.04.07.	Reklame Apung
4.1.1.04.08.	Reklame Suara
4.1.1.04.09.	Reklame Film/Slide
4.1.1.04.10.	Reklame Peragaan
4.1.1.05.	Pajak Penerangan Jalan
4.1.1.05.01.	Pajak Penerangan Jalan PLN
4.1.1.07.	Pajak Parkir
4.1.1.07.01.	Pajak Parkir
4.1.1.08.	Pajak Air Tanah
4.1.1.08.01.	Pajak Air Tanah.
4.1.1.09.	Pajak Sarang Burung Walet
4.1.1.09.01.	Pajak Sarang Burung Walet
4.1.1.11.	Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan
4.1.1.11.01.	Asbes
4.1.1.11.02.	Batu Tulis
4.1.1.11.03.	Batu Setengah Permata
4.1.1.11.04.	Batu Kapur
4.1.1.11.05.	Batu Apung
4.1.1.11.05.	Pajak Mineral bukan logam
4.1.1.11.07.	Pajak Batuan (non sirtu)
4.1.1.11.08.	Pajak Batuan (sirtu)
4.1.1.12.	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan
4.1.1.12.01.	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan
4.1.1.13.	Pajak Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
4.1.1.13.01.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Paraf Hierarki	
Sekda	<i>[Signature]</i>
Asisten	<i>[Signature]</i>
Kabag Hukum	<i>[Signature]</i>

Paraf Koordinasi	
SKPD/ Bagian Pemrakarsa	<i>[Signature]</i>
SKPD/ Bagian Terkait:	
1. _____	
2. _____	
3. _____	


Kode	Uraian
1	2
4.1.2.	Hasil Retribusi Daerah
4.1.2.01.	Retribusi Jasa Umum
4.1.2.01.01.	Retribusi Pelayanan Kesehatan
4.1.2.01.02.	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
4.1.2.01.03.	Retribusi Penggantian Biaya Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil
4.1.2.01.04.	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
4.1.2.01.05.	Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum
4.1.2.01.06.	Retribusi Pelayanan Pasar
4.1.2.01.07.	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
4.1.2.01.03.	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
4.1.2.01.09.	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
4.1.2.01.10.	Retribusi Pelayanan Pendidikan
4.1.2.01.11.	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
4.1.2.01.12.	Retribusi Pengolahan Limbah Cair
4.1.2.01.13.	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
4.1.2.01.14.	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
4.1.2.01.15.	dst
4.1.2.02.	Retribusi Jasa Usaha
4.1.2.02.01.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
4.1.2.02.02.	Retribusi Pasar Grosir / Pertokoan
4.1.2.02.03.	Retribusi Tempat Pelelangan
4.1.2.02.04.	Retribusi Terminal
4.1.2.02.05.	Retribusi Tempat Khusus Parkir
4.1.2.02.06.	Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa
4.1.2.02.08.	Retribusi Rumah Potong Hewan
4.1.2.02.09.	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan
4.1.2.02.10.	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
4.1.2.02.11.	Retribusi Penyeberangan di Air
4.1.2.02.13.	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
4.1.2.02.14.	Retribusi Jasa Pelayanan Kesehatan Hewan dan IB
4.1.2.02.15.	Retribusi Pengelolaan Sarang Burung Walet dan Sejenisnya
4.1.2.02.16.	Retribusi Pengelolaan Pengambilan Rumpul Laut
4.1.2.03.	Retribusi Perizinan Tertentu
4.1.2.03.01.	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
4.1.2.03.02.	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
4.1.2.03.03.	Retribusi Izin Gangguan/Keramaian
4.1.2.03.04.	Retribusi Izin Trayek
4.1.2.03.05.	Retribusi Izin Usaha Perikanan
4.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
4.1.3.01.	Bagian Laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD
4.1.3.01.01.	Bank Jatim
4.1.3.01.02.	Bank Perkreditan Rakyat
4.1.3.01.03.	Perusahaan Daerah Air Minum
4.1.3.01.04.	Perusahaan Daerah Batu Alam

Paraf Hierarki	
Sekda	
Asisten	
Kabag Hukum	




Paraf Koordinasi	
SKPD/ Bagian Pemrakarsa	
SKPD/ Bagian Terkait:	
1. _____	
2. _____	
3. _____	


Kode	Uraian
1	2
4.1.3.01.05.	UBIBAM
4.1.3.02.	Bagian Laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik
4.1.3.02.01.	BUMN
4.1.3.03.	Bagian Laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Swasta
4.1.3.03.01.	Perusahaan Patungan
4.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
4.1.4.01.	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan
4.1.4.01.01.	Pelepasan Hak Atas Tanah
4.1.4.01.02.	Penjualan Peralatan/Perlengkapan Kantor tidak terpakai
4.1.4.01.03.	Penjualan Mesin/alat-alat berat tidak terpakai
4.1.4.01.04.	Penjualan Rumah Jabatan/Rumah Dinas
4.1.4.01.05.	Penjualan Kendaraan Dinas roda dua
4.1.4.01.06.	Penjualan Kendaraan Dinas roda empat
4.1.4.01.07.	Penjualan Drum Bekas
4.1.4.01.08.	Penjualan Hasil Penebangan Pohon
4.1.4.01.09.	Penjualan Lampu Hias Bekas
4.1.4.01.10.	Penjualan bahan-bahan Bekas Bangunan
4.1.4.01.11.	Penjualan Perlengkapan Lalu Lintas
4.1.4.01.12.	Penjualan Obat-obatan dan hasil farmasi
4.1.4.01.13.	Penjualan hasil pertanian
4.1.4.01.14.	Penjualan hasil kehutanan
4.1.4.01.15.	Penjualan hasil perkebunan
4.1.4.01.16.	Penjualan hasil peternakan
4.1.4.01.17.	Penjualan hasil perikanan
4.1.4.01.18.	Penjualan hasil sitaan
4.1.4.01.19.	dsL.....
4.1.4.02.	Penerimaan Jasa Giro
4.1.4.02.01.	Jasa Giro Kas Daerah
4.1.4.02.02.	Jasa Giro Pemegang Kas
4.1.4.02.03.	Jasa Giro Dana Cadangan
4.1.4.03.	Pendapatan Bunga Deposito
4.1.4.03.01.	Rekening Deposito pada BPD
4.1.4.03.02.	Rekening Deposito Pada BRI
4.1.4.03.03.	Rekening Deposito Pada BNI
4.1.4.03.04.	Pendapatan Bunga Piutang
4.1.4.03.05.	Rekening Deposito pada Bank Mandiri
4.1.4.04.	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
4.1.4.04.01.	Kerugian Uang
4.1.4.04.02.	Kerugian Barang
4.1.4.05.	Komisi, Potongan dan Selisih Nilai Tukar Rupiah
4.1.4.05.01.	Penerimaan Komisi dari penempatan Kas Daerah
4.1.4.05.02.	Penerimaan Potongan dari
4.1.4.05.03.	Penerimaan Keuntungan Selisih Nilai Tukar Rupiah dari
4.1.4.05.04.	Dst.....

Paraf Hierarki	
Sekda	
Asisten	
Kabag Hukum	




Paraf Koordinasi	
SK.PD/ Bagian Pemrakarsa	
SK.PD/ Bagian Terkait:	
1. _____	
2. _____	
3. _____	


Kode	Uraian
1	2
4.1.4.06.	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
4.1.4.06.01.	Bidang Pendidikan
4.1.4.06.02.	Bidang Kesehatan
4.1.4.06.03.	Bidang Pekerjaan Umum
4.1.4.06.04.	Bidang Perumahan Rakyat
4.1.4.06.05.	Bidang Penataan Ruang
4.1.4.06.06.	Bidang Perencanaan Pembangunan
4.1.4.06.07.	Bidang Perhubungan
4.1.4.06.09.	Bidang Pertanahan
4.1.4.06.10.	Dst
4.1.4.07.	Pendapatan Denda Pajak 1)
4.1.4.07.01.	Pendapatan Denda Pajak Hotel
4.1.4.07.02.	Pendapatan Denda Pajak Restoran
4.1.4.07.03.	Pendapatan Denda Pajak Hiburan
4.1.4.07.04.	Pendapatan Denda Pajak Reklame
4.1.4.07.05.	Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan
4.1.4.07.07.	Pendapatan Denda Pajak Parkir
4.1.4.07.08.	Pendapatan Denda Pajak Air Bawah Tanah
4.1.4.07.09.	Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet
4.1.4.07.10.	Pendapatan Denda Pajak Lingkungan
4.1.4.07.11.	Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
4.1.4.07.12.	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan
4.1.4.07.13.	Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
4.1.4.08.	Pendapatan Denda Retribusi 1)
4.1.4.08.01.	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum
4.1.4.08.02.	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha
4.1.4.08.03.	Pendapatan Denda Retribusi Perizinan tertentu
4.1.4.08.04.	Dst.....
4.1.4.09.	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan
4.1.4.09.01.	Hasil Eksekusi Jaminan atas Pelaksanaan Pekerjaan
4.1.4.09.02.	Hasil Eksekusi Jaminan atas Pembongkaran Reklame
4.1.4.09.03.	Hasil Eksekusi Jaminan atas KTP Musiman
4.1.4.09.04.	Dst.....
4.1.4.10.	Pendapatan dari Pengembalian
4.1.4.10.01.	Pendapatan dari Pengembalian Pajak Penghasilan Pasal 21
4.1.4.10.02.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan pembayaran asuransi kesehatan
4.1.4.10.03.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan pembayaran Gaji dan Tunjangan
4.1.4.10.04.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan pembayaran Perjalanan Dinas
4.1.4.10.05.	Pendapatan dari Pengembalian dari Uang Muka
4.1.4.10.06.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja non gaji dan
4.1.4.11.	Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum
4.1.4.11.01.	Fasilitas Sosial
4.1.4.11.02.	Fasilitas Umum
4.1.4.11.03.	Dst.....

Paraf Hierarki	
Sekda	
Asisten	
Kabag Umum	

Paraf Koordinasi	
SKPD/ Bagian Pemrakarsa	
SKPD/ Bagian Terkait:	
1. _____	
2. _____	
3. _____	

Kode	Uraian
1	2
4.1.4.12.	Pendapatan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
4.1.4.12.01.	Uang Pendaftaran/Ujian Masuk
4.1.4.12.02.	Uang Sekolah/pendidikan dan pelatihan
4.1.4.12.03.	Uang Ujian kenaikan tingkat/kelas
4.1.4.12.04.	Dst.....
4.1.4.13.	Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Rumah
4.1.4.13.01.	Angsuran/Cicilan Penjualan Rumah Dinas Daerah Golongan III
4.1.4.13.02.	Angsuran/Cicilan Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas
4.1.4.13.03.	Angsuran/Cicilan Ganti Kerugian Barang Milik Daerah
4.1.4.14.	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir
4.1.4.14.01.	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir dari Kelompok Masyarakat
4.1.4.15.	Pendapatan dari BLUD
4.1.4.15.01.	Pedapatan Dari BLUD
4.1.4.16.	Pendapatan Lain-lain
4.1.4.16.01.	Pendapatan Lain-Lain
4.1.4.16.02.	Pendapatan dari hasil perjanjian kerjasama
4.1.4.17.	Pendapatan Dana Kapitasi JKN FKTP
4.1.4.17.01.	Pendapatan Dana kapitasi JKN FKTP Puskesmas Pacitan
4.1.4.17.02.	Pendapatan Dana kapitasi JKN FKTP Puskesmas Tangungsari
4.1.4.17.03.	Pendapatan Dana kapitasi JKN FKTP Puskesmas Kebonagung
4.1.4.17.04.	Pendapatan Dana kapitasi JKN FKTP Puskesmas Ketro Wonojoyo
4.1.4.17.05.	Pendapatan Dana kapitasi JKN FKTP Puskesmas Arjosari
4.1.4.17.06.	Pendapatan Dana kapitasi JKN FKTP Puskesmas Kedungbendo
4.1.4.17.07.	Pendapatan Dana kapitasi JKN FKTP Puskesmas Punung
4.1.4.17.08.	Pendapatan Dana kapitasi JKN FKTP Puskesmas Gondosari
4.1.4.17.09.	Pendapatan Dana kapitasi JKN FKTP Puskesmas Pringkuwu
4.1.4.17.10.	Pendapatan Dana kapitasi JKN FKTP Puskesmas Candi
4.1.4.17.11.	Pendapatan Dana kapitasi JKN FKTP Puskesmas Donorojo
4.1.4.17.12.	Pendapatan Dana kapitasi JKN FKTP Puskesmas Kalak
4.1.4.17.13.	Pendapatan Dana kapitasi JKN FKTP Puskesmas Ngadirojo
4.1.4.17.14.	Pendapatan Dana kapitasi JKN FKTP Puskesmas Wonokarto
4.1.4.17.15.	Pendapatan Dana kapitasi JKN FKTP Puskesmas Tulakan
4.1.4.17.16.	Pendapatan Dana kapitasi JKN FKTP Puskesmas Bubakan
4.1.4.17.17.	Pendapatan Dana kapitasi JKN FKTP Puskesmas Sudimoro
4.1.4.17.18.	Pendapatan Dana kapitasi JKN FKTP Puskesmas Sukorejo
4.1.4.17.19.	Pendapatan Dana kapitasi JKN FKTP Puskesmas Tegalombo
4.1.4.17.20.	Pendapatan Dana kapitasi JKN FKTP Puskesmas Gemaharjo
4.1.4.17.21.	Pendapatan Dana kapitasi JKN FKTP Puskesmas Nawangan
4.1.4.17.22.	Pendapatan Dana kapitasi JKN FKTP Puskesmas Pakisbaru
4.1.4.17.23.	Pendapatan Dana kapitasi JKN FKTP Puskesmas Bandar
4.1.4.17.24.	Pendapatan Dana kapitasi JKN FKTP Puskesmas Jeruk
4.2.	Dana Perimbangan
4.2.1.	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
4.2.1.01.	Bagi Hasil Pajak

Paraf Hierarki	
Sekda	
Asisten	
Kabag Subsum	

Paraf Koordinasi	
SKPD/ Bagian Pemrakarsa	
SKPD/ Bagian Terkait:	
1. _____	
2. _____	
3. _____	

Kode	Uraian
1	2
4.2.1.01.01.	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan
4.2.1.01.02.	Bagi Hasil dari Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
4.2.1.01.03.	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 wajib pajak orang
4.2.1.01.04.	Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau
4.2.1.02.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam
4.2.1.02.01.	Bagi Hasil dari Iuran Hak Pengusahaan Hutan
4.2.1.02.02.	Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan
4.2.1.02.03.	Bagi Hasil dari Dana Reboisasi
4.2.1.02.04.	Bagi Hasil dari Iuran Tetap (Land-rent)
4.2.1.02.05.	Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti)
4.2.1.02.06.	Bagi Hasil dari Pungutan Pengusahaan Perikanan
4.2.1.02.07.	Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan
4.2.1.02.08.	Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi
4.2.1.02.09.	Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi
4.2.1.02.10.	Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi
4.2.1.02.11.	Dst.....
4.2.2.	Dana Alokasi Umum
4.2.2.01.	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.2.2.01.01.	Dana Alokasi Umum
4.2.3.	Dana Alokasi Khusus
4.2.3.01.	Dana alokasi khusus Fisik
4.2.3.01.01.	Dana alokasi khusus Reguler
4.2.3.01.02.	Dana Alokasi Khusus Penugasan
4.2.3.02.	Dana Alokasi Khusus Non Fisik
4.2.3.02.02.	Dana Tunjangan Profesi Guru PNS Daerah (TPGPNSD)
4.2.3.02.03.	Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD (TAMSIL PNSD)
4.2.3.02.05.	Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD (BOP PAUD)
4.2.3.02.06.	Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan Bantuan Operasional Keluarga
4.2.3.02.07.	Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Dan
4.2.3.02.08.	Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan
4.3.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
4.3.1.	Pendapatan Hibah
4.3.1.01.	Pendapatan Hibah dari Pemerintah
4.3.1.01.01.	Pemerintah
4.3.1.02.	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah lainnya
4.3.1.02.01.	Pemerintah Daerah
4.3.1.02.02.	Dst.....
4.3.1.03.	Pendapatan Hibah dari badan/lembaga/organisasi swasta dalam negeri
4.3.1.03.01.	PT. DWI KARYA BANGKIT SEJAHTERA
4.3.1.03.02.	Dst.....
4.3.1.04.	Pendapatan Hibah dari kelompok masyarakat/perorangan
4.3.1.04.01.	Kelompok masyarakat/perorangan .
4.3.1.04.02.	Dst.....
4.3.1.05.	Pendapatan Hibah dari Luar Negeri

Paraf Hierarki	
Sekda	<i>[Signature]</i>
Asisten	<i>[Signature]</i>
Kabag	<i>[Signature]</i>
Umum	

Paraf Koordinasi	
SKPD/ Bagian Pemrakarsa	<i>[Signature]</i>
SKPD/ Bagian Terkait:	
1. _____	
2. _____	
3. _____	

Kode	Uraian
1	2
4.3.1.05.01.	Pendapatan Hibah dari Bilateral
4.3.1.05.02.	Pendapatan Hibah dari Multilateral
4.3.1.05.03.	Pendapatan Hibah dari Donor lainnya
4.3.1.05.04.	Dst.....
4.3.2.	Dana Darurat
4.3.2.01.	Penanggulangan Korban/Kerusakan Akibat Bencana Alam
4.3.2.01.01.	Korban/Kerusakan Akibat Bencana Alam
4.3.2.01.02.	Dst.....
4.3.3.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi
4.3.3.01.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi
4.3.3.01.01.	Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor
4.3.3.01.03.	Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
4.3.3.01.05.	Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
4.3.3.01.06.	Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah
4.3.3.01.07.	Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan
4.3.3.01.08.	Bagi Hasil Dari Pajak Rokok
4.3.3.01.09.	Bagi Hasil Tera Ulang Alat Ukur Takar Timbangan
4.3.3.01.10.	Penerimaan Sumbangan Pihak III (SP3)
4.3.3.02.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi 3)
4.3.3.02.01.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi .
4.3.3.02.02.	Dst.....
4.3.3.03.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Kabupaten 3)
4.3.3.03.01.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Kabupaten .
4.3.3.03.02.	Dst.....
4.3.3.04.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Kota 3)
4.3.3.04.01.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Kota .
4.3.3.04.02.	Dst.....
4.3.4.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
4.3.4.01.	Dana Penyesuaian
4.3.4.01.01.	Dana BOS
4.3.4.01.02.	Dana Penyesuaian.
4.3.4.02.	Dana Otonomi Khusus
4.3.4.02.01.	Dana Otonomi Khusus .
4.3.4.02.02.	Dana Desa
4.3.5.	Bantuan keuangan dari propinsi atau pemerintah daerah lainnya
4.3.5.01.	Bantuan keuangan dari provinsi
4.3.5.01.01.	Bantuan keuangan dari Provinsi.
4.3.5.01.02.	Dst.....
4.3.5.02.	Bantuan keuangan dari kabupaten
4.3.5.02.01.	Bantuan keuangan dari Kabupaten.....
4.3.5.02.02.	Dst.....
4.3.5.03.	Bantuan keuangan dari kota
4.3.5.03.01.	Bantuan keuangan dari Kota
4.3.5.03.02.	Dst.....

Paraf Hierarchy	
Sekda	<input checked="" type="checkbox"/>
Asisten	<input checked="" type="checkbox"/>
Kabag Hukum	<input checked="" type="checkbox"/>




Paraf Koordinasi	
SKPD/ Bagian Pemrakarsa	<input checked="" type="checkbox"/>
SKPD/ Bagian Terkait:	
1. _____	
2. _____	
3. _____	


Kode	Uraian
1	2
8.	PENDAPATAN - LO
8.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO
8.1.1.	Pendapatan Pajak Daerah - LO
8.1.1.01.	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) - LO
8.1.1.01.01.	PKB - Mobil Penumpang - Sedan - LO
8.1.1.01.02.	PKB - Mobil Penumpang - Jeep - LO
8.1.1.01.03.	PKB - Mobil Penumpang - Minibus - LO
8.1.1.01.04.	PKB - Mobil Bus - Microbus - LO
8.1.1.01.05.	PKB - Mobil Bus - Bus - LO
8.1.1.01.06.	PKB - Mobil Barang/ Beban - Pick Up - LO
8.1.1.01.07.	PKB - Mobil Barang/ Beban - Light Truck - LO
8.1.1.01.08.	PKB - Mobil Barang/ Beban - Truck - LO
8.1.1.01.09.	PKB - Sepeda Motor - Sepeda Motor Roda 2 - LO
8.1.1.01.10.	PKB - Sepeda Motor - Sepeda Motor Roda 3 - LO
8.1.1.01.11.	PKB - Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air - LO
8.1.1.01.12.	Dst
8.1.1.02.	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) - LO
8.1.1.02.01.	BBNKB - Mobil Penumpang - Sedan - LO
8.1.1.02.02.	BBNKB - Mobil Penumpang - Jeep - LO
8.1.1.02.03.	BBNKB - Mobil Penumpang - Minibus - LO
8.1.1.02.04.	BBNKB - Mobil Bus - Microbus - LO
8.1.1.02.05.	BBNKB - Mobil Bus - Bus - LO
8.1.1.02.06.	BBNKB - Mobil Barang/ Beban - Pick Up - LO
8.1.1.02.07.	BBNKB - Mobil Barang/ Beban - Light Truck - LO
8.1.1.02.08.	BBNKB - Mobil Barang/ Beban - Truck - LO
8.1.1.02.09.	BBNKB - Sepeda Motor - Sepeda Motor Roda 2 - LO
8.1.1.02.10.	BBNKB - Sepeda Motor - Sepeda Motor Roda 3 - LO
8.1.1.02.11.	BBNKB - Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air - LO
8.1.1.02.12.	DsL.....
8.1.1.03.	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor - LO
8.1.1.03.01.	Pajak Bahan Bakar Premium - LO
8.1.1.03.02.	Pajak Bahan Bakar Pertamina - LO
8.1.1.03.03.	Pajak Bahan Bakar Pertamina Plus - LO
8.1.1.03.04.	Pajak Bahan Bakar Solar - LO
8.1.1.03.05.	Pajak Bahan Bakar Gas - LO
8.1.1.03.06.	Dst
8.1.1.04.	Pajak Air Permukaan - LO
8.1.1.04.01.	Pajak Air Permukaan - LO
8.1.1.05.	Pajak Rokok - LO
8.1.1.05.01.	Pajak Rokok - LO
8.1.1.06.	Pajak Hotel - LO
8.1.1.06.01.	Hotel - LO
8.1.1.06.02.	Motel - LO
8.1.1.06.03.	Losmen - LO

Parat Hierarki	
Sekda	<input checked="" type="checkbox"/>
Asisten	<input checked="" type="checkbox"/>
Kabag Kotum	<input checked="" type="checkbox"/>

Parat Koordinasi	
SKPD/ Bagian Pemrakarsa	<input checked="" type="checkbox"/>
SKPD/ Bagian Terkait:	
1. _____	
2. _____	
3. _____	


Kode	Uraian
1	2
8.1.1.06.04.	Gubuk Pariwisata - LO
8.1.1.06.05.	Wisma Pariwisata - LO
8.1.1.06.06.	Pesanggrahan - LO
8.1.1.06.07.	Rumah Penginapan dan sejenisnya - LO
8.1.1.06.08.	Rumah Kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh) - LO
8.1.1.06.09.	Cottage - LO
8.1.1.07.	Pajak Restoran - LO
8.1.1.07.01.	Restoran - LO
8.1.1.07.02.	Rumah Makan - LO
8.1.1.07.03.	Kafetaria - LO
8.1.1.07.04.	Kantin - LO
8.1.1.07.05.	Warung - LO
8.1.1.07.06.	Bar - LO
8.1.1.07.07.	Jasa Boga/ Katering - LO
8.1.1.07.08.	DsL....
8.1.1.08.	Pajak Hiburan - LO
8.1.1.08.01.	Tontonan Film/Bioskop - LO
8.1.1.08.02.	Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana - LO
8.1.1.08.03.	Kontes Kecantikan, Binaraga, dan sejenisnya - LO
8.1.1.08.04.	Pameran - LO
8.1.1.08.05.	Diskotik, Karaoke, Klub Malam dan sejenisnya - LO
8.1.1.08.06.	Sirkus/Akrobat/Sulap - LO
8.1.1.08.07.	Permainan Bilyar, Golf, Bowling - LO
8.1.1.08.08.	Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, Permainan Ketangkasan - LO
8.1.1.08.09.	Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/ Spa dan Pusat Kebugaran (fitnes center) - LO
8.1.1.08.10.	Pertandingan Olahraga - LO
8.1.1.08.11.	Dst....
8.1.1.09.	Pajak Reklame - LO
8.1.1.09.01.	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron - LO
8.1.1.09.02.	Pajak Reklame Kain - LO
8.1.1.09.03.	Pajak Reklame Melekat/Stiker - LO
8.1.1.09.04.	Pajak Reklame Selebaran - LO
8.1.1.09.05.	Pajak Reklame Berjalan - LO
8.1.1.09.06.	Pajak Reklame Udara - LO
8.1.1.09.07.	Pajak Reklame Apung - LO
8.1.1.09.08.	Pajak Reklame Suara - LO
8.1.1.09.09.	Pajak Reklame Film/Slide - LO
8.1.1.09.10.	Pajak Reklame Peragaan - LO
8.1.1.09.11.	DsL....
8.1.1.10.	Pajak Penerangan Jalan - LO
8.1.1.10.01.	Pajak Penerangan Jalan dihasilkan sendiri - LO
8.1.1.10.02.	Pajak Penerangan Jalan sumber lain - LO
8.1.1.11.	Pajak Parkir - LO
8.1.1.11.01.	Pajak Parkir - LO

Paraf Hierarki	
Sekda	
Asisten	
Kabag Hukum	

Paraf Koordinasi	
SKPD/ Bagian Pemrakarsa	
SKPD/ Bagian Terkait:	
1. _____	
2. _____	
3. _____	

Kode	Uraian
1	2
8.1.1.12.	Pajak Air Tanah - LO
8.1.1.12.01.	Pajak Air Tanah - LO
8.1.1.13.	Pajak Sarang Burung Walet - LO
8.1.1.13.01.	Pajak Sarang Burung Walet - LO
8.1.1.14.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LO
8.1.1.14.01.	Asbes - LO
8.1.1.14.02.	Batu Tulis - LO
8.1.1.14.03.	Batu setengah permata - LO
8.1.1.14.04.	Batu Kapur - LO
8.1.1.14.05.	Batu Apung - LO
8.1.1.14.06.	Batu Permata - LO
8.1.1.14.07.	Bentonit - LO
8.1.1.14.08.	Dolomit - LO
8.1.1.14.09.	Feldspar - LO
8.1.1.14.10.	Garam Batu (Halite) - LO
8.1.1.14.11.	Grafit - LO
8.1.1.14.12.	Granit/Andesit - LO
8.1.1.14.13.	Gips - LO
8.1.1.14.14.	Kalsit - LO
8.1.1.14.15.	Kaolin - LO
8.1.1.14.16.	Leusit - LO
8.1.1.14.17.	Magnesit - LO
8.1.1.14.18.	Mika - LO
8.1.1.14.19.	Marmer - LO
8.1.1.14.20.	Nitrat - LO
8.1.1.14.21.	Opsidien - LO
8.1.1.14.22.	Oker - LO
8.1.1.14.23.	Pasir dan kerikil - LO
8.1.1.14.24.	Pasir Kuarsa - LO
8.1.1.14.25.	Perlit - LO
8.1.1.14.26.	Phospat - LO
8.1.1.14.27.	Talk - LO
8.1.1.14.28.	Tanah Serap (Fullers earth) - LO
8.1.1.14.29.	Tanah Diatome - LO
8.1.1.14.30.	Tanah Liat - LO
8.1.1.14.31.	Tawas (Alum) - LO
8.1.1.14.32.	Tras - LO
8.1.1.14.33.	Yarosif - LO
8.1.1.14.34.	Zeolit - LO
8.1.1.14.35.	Basal - LO
8.1.1.14.36.	Trakit - LO
8.1.1.14.37.	Mineral bukan logam dan lainnya - LO
8.1.1.15.	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan - LO
8.1.1.15.01.	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan - LO

Paraf Hierarki	
Sekda	
Asisten	
Kabag Hukum	




Paraf Koordinasi	
SKPD/ Bagian Pemrakarsa	
SKPD/ Bagian Terkait:	
1. _____	
2. _____	
3. _____	


Kode	Uraian
1	2
8.1.1.16.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) - LO
8.1.1.16.01.	BPHTB - Pemindahan Hak - LO
8.1.1.16.02.	BPHTB - Pemberian Hak Baru - LO
8.1.2.	Pendapatan Retribusi Daerah - LO
8.1.2.01.	Retribusi Pelayanan Kesehatan - LO
8.1.2.01.01.	Pelayanan kesehatan di Puskesmas - LO
8.1.2.01.02.	Puskesmas keliling - LO
8.1.2.01.03.	Puskesmas pembantu - LO
8.1.2.01.04.	Balai Pengobatan - LO
8.1.2.01.05.	Rumah Sakit Umum Daerah - LO
8.1.2.01.06.	Tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola
8.1.2.01.07.	Retribusi Pelayanan Kesehatan - LO.
8.1.2.02.	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan - LO
8.1.2.02.01.	Pengambilan/Pengumpulan Sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan
8.1.2.02.02.	Pengangkutan Sampah dari Sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara
8.1.2.02.03.	Penyediaan Lokasi Pembuangan/Pemusnahan Akhir Sampah - LO
8.1.2.02.04.	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan - LO.
8.1.2.03.	Retribusi Penggantian Blaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan
8.1.2.03.01.	Kartu Tanda Penduduk - LO
8.1.2.03.02.	Kartu Keterangan Bertempat Tinggal - LO
8.1.2.03.03.	Kartu Identitas Kerja - LO
8.1.2.03.04.	Kartu Penduduk Sementara - LO
8.1.2.03.05.	Kartu Identitas Penduduk Musiman - LO
8.1.2.03.06.	Kartu Keluarga - LO
8.1.2.03.07.	Akta Catatan Sipil - LO
8.1.2.03.08.	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil -
8.1.2.04.	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat - LO
8.1.2.04.01.	Peayanan Penguburan/Pemakaman - LO
8.1.2.04.02.	Sewa Tempat Pemakaman atau Pembakaran/Pengabuan Mayat - LO
8.1.2.04.03.	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat - LO .
8.1.2.05.	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LO
8.1.2.05.01.	Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LO
8.1.2.06.	Retribusi Pelayanan Pasar - LO
8.1.2.06.01.	Peiataran - LO
8.1.2.06.02.	Los - LO
8.1.2.06.03.	Kios - LO
8.1.2.06.04.	Retribusi Pelayanan Pasar - LO.
8.1.2.07.	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor - LO
8.1.2.07.01.	Retribusi PKB - Mobil Penumpang - Sedan - LO
8.1.2.07.02.	Retribusi PKB - Mobil Penumpang - Jeep - LO
8.1.2.07.03.	Retribusi PKB - Mobil Penumpang - Minibus - LO
8.1.2.07.04.	Retribusi PKB - Mobil Bus - Microbus - LO
8.1.2.07.05.	Retribusi PKB - Mobil Bus - Bus - LO
8.1.2.07.06.	Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Pick Up - LO

Paraf Hierarki	
Sekda	<input checked="" type="checkbox"/>
Asisten	<input checked="" type="checkbox"/>
Kabag Hukum	<input checked="" type="checkbox"/>




Paraf Koordinasi	
SKPD/ Bagian Pemrakarsa	<input checked="" type="checkbox"/>
SKPD/ Bagian Terkait:	
1. _____	
2. _____	
3. _____	


Kode	Uraian
1	2
8.1.2.07.07.	Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Light Truck - LO
8.1.2.07.08.	Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Truck - LO
8.1.2.07.09.	Retribusi PKB - Sepeda Motor - Sepeda Motor Roda 2 - LO
8.1.2.07.10.	Retribusi PKB - Sepeda Motor - Sepeda Motor Roda 3 - LO
8.1.2.07.11.	Retribusi PKB - Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air - LO
8.1.2.07.12.	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor - LO.
8.1.2.08.	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran - LO
8.1.2.08.01.	Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran - LO
8.1.2.08.02.	Alat Penanggulangan Kebakaran - LO
8.1.2.08.03.	Alat Penyelamatan Jiwa - LO
8.1.2.08.04.	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran Lainnya-LO
8.1.2.09.	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta - LO
8.1.2.09.01.	Penyediaan Peta Dasar (Garis) - LO
8.1.2.09.02.	Penyediaan Peta Foto - LO
8.1.2.09.03.	Penyediaan Peta Digital - LO
8.1.2.09.04.	Penyediaan Peta Tematik - LO
8.1.2.09.05.	Penyediaan Peta Teknis (Struktur) - LO
8.1.2.09.08.	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta - LO.
8.1.2.10.	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus - LO
8.1.2.10.01.	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus - LO.
8.1.2.11.	Retribusi Pengolahan Limbah Cair - LO
8.1.2.11.01.	Rumah Tangga - LO
8.1.2.11.02.	Perkantoran - LO
8.1.2.11.03.	Industri - LO
8.1.2.11.04.	Retribusi Pengolahan Limbah Cair - LO.
8.1.2.12.	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang - LO
8.1.2.12.01.	Pengujian Alat-alat ukur, takar, timbang, dan periengkapannya - LO
8.1.2.12.02.	Pengujian dalam keadaan terbungkus - LO
8.1.2.12.03.	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang - LO.
8.1.2.13.	Retribusi Pelayanan Pendidikan - LO
8.1.2.13.01.	Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan - LO
8.1.2.13.02.	Pelatihan Teknis - LO
8.1.2.13.03.	Retribusi Pelayanan Pendidikan - LO.
8.1.2.14.	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi - LO
8.1.2.14.01.	Pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi - LO
8.1.2.14.02.	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi - LO.
8.1.2.15.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LO
8.1.2.15.01.	Penyewaan Tanah dan Bangunan - LO
8.1.2.15.02.	Laboratorium - LO
8.1.2.15.03.	Ruangan -LO
8.1.2.15.04.	Kendaraan Bermotor - LO
8.1.2.15.05.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LO.
8.1.2.16.	Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan - LO
8.1.2.16.01.	Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir berbagai Jenis Barang - LO

Paraf Hierarki	
Sekda	
Asisten	
Kabag	

Paraf Koordinasi	
SKPD/ Bagian Pemrakarsa	
SKPD/ Bagian Terkait:	
1. _____	
2. _____	
3. _____	

Kode	Uraian
1	2
8.1.2.16.02.	Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan - LO
8.1.2.16.03.	Fasilitas Pasar atau Pertokoan yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah
8.1.2.16.04.	Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan - LO.
8.1.2.17.	Retribusi Tempat Pelelangan - LO
8.1.2.17.01.	Pelelangan Ikan - LO
8.1.2.17.02.	pelelangan Temak - LO
8.1.2.17.03.	Pelelangan Hasil Bumi - LO
8.1.2.17.04.	Pelelangan Hasil Hutan - LO
8.1.2.17.05.	Jasa Pelelangan serta Fasilitas Lainnya yang disediakan di Tempat Pelelangan -
8.1.2.17.06.	Retribusi Tempat Pelelangan - LO.
8.1.2.18.	Retribusi Terminal - LO
8.1.2.18.01.	Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bis
8.1.2.18.02.	Tempat Kegiatan Usaha - LO
8.1.2.18.03.	Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal - LO
8.1.2.18.04.	Retribusi Terminal - LO.
8.1.2.19.	Retribusi Tempat Khusus Parkir - LO
8.1.2.19.01.	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir - LO
8.1.2.20.	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa - LO
8.1.2.20.01.	Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila - LO
8.1.2.21.	Retribusi Rumah Potong Hewan - LO
8.1.2.21.01.	Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Hewan sebelum dipotong - LO
8.1.2.21.02.	Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Hewan sesudah dipotong - LO
8.1.2.21.03.	Retribusi Rumah Potong Hewan - LO.
8.1.2.22.	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan - LO
8.1.2.22.01.	Retribusi Pelayanan Jasa ke Pelabuhan - LO
8.1.2.23.	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga- LO
8.1.2.23.01.	Pelayanan Tempat Rekreasi - LO
8.1.2.23.02.	Pelayanan Tempat Pariwisata - LO
8.1.2.23.03.	Pelayanan Tempat olahraga - LO
8.1.2.23.04.	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga- LO .
8.1.2.24.	Retribusi Penyebrangan Air - LO
8.1.2.24.01.	Pelayanan Penyebrangan Orang - LO
8.1.2.24.02.	Pelayanan Penyebrangan Barang - LO
8.1.2.24.03.	Retribusi Penyebrangan Air - LO.
8.1.2.25.	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah - LO
8.1.2.25.01.	Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah - LO.
8.1.2.26.	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan - LO
8.1.2.26.01.	Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan - LO
8.1.2.27.	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol - LO
8.1.2.27.01.	Retribusi Pemberian Izin untuk Tempat Penjualan Minuman Beralkohol - LO
8.1.2.28.	Retribusi Izin Gangguan - LO
8.1.2.28.01.	Pemberian Izin Gangguan tempat Usaha/Kegiatan kepada Orang Pribadi - LO
8.1.2.28.02.	Pemberian Izin Gangguan tempat Usaha/Kegiatan kepada Badan - LO
8.1.2.28.03.	Retribusi izin Gangguan - LO.

Parat Hierarki	
Sekda	
Asisten	
Kabag Hukum	

Parat Koordinasi	
SKPD/ Bagian Pemrakarsa	
SKPD/ Bagian Terkait:	
1. _____	
2. _____	
3. _____	

Kode	Uraian
1	2
8.1.2.29.	Retribusi Izin Trayek - LO
8.1.2.29.01.	Pemberian Izin Trayek kepada Orang Pribadi - LO
8.1.2.29.02.	Pemberian Izin Trayek kepada Badan - LO
8.1.2.29.03.	Retribusi Izin Trayek - LO.
8.1.2.30.	Retribusi Izin Perikanan - LO
8.1.2.30.01.	Pemberian Izin usaha Perikanan kepada Orang Pribadi - LO
8.1.2.30.02.	Pemberian Izin usaha Perikanan kepada Badan - LO
8.1.2.30.03.	Retribusi Izin Perikanan - LO.
8.1.2.31.	Retribusi Pengendalian Lalu Lintas - LO
8.1.2.31.01.	Penggunaan ruas jalan tertentu - LO
8.1.2.31.02.	Penggunaan koridor tertentu -LO
8.1.2.31.03.	Penggunaan kawasan tertentu pada waktu tertentu oleh kendaraan bermotor
8.1.2.32.	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) - LO
8.1.2.32.01.	Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing - LO
8.1.2.33.	Retribusi Jasa Pelayanan Kesehatan Hewan dan IB
8.1.2.33.01.	Retribusi Jasa Pelayanan Kesehatan Hewan dan IB..
8.1.2.34.	Retribusi Pengelolaan Sarang Burung Walet dan Sejenisnya
8.1.2.34.01.	Retribusi Pengelolaan Sarang Burung Walet dan Sejenisnya..
8.1.2.35.	Retribusi Pengelolaan Pengambilan Rumput Laut
8.1.2.35.01.	Retribusi Pengelolaan Pengambilan Rumput Laut.
8.1.2.36.	Retribusi La in
8.1.2.36.01.	Retribusi La innya
8.1.3.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO
8.1.3.01.	Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas penyertaan modal
8.1.3.01.01.	Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas penyertaan modal pada
8.1.3.01.02.	Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas penyertaan modal pada
8.1.3.01.03.	Dst
8.1.3.02.	Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas penyertaan modal
8.1.3.02.01.	Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas penyertaan modal pada
8.1.3.02.02.	Dst
8.1.3.03.	Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas penyertaan modal
8.1.3.03.01.	Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas penyertaan modal pada
8.1.3.03.02.	Dst
8.1.4.	Lain-lain PAD Yang Sah - LO
8.1.4.01.	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan - LO
8.1.4.01.01.	Hasil Penjualan Tanah - LO
8.1.4.01.02.	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin - LO
8.1.4.01.03.	Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan - LO
8.1.4.01.04.	Hasil Penjualan Jalan, Irigasi dan Jaringan - LO
8.1.4.01.05.	Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya - LO
8.1.4.02.	Hasil Penjualan Aset Lainnya - LO
8.1.4.02.01.	Hasil Penjualan Aset Lainnya - LO
8.1.4.03.	Penerimaan Jasa Giro - LO
8.1.4.03.01.	Jasa Giro Kas Daerah - LO

Paraf Hierarki	
Sekda	✓
Asisten	✓
Kabag Hukum	4

Paraf Koordinasi	
SKPD/ Bagian Pemrakarsa	✓
SKPD/ Bagian Terkait:	
1. _____	
2. _____	
3. _____	

Kode	Uraian
1	2
8.1.4.03.02.	Jasa Giro Kas Bendahara - LO
8.1.4.03.03.	Jasa Giro Dana Cadangan - LO
8.1.4.03.04.	Dst
8.1.4.04.	Pendapatan Bunga - LO
8.1.4.04.01.	Pendapatan Bunga Deposito - LO
8.1.4.04.02.	Pendapatan Bunga Dana Bergulir - LO
8.1.4.04.03.	Pendapatan Bunga Lainnya - LO
8.1.4.05.	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah - LO
8.1.4.05.01.	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendahara - LO
8.1.4.05.02.	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara - LO
8.1.4.08.	Komisi, Potongan dan Selisih Nilai Tukar Rupiah - LO
8.1.4.06.01.	Penerimaan Komisi dari Ponompatan Kas Daerah - LO
8.1.4.06.02.	Penerimaan Potongan dari - LO
8.1.4.06.03.	Penerimaan Keuntungan Selisih Nilai Tukar Rupiah dari - LO
8.1.4.08.04.	Dst
8.1.4.07.	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - LO
8.1.4.07.01.	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - LO
8.1.4.07.02.	Dst
8.1.4.08.	Pendapatan Denda Pajak - LO
8.1.4.08.01.	Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Bermotor - LO
8.1.4.08.02.	Pendapatan Denda Sea Balik Nama Kendaraan Bermotor - LO
8.1.4.08.03.	Pendapatan Denda Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor - LO
8.1.4.08.04.	Pendapatan Denda Pajak Air Permukaan - LO
8.1.4.08.05.	Pendapatan Denda Pajak Rokok - LO
8.1.4.08.06.	Pendapatan Denda Pajak Hotel - LO
8.1.4.08.07.	Pendapatan Denda Pajak Restoran - LO
8.1.4.08.08.	Pendapatan Denda Pajak Hiburan - LO
8.1.4.08.09.	Pendapatan Denda Pajak Reklame - LO
8.1.4.08.10.	Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan - LO
8.1.4.08.11.	Pendapatan Denda Pajak Parkir - LO
8.1.4.08.12.	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah - LO
8.1.4.08.13.	Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet - LO
8.1.4.08.14.	Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LO
8.1.4.08.15.	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan - LO
8.1.4.08.16.	Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan - LO
8.1.4.08.17.	Pendapatan Denda Pajak Lingkungan - LO
8.1.4.09.	Pendapatan Denda Retribusi - LO
8.1.4.09.01.	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Kesehatan - LO
8.1.4.09.02.	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan - LO
8.1.4.09.03.	Pendapatan Denda Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan
8.1.4.09.04.	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat - LO
8.1.4.09.05.	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LO
8.1.4.09.06.	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pasar - LO
8.1.4.09.07.	Pendapatan Denda Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor - LO

Paraf Hierarki	
Sekda	
Asisten	
Kabag Hukum	




Paraf Koordinasi	
SKPD/ Bagian Pemrakarsa	
SKPD/ Bagian Terkait:	
1. _____	
2. _____	
3. _____	


Kode	Uraian
1	2
8.1.4.09.08.	Pendapatan Denda Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran - LO
8.1.4.09.09.	Pendapatan Denda Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta - LO
8.1.4.09.10.	Pendapatan Denda Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus - LO
8.1.4.09.11.	Pendapatan Denda Retribusi Pengolahan Limbah Cair - LO
8.1.4.09.12.	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang - LO
8.1.4.09.13.	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pendidikan - LO
8.1.4.09.14.	Pendapatan Denda Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi - LO
8.1.4.09.15.	Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LO
8.1.4.09.18.	Pendapatan Denda Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan - LO
8.1.4.09.17.	Pendapatan Denda Retribusi Tempat Pelelangan - LO
8.1.4.09.18.	Pendapatan Denda Retribusi Terminal - LO
8.1.4.09.19.	Pendapatan Denda Retribusi Tempat Khusus Parkir - LO
8.1.4.09.20.	Pendapatan Denda Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa - LO
8.1.4.09.21.	Pendapatan Denda Retribusi Rumah Potong Hewan - LO
8.1.4.09.22.	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Kepelabuhan - LO
8.1.4.09.23.	Pendapatan Denda Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga- LO
8.1.4.09.24.	Pendapatan Denda Retribusi Penyebrangan Air - LO
8.1.4.09.25.	Pendapatan Denda Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah - LO
8.1.4.09.28.	Pendapatan Denda Retribusi Izin Mendirikan Bangunan - LO
8.1.4.09.27.	Pendapatan Denda Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol - LO
8.1.4.09.28.	Pendapatan Denda Retribusi Izin Gangguan - LO
8.1.4.09.29.	Pendapatan Denda Retribusi Izin Trayek - LO
8.1.4.09.39.	Pendapatan Denda Retribusi Izin Perikanan - LO
8.1.4.09.31.	Pendapatan Denda Retribusi Pengendalian Lalu Lintas - LO
8.1.4.09.32.	Pendapatan Denda Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja
8.1.4.09.33.	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum - LO
8.1.4.09.34.	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha - LO
8.1.4.09.35.	Pendapatan Denda Retribusi Perizinan tertentu - LO
8.1.4.10.	Pendapatan Denda Pemanfaatan Aset Daerah - LO
8.1.4.10.01.	Pendapatan Denda Sewa Aset Daerah - LO
8.1.4.10.02.	Pendapatan Denda Kerjasama Pemanfaatan Aset Daerah - LO
8.1.4.10.03.	Pendapatan Denda Bangun Guna Serah - LO
8.1.4.10.04.	Pendapatan Denda Bangun Serah Guna - LO
8.1.4.11.	Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Perda
8.1.4.11.01.	Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Perda
8.1.4.11.02.	Dst
8.1.4.12.	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan - LO
8.1.4.12.01.	Hasil Eksekusi Atas Jaminan atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa - LO
8.1.4.12.02.	Hasil Eksekusi Atas Jaminan atas Pembongkaran Reklame - LO
8.1.4.12.03.	Hasil Eksekusi Jaminan atas KTP Musiman - LO
8.1.4.13.	Pendapatan dari Pengembalian -LO
8.1.4.13.01.	Pendapatan dari Pengembalian Pajak Penghasilan Pasal 21 - LO
8.1.4.13.02.	Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Asuransi Kesehatan - LO
8.1.4.13.03.	Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan - LO

Paraf Hierarki	
Sekda	
Asisten	
Kabag Hukum	

Paraf Koordinasi	
SKPD/ Bagian Pemrakarsa	
SKPD/ Bagian Terkait:	
1. _____	
2. _____	
3. _____	


Kode	Uraian
1	2
8.1.4.13.04.	Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas - LO
8.1.4.13.05.	Pendapatan dari Pengembalian dari Uang Muka - LO
8.1.4.13.06.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja non gaji dan
8.1.4.14.	Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum - LO
8.1.4.14.01.	Fasilitas Sosial - LO
8.1.4.14.02.	Fasilitas Umum - LO
8.1.4.14.03.	Dst
8.1.4.15.	Pendapatan Penyelenggaraan Sekolah dan Diklat - LO
8.1.4.15.01.	Pendapatan Penyelenggaraan Sekolah - LO
8.1.4.15.02.	Pendapatan Penyelenggaraan Diklat - LO
8.1.4.15.03.	Dst
8.1.4.16.	Pendapatan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan - LO
8.1.4.16.01.	Uang Pendaftaran/Ujian Masuk - LO
8.1.4.16.02.	Uang Sekolah/Pendidikan dan Pelatihan - LO
8.1.4.16.03.	Uang Ujian Kenaikan Tingkat/Kelas - LO
8.1.4.16.04.	Dst
8.1.4.17.	Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan - LO
8.1.4.17.01.	Angsuran/Cicilan Penjualan Rumah Dinas Daerah Golongan III - LO
8.1.4.17.02.	Angsuran/Cicilan Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas - LO
8.1.4.17.03.	Angsuran/Cicilan Ganti Kerugian Barang Milik Daerah - LO
8.1.4.18.	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah - LO
8.1.4.18.01.	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa - LO
8.1.4.18.02.	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Kerjasama Pemanfaatan- LO
8.1.4.18.03.	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Bangun Guna Serah - LO
8.1.4.18.04.	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Bangun Serah Guna - LO
8.1.4.19.	Pendapatan Zakat* - LO
8.1.4.19.01.	Pendapatan Zakat*..... - LO
8.1.4.19.02.	Dst
8.1.4.20.	Pendapatan BLUD - LO
8.1.4.20.01.	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD - LO
8.1.4.20.02.	Pendapatan Hibah BLUD - LO
8.1.4.20.03.	Pendapatan Hasil Kerjasama BLUD - LO
8.1.4.20.04.	Pendapatan BLUD Lainnya-LO
8.1.4.21.	Lain-lain PAD yang Sah - LO
8.1.4.21.01.	La in - La in PAD Yang Sah Lainnya-LO
8.1.4.21.02.	Pendapatan dari Hasil Perjanjian Kerjasama
8.1.4.22.	Pendapatan JKN
8.1.4.22.01.	Pendapatan Jaminan Kesehatan Nasional
8.2.	PENDAPATAN TRANSFER - LO
8.2.1.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -LO
8.2.1.01.	Bagi Hasil Pajak - LO
8.2.1.01.01.	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pertambangan - LO
8.2.1.01.02.	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkebunan - LO
8.2.1.01.03.	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perhutanan - LO

Paraf Hierarki	
Sekda	
Asisten	
Kabag Mutum	




Paraf Koordinasi	
SKPD/ Bagian Pemrakarsa	
SKPD/ Bagian Terkait:	
1. _____	
2. _____	
3. _____	


Kode	Uraian
1	2
8.2.1.01.04.	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 26 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang
8.2.1.01.05.	Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau - LO
8.2.1.01.06.	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan - LO
8.2.1.01.07.	Bagi Hasil dari Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan - LO
8.2.1.02.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LO
8.2.1.02.01.	Bagi Hasil dari Iuran Hak Pengusahaan Hutan - LO
8.2.1.02.02.	Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan - LO
8.2.1.02.03.	Bagi Hasil dari Dana Reboisasi - LO
8.2.1.02.04.	Bagi Hasil dari Iuran Tetap (Land-Rent) - LO
8.2.1.02.05.	Bagi Hasil dari Iuran Ekspiorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti) - LO
8.2.1.02.06.	Bagi Hasil dari Pungutan Pengusahaan Perikanan - LO
8.2.1.02.07.	Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan - LO
8.2.1.02.08.	Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi - LO
8.2.1.02.09.	Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi - LO
8.2.1.02.10.	Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi - LO
8.2.1.03.	Dana Alokasi Umum (DAU) - LO
8.2.1.03.01.	Dana Alokasi Umum - LO
8.2.1.04.	Dana Alokasi Khusus (DAK) - LO
8.2.1.04.01.	DAK Bidang Infrastruktur Jalan - LO
8.2.1.04.02.	DAK Bidang Infrastruktur Irigasi - LO
8.2.1.04.03.	DAK Bidang Infrastruktur Air Minum - LO
8.2.1.04.04.	DAK Bidang Infrastruktur Sanitasi - LO
8.2.1.04.06.	DAK Bidang Keluarga Berencana - LO
8.2.1.04.06.	DAK Bidang Kehutanan - LO
8.2.1.04.07.	DAK Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman - LO
8.2.1.04.08.	DAK Bidang Kesehatan - LO
8.2.1.04.09.	DAK Bidang Kelautan dan Perikanan - LO
8.2.1.04.10.	DAK Bidang Prasarana Pemerintahan - LO
8.2.1.04.11.	DAK Bidang Transportasi Perdesaan - LO
8.2.1.04.12.	DAK Bidang Perdagangan - LO
8.2.1.04.13.	DAK Bidang Lingkungan Hidup - LO
8.2.1.04.14.	DAK Bidang Sarana dan Prasarana Daerah Tertinggal (SPDT) - LO
8.2.1.04.16.	DAK Bidang Pertanian - LO
8.2.1.04.16.	DAK Bidang Energi Pedesaan - LO
8.2.1.04.17.	DAK Bidang Sarana dan Prasarana Kawasan Perbatasan - LO
8.2.1.04.18.	DAK Bidang Pendidikan - LO
8.2.1.04.19.	DAK Bidang Keselamatan Transportasi Darat - LO
8.2.1.04.20.	Dana alokasi khusus (DAK) - LO
8.2.2.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO
8.2.2.01.	Dana Otonomi Khusus - LO
8.2.2.01.01.	Dana Otonomi Khusus - LO
8.2.2.01.02.	Dana Tambahan Infrastruktur - LO
8.2.2.02.	Dana Keistimewaan - LO**
8.2.2.02.01.	Dana Keistimewaan - LO

Paraf Hierarki	
Sekda	
Asisten	
Kabag Hukum	

Paraf Koordinasi	
SKPD/ Bagian Pemrakarsa	
SKPD/ Bagian Terkait:	
1. _____	
2. _____	
3. _____	

Kode	Uraian
1	2
8.2.2.03.	Dana Penyesuaian - LO
8.2.2.03.01.	Tunjangan Profesi Guru PNSD - LO
8.2.2.03.02.	Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD - LO
8.2.2.03.03.	Dana Insentif Daerah - LO
8.2.2.03.04.	Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi Provinsi - LO
8.2.2.03.05.	Bantuan Operasional Sekolah - LO***
8.2.2.03.06.	Dana Penyesuaian - LO
8.2.2.03.07.	Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD (BOP PAUD)
8.2.2.03.08.	Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan Bantuan Operasional Keluarga
8.2.3.	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO
8.2.3.01.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LO
8.2.3.01.01.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak..... - LO
8.2.3.01.02.	Dst
8.2.3.02.	Pendapatan Bagi hasil Lainnya - LO
8.2.3.02.01.	Pendapatan Bagi hasil Lainnya.... - LO
8.2.3.02.02.	Dst
8.2.3.03.	Pendapatan Dana Otonomi Khusus-LO
8.2.3.03.01.	Pendapatan Dana Otonomi Khusus-LO
8.2.4.	Bantuan Keuangan - LO
8.2.4.01.	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya - LO
8.2.4.01.01.	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi - LO
8.2.4.01.02.	Dst
8.2.4.02.	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten - LO
8.2.4.02.01.	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten - LO
8.2.4.02.02.	Dst
8.2.4.03.	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kota
8.2.4.03.01.	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kota
8.2.4.03.02.	Dst
8.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO
8.3.1.	Pendapatan Hibah - LO
8.3.1.01.	Pendapatan Hibah dari Pemerintah - LO
8.3.1.01.01.	Pendapatan Hibah dari Pemerintah - LO
8.3.1.02.	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya - LO
8.3.1.02.01.	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya - LO
8.3.1.03.	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dalam Negeri - LO
8.3.1.03.01.	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dalam Negeri.... - LO
8.3.1.03.02.	Dst
8.3.1.04.	Pendapatan Hibah dari kelompok masyarakat/perorangan - LO
8.3.1.04.01.	Pendapatan Hibah dari kelompok masyarakat - LO
8.3.1.04.02.	Pendapatan Hibah dari kelompok perorangan - LO
8.3.2.	Dana Darurat - LO
8.3.2.01.	Dana Darurat - LO
8.3.2.01.01.	Korban/Kerusakan Akibat Bencana Alam - LO
8.3.2.01.02.	Dst

Paraf Hierarki	
Sekda	
Asisten	
Kabag Hukum	

Paraf Koordinasi	
SKPD/ Bagian Pemrakarsa	
SKPD/ Bagian Terkait:	
1. _____	
2. _____	
3. _____	

Kode	Uraian
1	2
8.3.3.	Pendapatan Lainnya - LO
8.3.3.01.	Pendapatan Lainnya - LO
8.3.3.01.01.	Pendapatan Lainnya - LO
8.3.3.01.02.	Dst
8.4.	SURPLUS NON OPERASIONAL - LO
8.4.1.	Surplus Penjualan Aset Non Lancar - LO
8.4.1.01.	Surplus Penjualan Aset Non Lancar - LO
8.4.1.01.01.	Surplus Penjualan Aset Tanah - LO
8.4.1.01.02.	Surplus Penjualan Aset Peralatan dan Mesin - LO
8.4.1.01.03.	Surplus Penjualan Aset Gedung dan Bangunan - LO
8.4.1.01.04.	Surplus Penjualan Aset Non Lancar/Aset Tetap Lainnya - LO
8.4.1.01.05.	Surplus Penjualan Aset Lain-lain - LO
8.4.1.01.06.	Surplus Pelepasan Investasi Jangka Panjang - LO
8.4.1.01.07.	Dst
8.4.2.	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO
8.4.2.01.	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO
8.4.2.01.01.	Surplus Penyelesaian Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan - LO
8.4.2.01.02.	Surplus Penyelesaian Utang Dari Lembaga Keuangan Bukan Bank - LO
8.4.2.01.03.	Surplus Penyelesaian Utang Dalam Negeri- Obligasi - LO
8.4.2.01.04.	Surplus Penyelesaian Utang Pemerintah Pusat - LO
8.4.2.01.05.	Surplus Penyelesaian Utang Pemerintah Provinsi - LO
8.4.2.01.06.	Surplus Penyelesaian Utang Pemerintah Kabupaten/Kota - LO
8.4.2.01.07.	Surplus Penyelesaian Premium (Diskonto) Obligasi - LO
8.4.2.01.03.	Dst
8.4.3.	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO
8.4.3.01.	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO
8.4.3.01.01.	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO
8.4.3.01.02.	Surplus Pelepasan Investasi Jangka Pendek- LO
8.4.3.01.03.	Dst
8.5.	PENDAPATAN LUAR BIASA - LO
8.5.1.	Pendapatan Luar Biasa - LO
8.5.1.01.	Pendapatan Pos Luar Biasa - LO
8.5.1.01.01.	Pendapatan Pos Luar Biasa - LO

BUPATI PACITAN



INDARTATO

Kode Rekening 1	Uraian 2
5.1.1.05.01.	Insentif Pemungutan Pajak Daerah.
5.1.1.06.	Insentip Pemungutan Retribusi Daerah
5.1.1.06.01.	Insentip Pemungutan Retribusi Daerah.
5.1.2.	BELANJA BUNGA
5.1.2.01.	Bunga Utang Pinjaman
5.1.2.01.01.	Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah
5.1.2.01.02.	Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Daerah lainnya
5.1.2.01.03.	Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank
5.1.2.01.04.	Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan bukan Bank
5.1.2.01.05.	Dst.....
5.1.2.02.	Bunga Utang Obligasi
5.1.2.02.01.	Bunga Utang Obligasi
5.1.2.02.02.	Dst.....
5.1.3.	BELANJA SUBSIDI
5.1.3.01.	Belanja Subsidi kepada Perusahaan/Lembaga
5.1.3.01.01.	Belanja Subsidi kepada Perusahaan
5.1.3.01.02.	Belanja Subsidi kepada Lembaga
5.1.3.01.03.	Dst.....
5.1.4.	BELANJA HIBAH
5.1.4.01.	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat
5.1.4.01.01.	Pemerintah Pusat
5.1.4.02.	Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah (lainnya3)
5.1.4.02.01.	Pemerintahan Daerah
5.1.4.02.02.	Dst.....
5.1.4.03.	Belanja Hibah kepada Pemerintahan Desa
5.1.4.03.01.	Pemerintahan Desa...
5.1.4.04.	Belanja Hibah kepada Perusahaan Daerah/BUMD/BUMN 4)
5.1.4.04.01.	Perusahaan Daerah BUMD/BUMN
5.1.4.04.02.	dst.....
5.1.4.05.	Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta
5.1.4.05.01.	Badan/lembaga/organisasi swasta
5.1.4.06.	Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat/Perorangan
5.1.4.06.01.	Kelompok masyarakat/perorangan
5.1.4.06.02.	dst.....
5.1.4.07.	Belanja Hibah Dana BOS
5.1.4.07.01.	Belanja Hibah Dana BOS ke SD Swasta
5.1.4.07.02.	Belanja Hibah Dana BOS ke SMP Swasta
5.1.5.	BELANJA BANTUAN SOSIAL
5.1.5.01.	Belanja Bantuan Sosial Kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan
5.1.5.01.01.	Belanja bantuan sosial kepada organisasi sosial kemasyarakatan
5.1.5.02.	Belanja Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat
5.1.5.02.01.	Belanja Bantuan Sosial Kelompok Masyarakat
5.1.5.02.02.	Dst.....
5.1.5.03.	Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat
5.1.5.03.01.	Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat

Paraf Hierarki	
Sekda	<i>[Signature]</i>
Asisten	<i>[Signature]</i>
Kabag Hukum	<i>[Signature]</i>

2.	
3.	

Kode Rekening 1	Uraian 2
5.1.5.03.02.	dst.....
5.1.6.	BELANJA BAGI HASIL KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN
5.1.6.01.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Provinsi
5.1.6.01.01.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Provinsi ...
5.1.6.01.02.	Dst.....
5.1.6.02.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten/Kota
5.1.5.02.01.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten/Kota ...
5.1.6.02.02.	Dst.....
5.1.6.03.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa
5.1.6.03.01.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa
5.1.6.03.02.	Dst.....
5.1.6.04.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Kabupaten/Kota
5.1.6.04.01.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Kabupaten/Kota
5.1.6.04.02.	Dst.....
5.1.6.05.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa
5.1.6.05.01.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa
5.1.6.05.02.	Dst.....
5.1.6.06.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Parkir Berlangganan.
5.1.6.06.01.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Parkir Berlangganan
5.1.7.	BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN
5.1.7.01.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi
5.1.7.01.01.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi
5.1.7.01.02.	Dst.....
5.1.7.02.	Belanja Bantuan Keuangan kepada kabupaten/Kota
5.1.7.02.01.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota
5.1.7.02.02.	Dst.....
5.1.7.03.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa
5.1.7.03.01.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa
5.1.7.04.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Daerah/Pemerintahan Desa lainnya
5.1.7.04.01.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi
5.1.7.04.02.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota
5.1.7.04.03.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Desa
5.1.7.04.04.	Dst.....
5.1.7.05.	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik
5.1.7.05.01.	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik.
5.1.8.	BELANJA TIDAK TERDUGA
5.1.8.01.	Belanja Tidak Terduga.
5.1.8.01.01.	Belanja Tidak Terduga
5.2.	BELANJA LANGSUNG
5.2.1.	BELANJA PEGAWAI
5.2.1.01.	Honorarium PNS
5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
5.2.1.01.04.	Honorarium Tim Penilaian Angka Kredit

Paraf Hierarki	
Sekda	
Asisten	
Kabag Hukum	

SKPD/	5.2.1.01.02	Koordinasi
SKPD/	5.2.1.01.03	Tim Pemeriksa
SKPD/	5.2.1.01.04	Tim Penilaian
1.		
2.		
3.		

Kode Rekening	Uraian
1	2
5.2.1.01.05.	Honorarium Tim Perencana Pengadaan Tanah
5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
5.2.1.02.	Honorarium Non PNS
5.2.1.02.01.	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber
5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
5.2.1.02.03.	Upah Tenaga Harian
5.2.1.02.04.	Upah Tenaga Borongan
5.2.1.03.	Uang Lembur
5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS
5.2.1.03.02.	Uang Lembur Non PNS
5.2.1.04.	Jasa Pemungutan
5.2.1.04.02.	Jasa Pemungutan Pajak Daerah dan PBB
5.2.1.05.	Uang Untuk diberikan Kepada pihak ketiga/masyarakat
5.2.1.05.01.	Uang Untuk diberikan Kepada pihak ketiga.
5.2.1.05.02.	Uang Untuk diberikan Kepada masyarakat
5.2.1.05.03.	Uang Untuk diberikan Kepada Siswa atau Pelajar
5.2.1.06.	Honorarium Pengelolaan Dana BLUD
5.2.1.06.01.	Honorarium Pengelolaan Dana BLUD.
5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor
5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor
5.2.2.01.02.	Belanja dokumen/ administrasi tender
5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)
5.2.2.01.04.	Belanja peranko, materai dan benda pos lainnya
5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
5.2.2.01.07.	Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran
5.2.2.01.08.	Belanja pengisian tabung gas
5.2.2.01.09.	Belanja Peralatan Penunjang Kesehatan
5.2.2.01.10.	Belanja pengadaan blanko Cek/Giro
5.2.2.01.11.	Belanja Dokumentasi/Dekorasi
5.2.2.01.12.	Belanja Kotak Saran
5.2.2.01.13.	Belanja Barang Pasca MOW/MOP
5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material
5.2.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan
5.2.2.02.02.	Belanja bahan/bibit tanaman
5.2.2.02.03.	Belanja bibit temak
5.2.2.02.04.	Belanja bahan obat-obatan
5.2.2.02.05.	Belanja bahan kimia
5.2.2.02.06.	Belanja Tropy/Piagam/Hadiah
5.2.2.02.07.	Belanja Pakan Temak
5.2.2.02.08.	Belanja bahan pupuk
5.2.2.02.09.1. Koordinasi	Belanja bibit ikan dan pakan
5.2.2.02.10.	Bahan Baku Perikanan
5.2.2.02.11. terkait:	Belanja Bahan Makanan

Paraf Hierarki	
Sekda	<i>[Signature]</i>
Asisten	<i>[Signature]</i>
Kabag Hukum	<i>[Signature]</i>

1.	
2.	
3.	

Kode Rekening 1	Uraian 2
5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
5.2.2.05.04.	Belanja Jasa KIR
5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
5.2.2.05.06.	Belanja perpanjangan Surat Ijin Mengemudi
5.2.2.05.07.	Belanja Perawatan Kendaraan Dinas Jabatan / Operasional
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.2.06.01.	Belanja cetak
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan
5.2.2.06.03.	Belanja Publikasi Proses Pengadaan Tanah
5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
5.2.2.07.01.	Belanja sewa rumah jabatan/rumah dinas
5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat
5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan
5.2.2.07.04.	Belanja Sewa tempat parkir/uang lambat/hanggar sarana mobilitas
5.2.2.07.05.	Belanja Sewa Tanah
5.2.2.07.06.	dst.....
5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas
5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
5.2.2.08.02.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Air
5.2.2.08.03.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara
5.2.2.08.04.	Dst.....
5.2.2.09.	Belanja Sewa Alat Berat
5.2.2.09.01.	Belanja sewa Eskavator
5.2.2.09.02.	Belanja sewa Buldoser
5.2.2.09.03.	Belanja Sewa Stom Wales
5.2.2.09.04.	Belanja Sewa Mesin Pengolah Semen
5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
5.2.2.10.01.	Belanja sewa meja kursi
5.2.2.10.02.	Belanja sewa komputer dan printer
5.2.2.10.03.	Belanja sewa proyektor
5.2.2.10.04.	Belanja sewa generator
5.2.2.10.05.	Belanja sewa tenda
5.2.2.10.06.	Belanja sewa pakaian adat/tradisional
5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System
5.2.2.10.08.	Belanja sewa panggung
5.2.2.10.09.	Belanja Sewa Dekorasi dan Perengkapannya
5.2.2.10.10.	Belanja Sewa Genset
5.2.2.10.11.	Belanja Sewa Alat Ukur
5.2.2.10.12.	Belanja Sewa Alat Pemotong
5.2.2.10.13.	Sewa Mesin Pendingin Ruangan (AC)
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman
5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai
5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat
5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu
5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman pasien

Paraf Hierarki	
Sekda	
Asisten	
Kabag Hukum	

SKPD	5.2.2.11.02. Koordinasi	
SKPD	5.2.2.11.03.	
1.	5.2.2.11.04.	
2.		
3.		

Kode Rekening	Uraian
1	2
5.2.2.11.05.	Belanja makanan dan minuman panti sosial
5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan minuman peserta
5.2.2.11.07.	Belanja Makan Minum Kegiatan
5.2.2.12.	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya
5.2.2.12.01.	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH
5.2.2.12.02.	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)
5.2.2.12.03.	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)
5.2.2.12.04.	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
5.2.2.12.05.	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)
5.2.2.12.06.	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)
5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja
5.2.2.13.01.	Belanja pakaian kerja lapangan
5.2.2.13.02.	Belanja Kelengkapan Kerja
5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu
5.2.2.14.01.	Belanja pakaian KORPRI
5.2.2.14.02.	Belanja pakaian adat daerah
5.2.2.14.03.	Belanja pakaian batik tradisional
5.2.2.14.04.	Belanja pakaian olahraga
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas
5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah
5.2.2.15.03.	Belanja perjalanan dinas luar negeri
5.2.2.15.04.	Belanja Transportasi
5.2.2.16.	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS
5.2.2.16.01.	Belanja beasiswa tugas belajar D3
5.2.2.16.02.	Belanja beasiswa tugas belajar S1
5.2.2.16.03.	Belanja beasiswa tugas belajar S2
5.2.2.16.04.	Belanja beasiswa tugas belajar S3
5.2.2.16.05.	Dst.....
5.2.2.17.	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS
5.2.2.17.01.	Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan
5.2.2.17.02.	Belanja sosialisasi
5.2.2.17.03.	Belanja bimbingan teknis
5.2.2.18.	Belanja Perjalanan Pindah Tugas
5.2.2.18.01.	Belanja perjalanan pindah tugas dalam daerah
5.2.2.18.02.	Belanja perjalanan pindah tugas luar daerah
5.2.2.18.03.	Dst.....
5.2.2.19.	Belanja Pemulangan Pegawai
5.2.2.19.01.	Belanja pemulangan pegawai yang pensiun dalam daerah
5.2.2.19.02.	Belanja pemulangan pegawai yang pensiun luar daerah
5.2.2.19.03.	Belanja pemulangan pegawai yang tewas dalam melaksanakan tugas
5.2.2.19.04.	Dst.....
5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan
SKPD 5.2.2.20.01. Perakarsa	Belanja Pemeliharaan Jalan
SKPD 5.2.2.20.02. Perakait:	Belanja Pemeliharaan Jembatan
1. _____	
2. _____	
3. _____	

Paral Hierarchy	
Sekda	✓
Asisten	✓
Kabag	✓
Wakil	✓

SKPD 5.2.2.20.01. Perakarsa	✓
SKPD 5.2.2.20.02. Perakait:	
1. _____	
2. _____	
3. _____	

Kode Rekening 1	Uraian 2
5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Irigasi
5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
5.2.2.20.05.	Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi
5.2.2.20.06.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
5.2.2.20.07.	Belanja Pemeliharaan Drainase
5.2.2.20.08.	Belanja Pemeliharaan Taman
5.2.2.20.09.	Belanja Pemeliharaan Situs Purbakala
5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi
5.2.2.21.01.	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian
5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan
5.2.2.21.03.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan
5.2.2.21.04.	Belanja Jasa Konsultansi Bimbingan Teknis
5.2.2.21.05.	Belanja Jasa Konsultansi
5.2.2.22.	Belanja Barang Dana BOS
5.2.2.22.01.	Belanja Barang Dana BOS..
5.2.2.23.	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga
5.2.2.23.01.	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat.
5.2.2.23.02.	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Pihak Ketiga.
5.2.2.23.03.	Belanja barang yang akan diserahkan kepada siswa
5.2.2.24.	Belanja Barang yang akan dijual kepada Masyarakat/Pihak Ketiga
5.2.2.24.01.	Belanja Barang yang akan dijual kepada Masyarakat.
5.2.2.24.02.	Belanja Barang yang akan dijual kepada Pihak Ketiga
5.2.2.25.	Belanja Barang Jasa BLUD Rumah Sakit
5.2.2.25.01.	Belanja Barang dan Jasa BLUD Rumah Sakit
5.2.2.25.	Belanja Rumah Tangga Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
5.2.2.26.01.	Belanja Rumah Tangga Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
5.2.2.26.02.	Belanja Kesehatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
5.2.2.26.03.	Belanja Kelengkapan dan Kebutuhan Harian Rumah Tangga Kepala Daerah dan Wakil
5.2.2.26.04.	Belanja Sarana dan Prasarana Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
5.2.2.27.	Belanja Kompensasi
5.2.2.27.01.	Belanja Kompensasi Bangunan Rumah dan Fasilitas Umum
5.2.2.28.	Belanja Jasa Profesi
5.2.2.28.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
5.2.2.29.	Belanja Sewa Tanah
5.2.2.29.01.	Belanja Sewa Lahan
5.2.3.	BELANJA MODAL
5.2.3.01.	Belanja Modal Pengadaan Tanah
5.2.3.01.01.	Belanja modal Pengadaan tanah kantor
5.2.3.01.02.	Belanja modal Pengadaan tanah sarana kesehatan rumah sakit
5.2.3.01.03.	Belanja modal Pengadaan tanah sarana kesehatan puskesmas
5.2.3.01.04.	Belanja modal Pengadaan tanah sarana kesehatan poliklinik
5.2.3.01.05.	Belanja modal Pengadaan tanah sarana pendidikan taman kanak-kanak
5.2.3.01.06.	Belanja modal Pengadaan tanah sarana pendidikan sekolah dasar
5.2.3.01.07.	Belanja modal Pengadaan tanah sarana pendidikan menengah umum dan kejuruan
5.2.3.01.08.	Belanja modal Pengadaan tanah sarana pendidikan menengah lanjutan dan kejuruan

Paraf Hierarki	
Sekda	✓
Asisten	71
Kabag Hukum	6

SKP	5.2.3.01.06	Koordinasi Pemrakarsa	✓
SKP	1.	5.2.3.01.07	
2.	5.2.3.01.08.		
3.			

Kode Rekening	Uraian
1	2
5.2.3.01.09.	Belanja modal Pengadaan tanah sarana pendidikan luar biasa/khusus
5.2.3.01.10.	Belanja modal Pengadaan tanah sarana pendidikan pelatihan dan kursus
5.2.3.01.11.	Belanja modal Pengadaan tanah sarana sosial panti asuhan
5.2.3.01.12.	Belanja modal Pengadaan tanah sarana sosial panti jompo
5.2.3.01.13.	Belanja modal Pengadaan tanah sarana umum terminal
5.2.3.01.14.	Belanja modal Pengadaan tanah sarana umum dermaga
5.2.3.01.15.	Belanja modal Pengadaan tanah sarana umum lapangan terbang perintis
5.2.3.01.16.	Belanja modal Pengadaan tanah sarana umum rumah potong hewan
5.2.3.01.17.	Belanja modal Pengadaan tanah sarana umum tempat pelelangan ikan
5.2.3.01.18.	Belanja modal Pengadaan tanah sarana umum pasar
5.2.3.01.19.	Belanja modal Pengadaan tanah sarana umum tempat pembuangan akhir sampah
5.2.3.01.20.	Belanja modal Pengadaan tanah sarana umum taman
5.2.3.01.21.	Belanja modal Pengadaan tanah sarana umum pusat hiburan rakyat
5.2.3.01.22.	Belanja modal Pengadaan tanah sarana umum ibadah
5.2.3.01.23.	Belanja modal Pengadaan tanah sarana stadion olahraga
5.2.3.01.24.	Belanja modal Pengadaan tanah perumahan
5.2.3.01.25.	Belanja modal Pengadaan tanah pertanian
5.2.3.01.26.	Belanja modal Pengadaan tanah perkebunan
5.2.3.01.27.	Belanja modal Pengadaan tanah perikanan
5.2.3.01.28.	Belanja modal Pengadaan tanah peternakan
5.2.3.01.29.	Belanja modal Pengadaan tanah perkampungan
5.2.3.01.30.	Belanja modal Pengadaan tanah pergudangan/tempat penimbunan material bahan baku
5.2.3.01.31.	Belanja Modal Pengadaan Tanah untuk Penanggulangan Banjir
5.2.3.01.32.	Belanja Modal Pengadaan Tanah untuk Sarana Irigasi
5.2.3.01.33.	Belanja Modal Pengadaan Tanah Untuk Sarana Umum Jalan
5.2.3.01.34.	Belanja Modal Pengadaan Tanah untuk Situs Purbakala
5.2.3.01.35.	Belanja modal pengadaan tanah untuk tugu batas kota
5.2.3.01.36.	Pengadaan Tanah Untuk Sarana Air Bersih
5.2.3.01.37.	Pengadaan Tanah untuk sarana umum kawasan wisata
5.2.3.01.38.	Belanja Modal Pengadaan Tanah Untuk Kompensasi Lahan
5.2.3.02.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Berat
5.2.3.02.01.	Belanja modal Pengadaan traktor
5.2.3.02.02.	Belanja modal Pengadaan buldozer
5.2.3.02.03.	Belanja modal Pengadaan stoom wals
5.2.3.02.04.	Belanja modal Pengadaan eskavator
5.2.3.02.05.	Belanja modal Pengadaan dump truk
5.2.3.02.06.	Belanja modal Pengadaan crane
5.2.3.02.07.	Belanja modal Pengadaan kendaraan penyapu jalan
5.2.3.02.08.	Belanja modal Pengadaan mesin pengolah semen
5.2.3.02.09.	Belanja modal Pengadaan mesin pengolah air bersih
5.2.3.02.10.	Belanja modal alat-alat bantu
5.2.3.02.11.	Belanja Modal Pengadaan Kontainer
5.2.3.02.12.	Belanja Modal Pengadaan Wheel Loader
5.2.3.02.13.	Belanja Modal Escalator
5.2.3.03.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor

Paraf Hierarki	
Sekda	✓
Asisten	✓
Kabag Hukum	✓

SKPD	5.2.3.02.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.31.32.33.34.35.36.37.38.39.40.41.42.43.44.45.46.47.48.49.50.51.52.53.54.55.56.57.58.59.60.61.62.63.64.65.66.67.68.69.70.71.72.73.74.75.76.77.78.79.80.81.82.83.84.85.86.87.88.89.90.91.92.93.94.95.96.97.98.99.100.
SKPD	5.2.3.03.1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.31.32.33.34.35.36.37.38.39.40.41.42.43.44.45.46.47.48.49.50.51.52.53.54.55.56.57.58.59.60.61.62.63.64.65.66.67.68.69.70.71.72.73.74.75.76.77.78.79.80.81.82.83.84.85.86.87.88.89.90.91.92.93.94.95.96.97.98.99.100.
1.	
2.	
3.	

Kode Rekening	Uraian
1	2
5.2.3.03.01.	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor sedan
5.2.3.03.02.	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor jeep
5.2.3.03.03.	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor station wagon
5.2.3.03.04.	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor bus
5.2.3.03.05.	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor micro bus
5.2.3.03.06.	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor truck
5.2.3.03.07.	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor tangki (air, minyak, tinja)
5.2.3.03.08.	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor boks
5.2.3.03.09.	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor pick up
5.2.3.03.10.	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor ambulans
5.2.3.03.11.	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor pemadam kebakaran
5.2.3.03.12.	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor sepeda motor
5.2.3.03.13.	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor lift/elevator
5.2.3.03.14.	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor tangga berjalan
5.2.3.03.15.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Roda Tiga
5.2.3.04.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor
5.2.3.04.01.	Belanja modal Pengadaan gerobak
5.2.3.04.02.	Belanja modal Pengadaan pedali/delman/dokar/bendi/cidomo/andong
5.2.3.04.03.	Belanja modal Pengadaan becak
5.2.3.04.04.	Belanja modal Pengadaan sepeda
5.2.3.04.05.	Belanja modal Pengadaan karavan
5.2.3.04.06.	Belanja Modal Pengadaan Trolley
5.2.3.05.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan di atas Air Bermotor
5.2.3.05.01.	Belanja modal Pengadaan kapal motor
5.2.3.05.02.	Belanja modal Pengadaan kapal feri
5.2.3.05.03.	Belanja modal Pengadaan speed boat
5.2.3.05.04.	Belanja modal Pengadaan motor boat/motor tempel
5.2.3.05.05.	Belanja modal Pengadaan hydro foil
5.2.3.05.06.	Belanja modal Pengadaan jet foil
5.2.3.05.07.	Belanja modal Pengadaan kapal tug boat
5.2.3.05.08.	Belanja modal Pengadaan kapal tanker
5.2.3.05.09.	Belanja modal Pengadaan kapal kargo
5.2.3.05.10.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Tempel
5.2.3.06.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan di atas Air Tidak Bermotor
5.2.3.06.01.	Belanja modal Pengadaan perahu layar
5.2.3.06.02.	Belanja modal Pengadaan perahu sampan
5.2.3.06.03.	Belanja modal Pengadaan perahu tongkang
5.2.3.06.04.	Belanja modal Pengadaan perahu karet
5.2.3.06.05.	Belanja modal Pengadaan perahu rakit
5.2.3.06.06.	Belanja modal Pengadaan perahu sekoci
5.2.3.06.07.	Dst.....
5.2.3.07.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Udara
5.2.3.07.01.	Belanja modal Pengadaan pesawat kargo
5.2.3.07.02.	Belanja modal Pengadaan pesawat penumpang
5.2.3.07.03.	Belanja modal Pengadaan pesawat helikopter

Paraf Hiararki	
Sekda	
Asisten	
Kabag	
Staf	

S.K.P.D	5.2.3.07.01. Koordinasi	
S.K.P.D	5.2.3.07.02. Pengawasan	
S.K.P.D	5.2.3.07.03.01.01	
1.		
2.		
3.		

Kode Rekening 1	Uraian 2
5.2.3.07.04.	Belanja modal pesawat pemadam kebakaran
5.2.3.07.05.	Belanja modal Pengadaan pesawat capung
5.2.3.07.06.	Belanja modal Pengadaan pesawat terbang ampibi
5.2.3.07.07.	Belanja modal Pengadaan pesawat terbang layang
5.2.3.07.08.	Dst.....
5.2.3.08.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel
5.2.3.08.01.	Belanja modal Pengadaan mesin las
5.2.3.08.02.	Belanja modal Pengadaan mesin bubut
5.2.3.08.03.	Belanja modal Pengadaan mesin dongkrak
5.2.3.08.04.	Belanja modal Pengadaan mesin kompresor
5.2.3.08.05.	Belanja Modal Pengadaan Genset
5.2.3.08.06.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Bor
5.2.3.08.07.	Belanja Modal Pompa Air
5.2.3.08.08.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Perbengkelan
5.2.3.09.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan
5.2.3.09.01.	Belanja modal Pengadaan penggiling hasil pertanian
5.2.3.09.02.	Belanja modal Pengadaan alat pengering gabah
5.2.3.09.03.	Belanja modal Pengadaan mesin bajak
5.2.3.09.04.	Belanja modal Pengadaan alat penetas
5.2.3.09.05.	Belanja Modal Alat Pemantau Kualitas Air
5.2.3.09.06.	Belanja Modal Alat Pengolah /Pencacah Sampah
5.2.3.09.07.	Belanja Modal Alat Pemotong Rumput
5.2.3.09.08.	Belanja Modal Pengadaan Hand Sprayer
5.2.3.09.09.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Pertanian
5.2.3.09.10.	Belanja Modal Pengadaan Alat Pengolah Hasil Perkebunan
5.2.3.09.11.	Belanja modal pengadaan mesin diesel
5.2.3.09.12.	Belanja Modal Pengadaan Sarana Pembuatan Pakan
5.2.3.09.13.	Belanja Modal Pengadaan Sarana Pembenihan
5.2.3.09.14.	Belanja Modal Pengadaan Karamba
5.2.3.09.15.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Gergaji
5.2.3.09.16.	Belanja Modal Sarana dan Prasarana Pertanian
5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor
5.2.3.10.01.	Belanja modal Pengadaan mesin tik
5.2.3.10.02.	Belanja modal Pengadaan mesin hitung
5.2.3.10.03.	Belanja modal Pengadaan mesin stensil
5.2.3.10.04.	Belanja modal Pengadaan mesin fotocopy
5.2.3.10.05.	Belanja modal Pengadaan mesin cetak
5.2.3.10.06.	Belanja modal Pengadaan mesin jilid
5.2.3.10.07.	Belanja modal Pengadaan mesin potong kertas
5.2.3.10.08.	Belanja modal Pengadaan mesin penghancur kertas
5.2.3.10.09.	Belanja modal Pengadaan papan tulis elektronik
5.2.3.10.10.	Belanja modal Pengadaan papan visual elektronik
5.2.3.10.11.	Belanja modal Pengadaan tabung pemadam kebakaran
5.2.3.10.12.	Belanja modal Pengadaan Papan Baliho
5.2.3.10.13.	Belanja modal Pengadaan Papan Non Elektrik

Paraf Hierarki	
Sekda	3
Asisten	4
Kabag	
Mukum	

S/K	5.2.3.10.12	Paraf Koordinator	
S/K	5.2.3.10.13	Paraf Terkait:	
1.			
2.			
3.			

Kode Rekening	Uraian
1	2
5.2.3.10.14.	Belanja Modal Papan Data
5.2.3.10.15.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Laminating
5.2.3.10.16.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Diesel
5.2.3.10.17.	Belanja Modal Pengadaan Terpal
5.2.3.10.18.	Belanja Modal Pengadaan Card Reader
5.2.3.10.19.	Belanja Modal Pengadaan Alat Deteksi Uang
5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor
5.2.3.11.01.	Belanja modal Pengadaan meja gambar
5.2.3.11.02.	Belanja modal Pengadaan almari
5.2.3.11.03.	Belanja modal Pengadaan brankas
5.2.3.11.04.	Belanja modal Pengadaan filling kabinet
5.2.3.11.05.	Belanja modal Pengadaan white board
5.2.3.11.06.	Belanja modal Pengadaan penunjuk waktu
5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan AC
5.2.3.11.08.	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin
5.2.3.11.09.	Belanja Modal Pengadaan Papan Pengumuman
5.2.3.11.10.	Belanja Modal Pengadaan Layar
5.2.3.11.11.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Absensi
5.2.3.11.12.	Belanja modal pengadaan Tenda/Terop
5.2.3.11.13.	Belanja Modal Pengadaan Lambang/ Logo
5.2.3.11.15.	Belanja Modal Pengadaan Tempat Sampah
5.2.3.11.16.	Belanja Modal Pengadaan Tangga
5.2.3.11.17.	Belanja Modal Pengadaan Rak Kaca/Etalase
5.2.3.11.18.	Belanja Modal Pengadaan Tiang Antrian
5.2.3.11.19.	Belanja Modal Pengadaan Penyangga LCD.
5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer
5.2.3.12.01.	Belanja modal Pengadaan komputer mainframe/server
5.2.3.12.02.	Belanja modal Pengadaan komputer/PC
5.2.3.12.03.	Belanja modal Pengadaan komputer note book
5.2.3.12.04.	Belanja modal Pengadaan printer
5.2.3.12.05.	Belanja modal Pengadaan scanner
5.2.3.12.05.	Belanja modal Pengadaan monitor/display
5.2.3.12.07.	Belanja modal Pengadaan CPU
5.2.3.12.08.	Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer
5.2.3.12.09.	Belanja modal Pengadaan kelengkapan komputer (flash disk, mouse, keyboard, hardisk,
5.2.3.12.10.	Belanja modal Pengadaan peralatan jaringan komputer
5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan mebeulair
5.2.3.13.01.	Belanja modal Pengadaan meja kerja
5.2.3.13.02.	Belanja modal Pengadaan meja rapat
5.2.3.13.03.	Belanja modal Pengadaan meja makan
5.2.3.13.04.	Belanja modal Pengadaan kursi kerja
5.2.3.13.05.	Belanja modal Pengadaan kursi rapat
5.3.3.13.06	Belanja modal Pengadaan kursi makan
5.2.3.13.07.	Belanja modal Pengadaan lempal tidur
5.2.3.13.08.	Belanja modal Pengadaan sofa

Paraf Hierarki	
Sekda	✓
Asisten	✓
Kabag Hukum	✓

SKPD/	5.3.3.13.06	ordinasi	
SKPD/	5.2.3.13.07.		✓
SKPD/	5.2.3.13.08.		
1.			
2.			
3.			

Kode Rekening 1	Uraian 2
5.2.3.13.09.	Belanja modal Pengadaan rak buku/tv/kembang
5.2.3.13.10.	Belanja Modal Pengadaan Meja Kursi Siswa
5.2.3.13.11.	Belanja modal Pengadaan Meja Kursi Tamu
5.2.3.13.12.	Belanja Modal Mimbar Podium
5.2.3.13.13.	Belanja modal Pengadaan Kursi Tunggu
5.2.3.13.14.	Belanja modal Pengadaan papan tulis/white board
5.2.3.14.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur
5.2.3.14.01.	Belanja modal Pengadaan tabung gas
5.2.3.14.02.	Belanja modal Pengadaan kompor gas
5.2.3.14.03.	Belanja modal Pengadaan lemari makan
5.2.3.14.04.	Belanja modal Pengadaan dispenser
5.2.3.14.05.	Belanja modal Pengadaan kulkas
5.2.3.14.06.	Belanja modal Pengadaan rak piring
5.2.3.14.07.	Belanja modal Pengadaan piring/geias/mangkok/cangkir/sendok/garpu/pisau
5.2.3.14.08.	Belanja modal Pengadaan Majig Jar
5.2.3.14.09.	Belanja Modal Mesin Cuci
5.2.3.14.10.	Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga
5.2.3.14.11.	Belanja Modal Trolly Food
5.2.3.14.12.	Belanja Modal Kompor Mesin Pengering
5.2.3.14.13.	Belanja Modal Pengadaan Watyer Furifer
5.2.3.14.14.	Belanja Modal Penampung Air
5.2.3.14.15.	Belanja Modal Water Heater
5.2.3.14.16.	Belanja Modal Kompor Biogas
5.2.3.14.18.	Belanja Modal Pengadaan Prasmanan Set
5.2.3.15.	Belanja Modal Pengadaan Penghlas Ruangan Rumah Tangga
5.2.3.15.01.	Belanja modal Pengadaan lampu hias
5.2.3.15.02.	Belanja modal Pengadaan jam dinding/meja
5.2.3.15.03.	Belanja Modal Kain Penghlas Ruangan
5.2.3.15.04.	Belanja Modal TV dan kelengkapannya
5.2.3.15.05.
5.2.3.15.06.	Belanja Modal Mesin penyedot debu
5.2.3.15.07.	Belanja Modal Pengadaan Karpet
5.2.3.15.08.	Belanja Modal Pengadaan Jemuran
5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio
5.2.3.16.01.	Belanja modal Pengadaan kamera
5.2.3.16.02.	Belanja modal Pengadaan handycam
5.2.3.16.03.	Belanja modal Pengadaan proyektor
5.2.3.16.04.	Belanja modal Alat Kelengkapan Studio
5.2.3.16.05.	Belanja modal Pengadaan Sound System
5.2.3.16.06.	Belanja Modal pengadaan Wireles set
5.2.3.16.07.	Belanja modal VCD/DVD palyer
5.2.3.16.08.	Belanja Modal Pengadaan CCTV
5.2.3.16.09.	Koordinasi Belanja Modal Tape Mobil
SKP 5.2.3.17.01	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi
SKP 5.2.3.17.01	Belanja modal Pengadaan telepon
1.	
2.	
3.	

Parat Hierarki	
Sekda	✓
Asisten	7
Kabag	4
Makum	




SKP	5.2.3.16.09	Koordinasi	
SKP	5.2.3.17.01	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	
SKP	5.2.3.17.01	Belanja modal Pengadaan telepon	
1.			
2.			
3.			



Kode Rekening	Uraian
1	2
5.2.3.17.02.	Belanja modal Pengadaan faximili
5.2.3.17.03.	Belanja modal Pengadaan radio SSB
5.2.3.17.04.	Belanja modal Pengadaan radio HF/FM (Handy Talkie)
5.2.3.17.05.	Belanja modal Pengadaan radio VHF
5.2.3.17.06.	Belanja modal Pengadaan radio UHF
5.2.3.17.07.	Belanja modal Pengadaan alat sandi
5.2.3.17.08.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Pemancar
5.2.3.17.09.	Belanja modal Pengadaan Perlengkapan Komunikasi
5.2.3.18.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur
5.2.3.18.01.	Belanja modal Pengadaan timbangan
5.2.3.18.02.	Belanja modal Pengadaan teodolite
5.2.3.18.03.	Belanja modal Pengadaan alat uji emisi
5.2.3.18.04.	Belanja modal Pengadaan alat GPS
5.2.3.18.05.	Belanja modal Pengadaan kompas/peralatan navigasi
5.2.3.18.06.	Belanja modal Pengadaan bejana ukur
5.2.3.18.07.	Belanja modal Pengadaan barometer
5.2.3.18.08.	Belanja modal Pengadaan seismograph
5.2.3.18.09.	Belanja modal Pengadaan ultrasonograph
5.2.3.18.10.	Belanja modal Fisk Finder
5.2.3.18.12.	Belanja Modal Pengadaan Meteran
5.2.3.18.13.	Belanja Modal Pengadaan Alat Centrifuge Extractor Test
5.2.3.18.14.	Belanja Modal Sound Lever Meter
5.2.3.18.15.	Belanja Modal Pengadaan Disto Meter
5.2.3.18.16.	Belanja Modal Pengadaan Altimeter
5.2.3.18.17.	Belanja Modal Pengadaan Alat Pengukur Kecepatan
5.2.3.19.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran
5.2.3.19.01.	Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran umum
5.2.3.19.02.	Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran gigi
5.2.3.19.03.	Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran THT
5.2.3.19.04.	Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran mata
5.2.3.19.05.	Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran bedah
5.2.3.19.06.	Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran anak
5.2.3.19.07.	Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran kebidanan dan penyakit kandungan
5.2.3.19.08.	Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran kulit dan kelamin
5.2.3.19.09.	Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran kardiologi
5.2.3.19.10.	Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran neurologi
5.2.3.19.11.	Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran orthopedi
5.2.3.19.12.	Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran hewan
5.2.3.19.13.	Belanja modal Pengadaan alat-alat farmasi
5.2.3.19.14.	Belanja modal Pengadaan alat-alat penyakit dalam/intemis
5.2.3.19.15.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Roda
5.2.3.20.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium
5.2.3.20.01.	Belanja modal Pengadaan alat-alat laboratorium biologi
5.2.3.20.02.	Belanja modal Pengadaan alat-alat laboratorium fisika/geologi/geodesi
5.2.3.20.03.	Belanja modal Pengadaan alat-alat laboratorium kimia

Paraf Hierarki	
Sekda	✓
Asisten	✓
Kabag Hukum	✓

SKPD	5.2.3.20.01 Koordinasi	✓
SKPD	5.2.3.20.02	✓
SKPD	5.2.3.20.03	✓
1.		
2.		
3.		

Kode Rekening	Uraian
1	2
5.2.3.20.04.	Belanja modal Pengadaan alat-alat laboratorium pertanian
5.2.3.20.05.	Belanja modal Pengadaan alat-alat laboratorium peternakan
5.2.3.20.06.	Belanja modal Pengadaan alat-alat laboratorium perkebunan
5.2.3.20.07.	Belanja modal Pengadaan alat-alat laboratorium perikanan
5.2.3.20.08.	Belanja modal Pengadaan alat-alat laboratorium bahasa
5.2.3.20.09.	Belanja modal Pengadaan alat-alat peraga / praktik sekolah
5.2.3.20.10.	Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Lainnya
5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan
5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.
5.2.3.21.02.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan fly over
5.2.3.21.03.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan under pass
5.2.3.21.04.	Belanja Modal pengadaan konstruksi jalan lingkungan
5.2.3.22.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan
5.2.3.22.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jembatan gantung
5.2.3.22.02.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jembatan ponton
5.2.3.22.03.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jembatan penyebrangan jalan orang
5.2.3.22.04.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jembatan penyebrangan diatas air
5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air
5.2.3.23.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi bendungan
5.2.3.23.02.	Belanja modal Pengadaan konstruksi waduk
5.2.3.23.03.	Belanja modal Pengadaan konstruksi kanal permukaan
5.2.3.23.04.	Belanja modal Pengadaan konstruksi kanal bawah tanah
5.2.3.23.05.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan irigasi
5.2.3.23.06.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan air bersih/air minum
5.2.3.23.07.	Belanja modal Pengadaan konstruksi reservoir
5.2.3.23.08.	Belanja modal Pengadaan konstruksi pintu air
5.2.3.23.09.	Belanja Modal Kontruksi Drainase
5.2.3.23.10.	Belanja Modal Kontruksi Pengaman Sungai
5.2.3.23.11.	Belanja Modal Kontruksi Sumur Bor/Gas
5.2.3.23.12.	Belanja Modal Konservasi
5.2.3.23.13.	Belanja Modal Pembuatan Jalur Labuh Perahu
5.2.3.24.	Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota
5.2.3.24.01.	Belanja modal Pengadaan lampu hias jalan
5.2.3.24.02.	Belanja modal Pengadaan lampu hias taman
5.2.3.24.03.	Belanja modal Pengadaan lampu penerang hutan kota
5.2.3.24.04.	Belanja Modal Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum
5.2.3.25.	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon
5.2.3.25.01.	Belanja modal Pengadaan instalasi listrik
5.2.3.25.02.	Belanja modal Pengadaan instalasi telepon
5.2.3.25.03.	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Air
5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan
5.2.3.26.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor
5.2.3.26.02.	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian rumah jabatan
5.2.3.26.03.	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian rumah dinas
5.2.3.26.04.	Belanja modal Pengadaan konstruksi/Pembelian gedung gudang
1.	
2.	
3.	

Paraf Hierarki	
Sekda	
Asisten	
Kabag Hukum	

SKP	5.2.3.26.02. koordinator	
SKP	5.2.3.26.03. mitrakarsa	
SKP	5.2.3.26.04. kait:	
1.		
2.		
3.		

Kode Rekening 1	Uraian 2
5.2.3.26.05.	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian bangunan bersejarah
5.2.3.26.06.	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian bangunan monumen
5.2.3.26.07.	Belanja modal Pengadaan konstruksi tugu batas Kabupaten
5.2.3.26.08.	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian Rambu-rambu
5.2.3.26.09.	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian Tempat Wisata
5.2.3.26.10.	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung tempat belajar
5.2.3.26.11.	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian Fasilitas Sanitasi
5.2.3.26.12.	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian MCK
5.2.3.26.13.	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian Kios Pedagang
5.2.3.26.14.	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian Terminal
5.2.3.26.15.	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian Pasar
5.2.3.26.16.	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian Stadion Olah Raga
5.2.3.25.17.	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian Tempat Pengolah Sampah
5.2.3.26.18.	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian Menara
5.2.3.26.19.	Belanja modal Pengadaan konstruksi / Pembelian Tempat Tanaman
5.2.3.26.20.	Belanja Modal Pengadaan Landasan Pacu Bandar Udara
5.2.3.26.21.	Belanja modal Pengadaan konstruksi Unit Pembenihan Rakyat
5.2.3.26.22.	Belanja modal Pengadaan konstruksi Penerangan Jalan dan Taman
5.2.3.26.23.	Belanja modal Pengadaan konstruksi Kotam
5.2.3.26.24.	Belanja modal Sarana dan Prasarana Persampahan
5.2.3.26.25.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Taman
5.2.3.26.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Sarana Kesehatan
5.2.3.26.27.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Tempat Parkir
5.2.3.26.28.	Belanja modal konstruksi pagar/gapura
5.2.3.27.	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan
5.2.3.27.01.	Belanja modal Pengadaan buku matematika
5.2.3.27.02.	Belanja modal Pengadaan buku fisika
5.2.3.27.03.	Belanja modal Pengadaan buku kimia
5.2.3.27.04.	Belanja modal Pengadaan buku biologi
5.2.3.27.05.	Belanja modal Pengadaan buku biografi
5.2.3.27.06.	Belanja modal Pengadaan buku geografi
5.2.3.27.07.	Belanja modal Pengadaan buku astronomi
5.2.3.27.08.	Belanja modal Pengadaan buku arkeologi
5.2.3.27.09.	Belanja modal Pengadaan buku bahasa dan sastra
5.2.3.27.10.	Belanja modal Pengadaan buku keagamaan
5.2.3.27.11.	Belanja modal Pengadaan buku sejarah
5.2.3.27.12.	Belanja modal Pengadaan buku seni dan budaya
5.2.3.27.13.	Belanja modal Pengadaan buku Perpustakaan
5.2.3.27.14.	Belanja modal Pengadaan buku ilmu pengetahuan sosial
5.2.3.27.15.	Belanja modal Pengadaan buku ilmu politik dan ketatanegaraan
5.2.3.27.16.	Belanja modal Pengadaan buku ilmu pengetahuan dan teknologi
5.2.3.27.17.	Belanja modal Pengadaan buku ensiklopedia
5.2.3.27.18.	Belanja modal Pengadaan buku kamus bahasa
5.2.3.27.19.	Belanja modal Pengadaan buku ekonomi dan keuangan
5.2.3.27.20.	Belanja modal Pengadaan buku industri dan perdagangan

Paraf Hierarki	
Sekda	
Asisten	
Kabag Hukum	

SKPD	5.2.3.27.18. Koordinasi	
SKPD	5.2.3.27.19. Manakarsa	
SKPD	5.2.3.27.20. kait:	
1.		
2.		
3.		

Kode Rekening	Uraian
1	2
5.2.3.27.21.	Belanja modal Pengadaan buku peraturan perundang-undangan
5.2.3.27.22.	Belanja modal Pengadaan buku naskah
5.2.3.27.23.	Belanja modal Pengadaan terbitan berkala (jurnal, Compact Disk)
5.2.3.27.24.	Belanja modal Pengadaan mlkrofilm
5.2.3.27.25.	Belanja modal Pengadaan peta/atlas/globe
5.2.3.27.26.	Belanja Modal Buku Pelajaran
5.2.3.27.27.	Belanja Modal Peta Tematik
5.2.3.28.	Belanja Modal Pengadaan Barang bercorak Kesenian, Kebudayaan
5.2.3.28.01.	Belanja modal Pengadaan lukisan/foto
5.2.3.28.02.	Belanja modal Pengadaan patung
5.2.3.28.03.	Belanja modal Pengadaan ukiran
5.2.3.28.04.	Belanja modal Pengadaan pahatan
5.2.3.28.05.	Belanja modal Pengadaan batu alam
5.2.3.28.06.	Belanja modal Pengadaan maket/miniatur/diorama
5.2.3.28.07.	Belanja Modal Gamelan
5.2.3.28.08.	Belanja Modal Alat Musik
5.2.3.29.	Belanja Modal Pengadaan Hewan/Temak dan Tanaman
5.2.3.29.01.	Belanja modal Pengadaan hewan kebun binatang
5.2.3.29.02.	Belanja modal Pengadaan temak
5.2.3.29.03.	Belanja modal Pengadaan tanaman
5.2.3.29.04.	Dst.....
5.2.3.30.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Persenjataan/Keamanan
5.2.3.30.01.	Belanja modal Pengadaan senjata api
5.2.3.30.02.	Belanja modal Pengadaan radar
5.2.3.30.03.	Belanja modal Pengadaan mobil water canon
5.2.3.30.04.	Belanja modal Pengadaan borgol
5.2.3.30.05.	Belanja modal Pengadaan sangkur/bayonet
5.2.3.30.06.	Belanja modal Pengadaan perisai/tameng
5.2.3.30.07.	Belanja modal Pengadaan detektor logam
5.2.3.30.08.	Belanja modal Pengadaan rompi anti peluru
5.2.3.30.09.	Belanja modal Pengadaan pentungan
5.2.3.30.10.	Belanja modal Pengadaan helm
5.2.3.30.11.	Belanja Modal Pengadaan Alarm/Sirine
5.2.3.30.12.	Belanja modal Pengadaan sentolop/senter
5.2.3.30.13.	Belanja modal Pengadaan baju pelampung/pelampung
5.2.3.30.14.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Selam
5.2.3.30.15.	Belanja Modal Pengadaan Teropong
5.2.3.30.16.	Belanja Modal Pengadaan Papan Selancar
5.2.3.30.17.	Belanja Modal Kelengkapan Evakuasi
5.2.3.31.	Belanja Modal Dana Bos
5.2.3.31.01.	Belanja Modal Dana Bos.
5.2.3.32.	Belanja Modal Dana BLUD

Paraf Hierarki	
Sekda	
Asisten	
Kabag Hukum	




SKP	5.2.3.32.01	Koordinasi	Belanja Modal BLUD Rumah Sakit
SKP	5.2.3.33.		Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga
SKP	5.2.3.33.01.		Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga.
1.			
2.			
3.			

Kode Rekening 1	Uraian 2
5.2.3.34.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Praktek
5.2.3.34.01.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Praktek.
5.2.3.35.	Belanja modal pengadaan alat pengolah limbah medis
5.2.3.35.01.	Belanja Modal Pengadaan Alat Pengolah Limbah Medis
5.2.3.36.	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Central Gas Medis
5.2.3.36.01.	Belanja modal pengadaan Instalasi central gas medis
9.	BEBAN
9.1.	BEBAN OPERASI - LO
9.1.1.	Beban Pegawai - LO
9.1.1.01.	Beban Gaji dan Tunjangan - LO
9.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS / Uang Representasi - LO
9.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga - LO
9.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan - LO
9.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional - LO
9.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum - LO
9.1.1.01.06.	Tunjangan Beras - LO
9.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus - LO
9.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji - LO
9.1.1.01.09.	Iuran Jaminan Kesehatan - LO
9.1.1.01.10.	Uang Paket - LO
9.1.1.01.11.	Tunjangan Badan Musyawarah - LO
9.1.1.01.12.	Tunjangan Komisi - LO
9.1.1.01.13.	Tunjangan Badan Anggaran - LO
9.1.1.01.14.	Tunjangan Badan Kehormatan - LO
9.1.1.01.15.	Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya - LO
9.1.1.01.16.	Tunjangan Perumahan - LO
9.1.1.01.17.	Uang Duka Wafat/Tewas - LO
9.1.1.01.18.	Uang Jasa Pengabdian - LO
9.1.1.01.19.	Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD - LO
9.1.1.01.20.	Tunjangan Kesehatan DPRD - LO
9.1.1.01.21.	Tunjangan Profesi Guru - LO
9.1.1.01.22.	Tunjangan Jaminan Kematian dan Jaminan Kecelakaan Kerja - LO
9.1.1.02.	Beban Tambahan Penghasilan PNS - LO
9.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja - LO
9.1.1.02.02.	Tambahan Penghasilan berdasarkan tempat bertugas - LO
9.1.1.02.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja - LO
9.1.1.02.04.	Tambahan Penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi - LO
9.1.1.02.05.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja
9.1.1.02.06.	Belanja Sertifikasi PNS- LO
9.1.1.02.07.	Tambahan Penghasilan Guru - LO
9.1.1.02.08.	Belanja Sertifikasi - LO
9.1.1.03.	Beban Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH - LO
9.1.1.03.01.	Beban Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD - LO
9.1.1.03.02.	Beban Penunjang Operasional KDH/WKDH - LO
9.1.1.03.03.	Da

Paral Hierarki	
Sekda	
Asisten	
Kabag Umum	




SKP	9.1.1.03.01	koordinasi	
SKP	9.1.1.03.02	koordinasi	
1.	9.1.1.03.03	kait:	Da
2.			
3.			



Kode Rekening	Uraian
1	2
9.1.1.04.	Beban Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan - LO
9.1.1.04.01.	Beban Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pertambangan - LO
9.1.1.04.02.	Beban Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perkebunan - LO
9.1.1.04.03.	Beban Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perhutanan - LO
9.1.1.04.04.	Beban Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan - LO.
9.1.1.05.	Insentif Pemungutan Pajak Daerah
9.1.1.05.01.	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Kendaraan Bermotor - LO
9.1.1.05.02.	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor - LO
9.1.1.05.03.	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor - LO
9.1.1.05.04.	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Air Permukaan - LO
9.1.1.05.05.	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Rokok - LO
9.1.1.05.06.	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Hotel - LO
9.1.1.05.07.	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Restoran - LO
9.1.1.05.08.	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Hiburan - LO
9.1.1.05.09.	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Reklame - LO
9.1.1.05.10.	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Penerangan Jalan - LO
9.1.1.05.11.	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Parkir - LO
9.1.1.05.12.	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Air Tanah - LO
9.1.1.05.13.	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Sarang Burung Walet - LO
9.1.1.05.14.	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LO
9.1.1.05.15.	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan -
9.1.1.05.16.	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan - LO
9.1.1.05.17.	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - LO.
9.1.1.06.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah
9.1.1.06.01.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Kesehatan - LO
9.1.1.06.02.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Persampahan/ Kebersihan - LO
9.1.1.06.03.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk
9.1.1.06.04.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat -
9.1.1.06.05.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LO
9.1.1.06.06.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Pasar - LO
9.1.1.06.07.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pengujian Kendaraan Bermotor - LO
9.1.1.06.08.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran - LO
9.1.1.06.09.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Penggantian Biaya Cetak Peta - LO
9.1.1.06.10.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus - LO
9.1.1.06.11.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pengolahan Limbah Cair - LO
9.1.1.06.12.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Tera/Tera Ulang - LO
9.1.1.06.13.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Pendidikan - LO
9.1.1.06.14.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pengendalian Menara Telekomunikasi - LO
9.1.1.05.15.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pemakaian Kekayaan Daerah - LO
9.1.1.06.16.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan - LO
9.1.1.06.17.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Tempat Pelelangan - LO
9.1.1.06.18.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Terminal - LO
9.1.1.06.19.1	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Tempat Khusus Parkir - LO
9.1.1.06.20.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa - LO
9.1.1.06.21.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Rumah Potong Hewan - LO

Parat Hierarki	
Sekda	
Asisten	
Kabag Hukum	

Sr	9.1.1.06.19.1	Koordinasi	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Tempat Khusus Parkir - LO
SK	9.1.1.06.20.		Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa - LO
1.	9.1.1.06.21.		Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Rumah Potong Hewan - LO
2.			
3.			

Kode Rekening	Uraian
1	2
9.1.1.06.22.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Kepelabuhan - LO
9.1.1.06.23.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Tempat Rekreasi dan Olah raga- LO
9.1.1.06.24.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Penyebrangan Air - LO
9.1.1.06.25.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Penjualan Produksi Usaha Daerah - LO
9.1.1.06.26.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Mendirikan Bangunan - LO
9.1.1.06.27.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol - LO
9.1.1.06.28.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Gangguan - LO
9.1.1.06.29.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Trayek - LO
9.1.1.06.30.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Perikanan - LO
9.1.1.06.31.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pengendalian Lalu Lintas - LO
9.1.1.06.32.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja
9.1.1.06.33.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - LO.
9.1.1.07.	Uang Lembur - LO
9.1.1.07.01.	Uang Lembur PNS - LO
9.1.1.07.02.	Uang Lembur Non PNS - LO
9.1.2.	Beban Barang dan Jasa
9.1.2.01.	Beban Bahan Pakai Habis
9.1.2.01.01.	Beban Persediaan alat tulis kantor
9.1.2.01.02.	Beban Persediaan dokumen/administrasi tender
9.1.2.01.03.	Beban Persediaan alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)
9.1.2.01.04.	Beban Persediaan perangk, materai dan benda pos lainnya
9.1.2.01.05.	Beban Persediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih
9.1.2.01.06.	Beban Persediaan Bahan Bakar Minyak/Gas
9.1.2.01.07.	Beban Persediaan pengisian tabung pemadam kebakaran
9.1.2.01.08.	Beban Persediaan pengisian isi tabung gas
9.1.2.01.09.	Beban Persediaan Peralatan Penunjang Kesehatan
9.1.2.01.10.	Beban Persediaan Pengadaan blanko Cek/Giro
9.1.2.01.11.	Beban Persediaan Dokumentasi/Dekorasi
9.1.2.01.12.	Beban Persediaan Obat-obatan
9.1.2.01.13.	Beban Persediaan Jasa Media
9.1.2.01.14.	Beban Barang Pasca MOWMOP
9.1.2.01.15.	Beban Kotak Saran
9.1.2.02.	Beban Persediaan Bahan/ Material
9.1.2.02.01.	Beban Persediaan bahan baku bangunan
9.1.2.02.02.	Beban Persediaan bahan/bibit tanaman
9.1.2.02.03.	Beban Persediaan bibit temak
9.1.2.02.04.	Beban Persediaan bahan obat-obatan
9.1.2.02.05.	Beban Persediaan bahan kimia
9.1.2.02.06.	Beban Persediaan Makanan Pokok
9.1.2.02.07.	Beban Persediaan Tropy/Piagam/Hadiah
9.1.2.02.08.	Beban Persediaan Pakan Temak
9.1.2.02.09.	Beban Persediaan bahan pupuk
9.1.2.02.10.	Beban Persediaan bibit ikan dan pakan
9.1.2.02.11.	Beban Persediaan Bahan Baku Perikanan
9.1.2.02.12.	Beban Persediaan Bahan Baku Industri

Paraf Hierarki	
Sekda	
Asisten	
Kabag Hukum	

SKD	9.1.2.02.10. Koordinasi	
SKP	9.1.2.02.11. Ciptakarsa	
1.	9.1.2.02.12. Berkait:	
2.		
3.		

Kode Rekening	Uraian
1	2
9.1.2.02.13.	Beban Persediaan Bahan Praktik/Peraga / pelatihan / Diklat
9.1.2.02.14.	Beban Persediaan Peralatan Industri
9.1.2.02.15.	Beban Persediaan Induk Ikan
9.1.2.02.16.	Beban Persediaan Bingkai / Figura Lambang / Logo / Lukisan / Hiasan Dinding
9.1.2.03.	Beban Jasa Kantor
9.1.2.03.01.	Beban Jasa telepon
9.1.2.03.02.	Beban Jasa air
9.1.2.03.03.	Beban Jasa listrik
9.1.2.03.04.	Beban Jasa pengumuman lelang/ pemenang lelang
9.1.2.03.05.	Beban Jasa surat kabar/majalah
9.1.2.03.06.	Beban Jasa kawat/faksimili/internet
9.1.2.03.07.	Beban Jasa paket/pengiriman
9.1.2.03.08.	Beban Jasa Sertifikasi
9.1.2.03.09.	Beban Jasa Transaksi Keuangan
9.1.2.03.10.	Beban Jasa administrasi pungutan Pajak Penerangan Jalan Umum
9.1.2.03.11.	Beban Jasa administrasi pungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
9.1.2.03.12.	Beban Jasa Intensifikasi Pendapatan
9.1.2.03.13.	Beban Jasa administrasi pemungutan Pajak daerah dan PBB
9.1.2.03.14.	Beban Jasa administrasi penyelesaian perkara
9.1.2.03.15.	Beban software
9.1.2.03.16.	Beban Pemasangan iklan
9.1.2.03.17.	Beban Layanan Kesehatan
9.1.2.03.18.	Beban Jasa Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah
9.1.2.03.19.	Beban Jasa Media
9.1.2.03.21.	Beban Jasa Laundry
9.1.2.03.22.	Beban Jasa Medis/Paramedis
9.1.2.03.23.	Beban Transportasi
9.1.2.03.24.	Beban Jasa Pengamanan Kantor dan Rumah Dinas
9.1.2.03.25.	Beban Jasa Cleaning Service
9.1.2.03.26.	Beban Jasa Teknis
9.1.2.03.27.	Beban Jasa Pihak Ketiga
9.1.2.03.28.	Beban Uang untuk di berikan kepada pihak ketiga
9.1.2.03.29.	Beban Uang Untuk diberikan kepada masyarakat
9.1.2.03.30.	Beban Uang untuk di berikan kepada siswa / pelajar
9.1.2.03.31.	Beban Jasa Profesi
9.1.2.03.32.	Beban Jasa Premi Pendamping Operator dan PKH
9.1.2.04.	Beban Premi Asuransi
9.1.2.04.01.	Beban Jasa Premi Asuransi Kesehatan
9.1.2.04.02.	Beban Jasa Premi Asuransi Barang Milik Daerah
9.1.2.04.03.	Dst.....
9.1.2.05.	Beban Perawatan Kendaraan Bermotor
9.1.2.05.01.	Beban Jasa Service
9.1.2.05.02.	Beban Penggantian Suku Cadang
9.1.2.05.03.	Beban Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
9.1.2.05.04.	Beban Jasa KIR

Paraf Hierarki	
Sekda	
Asisten	
Kabag Hukum	

SKP	9.1.2.05.02	koordinasi	
SKP	9.1.2.05.03	koordinasi	
SKP	9.1.2.05.04	koordinasi	
1.			
2.			
3.			

Kode Rekening 1	Uraian 2
9.1.2.05.05.	Beban Pajak Kendaraan Bermotor
9.1.2.05.06.	Beban Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
9.1.2.06.	Beban Cetak dan Penggandaan
9.1.2.06.01.	Beban Cetak
9.1.2.06.02.	Beban Penggandaan
9.1.2.07.	Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
9.1.2.07.01.	Beban sewa rumah jabatan/rumah dinas
9.1.2.07.02.	Beban sewa gedung/ kantor/tempat
9.1.2.07.03.	Beban sewa ruang rapat/pertemuan
9.1.2.07.04.	Beban sewa tempat parkir/uang tambal/hanggar sarana mobilitas
9.1.2.07.05.	Beban Sewa Tanah
9.1.2.08.	Beban Sewa Sarana Mobilitas
9.1.2.08.01.	Beban Sewa Sarana Mobilitas Darat
9.1.2.08.02.	Beban Sewa Sarana Mobilitas Air
9.1.2.08.03.	Beban Sewa Sarana Mobilitas Udara
9.1.2.08.04.	Dst ...
9.1.2.09.	Beban Sewa Alat Berat
9.1.2.09.01.	Beban Sewa Eskavator
9.1.2.09.02.	Beban Sewa Buldoser
9.1.2.09.03.	Beban Sewa Stem Wales
9.1.2.10.	Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
9.1.2.10.01.	Beban sewa meja kursi
9.1.2.10.02.	Beban sewa komputer dan printer
9.1.2.10.03.	Beban sewa proyektor
9.1.2.10.04.	Beban sewa generator
9.1.2.10.05.	Beban sewa tenda
9.1.2.10.06.	Beban sewa pakaian adat/tradisional
9.1.2.10.07.	Beban Sewa Sound System
9.1.2.10.08.	Beban sewa panggung
9.1.2.10.09.	Beban Sewa Dekorasi dan Perlengkapannya
9.1.2.10.10.	Beban Sewa Genset
9.1.2.10.11.	Beban Sewa Alat Ukur
9.1.2.10.12.	Beban Sewa Alat Pemotong
9.1.2.10.13.	Beban Sewa Mesin Pendingin Ruangan
9.1.2.11.	Beban Makanan dan Minuman
9.1.2.11.01.	Beban makanan dan minuman harian pegawai
9.1.2.11.02.	Beban makanan dan minuman rapat
9.1.2.11.03.	Beban makanan dan minuman tamu
9.1.2.11.04.	Beban makanan dan minuman pelatihan
9.1.2.11.05.	Beban makanan dan minuman pasien
9.1.2.11.06.	Beban makanan dan minuman panti sosial
9.1.2.11.07.	Beban Makan Minum Kegiatan
9.1.2.12.	Beban Pakaian Dinas dan Atributnya
9.1.2.12.01.	Beban pakaian Dinas KDH dan WKDH
9.1.2.12.02.	Beban Pakaian Sipil Harian (PSH)

Paral Hierarki	
Sekda	2
Asisten	4
Kabag	4
Wakil	

EK.FD:	9.1.2.12.01. Inisiasi	
SKPD:	9.1.2.12.02. Arit	
1.		
2.		
3.		

Kode Rekening 1	Uraian 2
9.1.2.12.03.	Beban Pakaian Sipil Lengkap (PSL)
9.1.2.12.04.	Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)
9.1.2.12.05.	Beban Pakaian Dinas Upacara (PDU)
9.1.2.12.06.	Beban Pakaian Sipil Resmi (PSR)
9.1.2.13.	Belanja Pakaian Kerja
9.1.2.13.01.	Beban pakaian kerja lapangan
9.1.2.13.02.	Beban Kelengkapan Pakaian Kerja
9.1.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu
9.1.2.14.01.	Beban pakaian KORPRI
9.1.2.14.02.	Beban pakaian adat daerah
9.1.2.14.03.	Beban pakaian batik tradisional
9.1.2.14.04.	Beban pakaian olahraga
9.1.2.14.05.	Beban Pakaian Dinas Khusus
9.1.2.15.	Beban Perjalanan Dinas
9.1.2.15.01.	Beban perjalanan dinas dalam daerah
9.1.2.15.02.	Beban perjalanan dinas luar daerah
9.1.2.15.03.	Beban perjalanan dinas luar negeri
9.1.2.16.	Beban Perjalanan Pindah Tugas
9.1.2.16.01.	Beban perjalanan pindah tugas dalam daerah
9.1.2.16.02.	Beban perjalanan pindah tugas luar daerah
9.1.2.17.	Beban Pemulangan Pegawai
9.1.2.17.01.	Beban pemulangan pegawai yang pensiun dalam daerah
9.1.2.17.02.	Beban pemulangan pegawai yang pensiun luar daerah
9.1.2.18.	Beban Pemeliharaan
9.1.2.18.01.	Beban Pemeliharaan Tanah
9.1.2.18.02.	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
9.1.2.18.03.	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
9.1.2.18.04.	Beban Pemeliharaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan
9.1.2.18.05.	Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
9.1.2.18.06.	Dst.....
9.1.2.19.	Beban Jasa Konsultasi
9.1.2.19.01.	Beban Jasa Konsultasi Penelitian
9.1.2.19.02.	Beban Jasa Konsultasi Perencanaan
9.1.2.19.03.	Beban Jasa Konsultasi Pengawasan
9.1.2.19.04.	Beban Jasa Konsultasi Bimbingan Teknis
9.1.2.19.05.	Beban Jasa Konsultasi.
9.1.2.20.	Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga
9.1.2.20.01.	Beban Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat
9.1.2.20.02.	Beban Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga
9.1.2.21.	Beban Barang Untuk Dijual kepada Masyarakat/Pihak Ketiga
9.1.2.21.01.	Beban Barang Yang Akan Dijual Kepada Masyarakat
9.1.2.21.02.	Beban Barang Yang Akan Dijual Kepada Pihak Ketiga
9.1.2.22.	Beban Beasiswa Pendidikan PNS
9.1.2.22.01.	Beban beasiswa tugas belajar D3
9.1.2.22.02.	Beban beasiswa tugas belajar S1

Paraf Hierarki	
Sekda	✓
Asisten	✓
Kabag Hukum	✓

SKPDI	9.1.2.22.01.	koordinasi
SKFD	9.1.2.22.02.ait.	
1.		
2.		
3.		

Kode Rekening	Uraian
1	2
9.1.2.22.03.	Beban beasiswa tugas belajar S2
9.1.2.22.04.	Beban beasiswa tugas belajar S3
9.1.2.22.05.	Dst
9.1.2.23.	Beban kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS
9.1.2.23.01.	Beban kursus-kursus singkat/ pelatihan
9.1.2.23.02.	Beban sosialisasi
9.1.2.23.03.	Beban bimbingan teknis
9.1.2.23.04.	Dst
9.1.2.24.	Beban Honorarium Non Pegawai
9.1.2.24.01.	Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur
9.1.2.24.02.	Moderator
9.1.2.24.03.	Dst
9.1.2.25.	Honorarium PNS
9.1.2.25.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
9.1.2.25.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
9.1.2.25.03.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
9.1.2.25.04.	Honorarium Tim Penilaian Angka Kredit
9.1.2.26.	Honorarium Non PNS
9.1.2.26.01.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
9.1.2.26.02.	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap
9.1.2.26.03.	Upah Tenaga Harian
9.1.2.26.04.	Upah Tenaga Borongan
9.1.2.27.	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat
9.1.2.27.01.	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga
9.1.2.27.02.	Uang untuk diberikan kepada Pihak Masyarakat
9.1.2.27.03.	Uang Untuk diberikan Kepada Siswa atau Pelajar
9.1.2.28.	Beban Barang Dana BOS
9.1.2.28.01.	Beban Barang Dana BOS.
9.1.2.29.	Beban Barang Jasa BLUD. Rumah Sakit
9.1.2.29.01.	Beban Barang Jasa BLUD. Rumah Sakit.
9.1.2.30.	Beban Rumah Tangga Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
9.1.2.30.01.	Beban Rumah Tangga Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah .
9.1.2.31.	Beban Kesehatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
9.1.2.31.01.	Beban Kesehatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
9.1.2.32.	Beban Kelengkapan dan Kebutuhan Harian Rumah Tangga Kepala Daerah dan Wakil
9.1.2.32.01.	Kelengkapan dan Kebutuhan Harian Rumah Tangga Kepala Daerah dan Wakil Kepala
9.1.2.33.	Beban Sarana dan Prasarana Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
9.1.2.33.01.	Beban Sarana dan Prasarana Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
9.1.2.34.	Beban Kompensasi Bangunan Rumah dan Fasilitas Umum
9.1.2.34.01.	Beban Kompensasi Bangunan Rumah dan Fasilitas Umum.
9.1.2.35.	Beban Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
9.1.2.35.01.	Beban Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.
9.1.3.	Beban Bunga
9.1.3.01.	Bunga Utang Pinjaman
9.1.3.01.01.	Beban Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah

Paraf Hierarki	
Sekda	✓
Asisten	✓
Kabag Hukum	✓

SKPD/	9.1.3.01.01.	9.1.3.01.01.	9.1.3.01.01.
1.			
2.			
3.			

Kode Rekening	Uraian
1	2
9.1.3.01.02.	Beban Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Daerah lainnya
9.1.3.01.03.	Beban Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank
9.1.3.01.04.	Beban Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank
9.1.3.01.05.	Bunga Utang Pinjaman Lainnya
9.1.3.02.	Bunga Utang Obligasi
9.1.3.02.01.	Bunga Utang Obligasi
9.1.4.	Beban Subsidi
9.1.4.01.	Beban Subsidi
9.1.4.01.01.	Beban Subsidi kepada BUMN
9.1.4.01.02.	Beban Subsidi kepada BUMD
9.1.4.01.03.	Beban Subsidi kepada Pihak Ketiga Lainnya
9.1.5.	Beban Hibah
9.1.5.01.	Beban Hibah kepada Pemerintah
9.1.5.01.01.	Beban Hibah Barang kepada Pemerintah
9.1.5.02.	Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya
9.1.5.02.01.	Beban Hibah kepada Pemerintah Provinsi
9.1.5.02.02.	Beban Hibah kepada Pemerintah Kabupaten
9.1.5.02.03.	Beban Hibah kepada Pemerintah Kota
9.1.5.03.	Beban Hibah kepada Perusahaan Daerah/BUMD
9.1.5.03.01.	Beban Hibah kepada Perusahaan Daerah/BUMD.....
9.1.5.03.02.	Dst.....
9.1.5.04.	Beban Hibah kepada Kelompok Masyarakat
9.1.5.04.01.	Beban Hibah kepada Kelompok Masyarakat.....
9.1.5.05.	Beban Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan
9.1.5.05.01.	Beban Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan.....
9.1.5.05.02.	Dst ...
9.1.5.06.	Beban Hibah Dana BOS untuk Satuan Pendidikan Dasar***
9.1.5.06.01.	Beban Hibah Dana BOS ke Satuan Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota.....
9.1.5.06.02.	Dst ...
9.1.6.	Beban Bantuan Sosial
9.1.6.01.	Beban Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan
9.1.6.01.01.	Beban Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan ...
9.1.6.01.02.	Dst
9.1.6.02.	Beban Bantuan Sosial kepada Masyarakat
9.1.6.02.01.	Beban Bantuan Sosial kepada
9.1.6.02.02.	Dst
9.1.7.	Beban Penyusutan dan Amortisasi
9.1.7.01.	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin
9.1.7.01.01.	Beban Penyusutan Alat-Alat Besar Darat
9.1.7.01.02.	Beban Penyusutan Alat-Alat Besar Apung
9.1.7.01.03.	Beban Penyusutan Alat-alat Bantu
9.1.7.01.04.	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor
9.1.7.01.05.	Beban Penyusutan Alat Angkutan Berat Tak Bermotor
9.1.7.01.06.	Beban Penyusutan Alat Angkut Apung Bermotor
9.1.7.01.07.	Beban Penyusutan Alat Angkut Apung Tak Bermotor

Paraf Hierarki	
Sekda	
Asisten	
Kabag	
Wakil	

SKPD	9.1.7.01.05	7
SKPD	9.1.7.01.06	
1.	9.1.7.01.07	
2.		
3.		

Kode Rekening 1	Uraian 2
9.1.7.01.08.	Beban Penyusutan Alat Angkut Bermotor Udara
9.1.7.01.09.	Beban Penyusutan Alat Bengkel Bermesin
9.1.7.01.10.	Beban Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin
9.1.7.01.11.	Beban Penyusutan Alat Ukur
9.1.7.01.12.	Beban Penyusutan Alat Pengolahan Pertanian
9.1.7.01.13.	Beban Penyusutan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan Pertanian
9.1.7.01.14.	Beban Penyusutan Alat Kantor
9.1.7.01.15.	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga
9.1.7.01.16.	Beban Penyusutan Peralatan Komputer
9.1.7.01.17.	Beban Penyusutan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat
9.1.7.01.18.	Beban Penyusutan Alat Studio
9.1.7.01.19.	Beban Penyusutan Alat Komunikasi
9.1.7.01.20.	Beban Penyusutan Peralatan Pemancar
9.1.7.01.21.	Beban Penyusutan Alat Kedokteran
9.1.7.01.22.	Beban Penyusutan Alat Kesehatan
9.1.7.01.23.	Beban Penyusutan Unit-Unit Laboratorium
9.1.7.01.24.	Beban Penyusutan Alat Peraga/Praktek Sekolah
9.1.7.01.25.	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir
9.1.7.01.26.	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika
9.1.7.01.27.	Beban Penyusutan Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan
9.1.7.01.28.	Beban Penyusutan Radiation Aplication and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)
9.1.7.01.29.	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup
9.1.7.01.30.	Beban Penyusutan Peralatan Laboratorium Hidrodinamika
9.1.7.01.31.	Beban Penyusutan Senjata Api
9.1.7.01.32.	Beban Penyusutan Persenjataan Non Senjata Api
9.1.7.01.33.	Beban Penyusutan Alat Keamanan dan Perindungan
9.1.7.02.	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan
9.1.7.02.01.	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja
9.1.7.02.02.	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal
9.1.7.02.03.	Beban Penyusutan Bangunan Menara
9.1.7.02.04.	Beban Penyusutan Bangunan Bersejarah
9.1.7.02.05.	Beban Penyusutan Tugu Peringatan
9.1.7.02.06.	Beban Penyusutan Candi
9.1.7.02.07.	Beban Penyusutan Monumen/Bangunan Bersejarah
9.1.7.02.08.	Beban Penyusutan Tugu Peringatan Lain
9.1.7.02.09.	Beban Penyusutan Tugu Titik Kontrol/Pasti
9.1.7.02.10.	Beban Penyusutan Bangunan Rambu-Rambu
9.1.7.02.11.	Beban Penyusutan Bangunan Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara
9.1.7.03.	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan
9.1.7.03.01.	Beban Penyusutan Jalan
9.1.7.03.02.	Beban Penyusutan Jembatan
9.1.7.03.03.	Beban Penyusutan Bangunan Air Irigasi
9.1.7.03.04.	Beban Penyusutan Bangunan Air Pasang Surut
9.1.7.03.05.	Beban Penyusutan Bangunan Air Rawa
9.1.7.03.06.	Beban Penyusutan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam

Paraf Hierarki	
Sekda	✓
Asisten	✓
Kabag	✓
St.kum	

SKPD/ E	9.1.7.03.05	akarsa	✓
SKPD/ E	9.1.7.03.06	dit:	
1.			
2.			
3.			

Kode Rekening 1	Uraian 2
9.1.7.03.07.	Beban Penyusutan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah
9.1.7.03.08.	Beban Penyusutan Bangunan Air Bersih/Baku
9.1.7.03.09.	Beban Penyusutan Bangunan Air Kotor
9.1.7.03.10.	Beban Penyusutan Bangunan Air
9.1.7.03.11.	Beban Penyusutan Instalasi Air Minum/Air Bersih
9.1.7.03.12.	Beban Penyusutan Instalasi Air Kotor
9.1.7.03.13.	Beban Penyusutan instalasi Pengolahan Sampah
9.1.7.03.14.	Beban Penyusutan Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan
9.1.7.03.15.	Beban Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik
9.1.7.03.16.	Beban Penyusutan Instalasi Gardu Listrik
9.1.7.03.17.	Beban Penyusutan Instalasi Perlahanan
9.1.7.03.18.	Beban Penyusutan Instalasi Gas
9.1.7.03.19.	Beban Penyusutan Instalasi Pengaman
9.1.7.03.20.	Beban Penyusutan Jaringan Air Minum
9.1.7.03.21.	Beban Penyusutan Jaringan Listrik
9.1.7.03.22.	Beban Penyusutan Jaringan Telepon
9.1.7.03.23.	Beban Penyusutan Jaringan Gas
9.1.7.04.	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud
9.1.7.04.01.	Beban Amortisasi Goodwill
9.1.7.04.02.	Beban Amortisasi Lisensi dan franchise
9.1.7.04.03.	Beban Amortisasi Hak Cipta
9.1.7.04.04.	Beban Amortisasi Paten
9.1.7.04.05.	Beban Amortisasi Aset Tidal Berwujud Lainnya
9.1.8.	Beban Penyisihan Piutang
9.1.8.01.	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan
9.1.8.01.01.	Beban Penyisihan Piutang Pajak
9.1.8.01.02.	Beban Penyisihan Piutang Retribusi
9.1.8.01.03.	Beban Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
9.1.8.01.04.	Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah
9.1.8.01.05.	Beban Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat
9.1.8.01.05.	Beban Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya
9.1.8.01.07.	Beban Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya
9.1.8.01.08.	Beban Penyisihan Piutang Bantuan Keuangan
9.1.8.01.09.	Beban Penyisihan Piutang Hibah
9.1.8.01.10.	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Lainnya
9.1.8.01.11.	Dst
9.1.8.02.	Beban Penyisihan Piutang Lainnya
9.1.8.02.01.	Beban Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang
9.1.8.02.02.	Beban Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada Entitas
9.1.8.02.03.	Beban Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran
9.1.8.02.04.	Beban Penyisihan Bagian lancar Tuntutan Ganti Rugi
9.1.8.02.05.	Beban Penyisihan Uang Muka
9.1.8.02.06.	Dst
9.1.9.	Beban Lain-lain
9.1.9.01	Beban Penurunan Nilai Investasi

Paraf Hierarki	
Sekda	<i>[Signature]</i>
Asisten	<i>[Signature]</i>
Kabag Hukum	<i>[Signature]</i>

SKPD	9.1.9.01	Paraf Koordinasi	<i>[Signature]</i>
SKPD	9.1.9.01	Paraf Pemrakarsa	<i>[Signature]</i>
1.		Paraf Terkait:	
2.			
3.			

Kode Rekening 1	Uraian 2
9.1.9.01.01.	Beban Penurunan Nilai Investasi
9.1.9.02.	Beban Penyisihan Dana Bergulir
9.1.9.02.01.	Beban Penyisihan Dana Bergulir
9.1.9.03.	Beban Lain-lain
9.1.9.03.01.	Beban Lain-lain
9.2.	BEBAN TRANSFER
9.2.1.	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah
9.2.1.01.	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota
9.2.1.01.01.	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota....
9.2.1.01.02.	Dst....
9.2.1.02.	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Provinsi.
9.2.1.02.01.	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Provinsi ..
9.2.1.03.	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa
9.2.1.03.01.	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa.
9.2.1.04.	Beban Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa
9.2.1.04.01.	Beban Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa.
9.2.1.05.	Beban Transfer Bagi Hasil Retribusi Parkir Berlangganan
9.2.1.05.01.	Beban Transfer Bagi Hasil Retribusi Parkir Berlangganan.
9.2.2.	Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya
9.2.2.01.	Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya Kepada Pemerintahan
9.2.2.01.01.	Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota.....
9.2.2.01.02.	Dst.....
9.2.3.	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya
9.2.3.01.	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Propinsi
9.2.3.01.01.	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Propinsi....
9.2.3.01.02.	Dst.....
9.2.3.02.	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Kabupaten/Kota
9.2.3.02.01.	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Kabupaten/Kota.....
9.2.3.02.02.	Dst.....
9.2.4.	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa
9.2.4.01.	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa
9.2.4.01.01.	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa....
9.2.4.01.02.	Dst....
9.2.5.	Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya
9.2.5.01.	Beban Transfer Bantuan Kepada Partai Politik
9.2.5.01.01.	Beban Transfer Bantuan Kepada Partai Politik.....
9.2.5.01.02.	DsL...
9.2.6.	Beban Transfer Dana Otonomi Khusus
9.2.6.01.	Beban Transfer Dana Otsus Kabupaten/Kota
9.2.6.01.01.	Beban Transfer Dana Otsus Kabupaten/Kota...
9.2.6.01.02.	Dst....
9.3.	DEFISIT NON OPERASIONAL
9.3.1.01.	Defisit Penjualan Aset Non Lancar - LO
9.3.1.01.01.	Defisit Penjualan Aset Non Lancar - LO
9.3.1.01.01.01.	Defisit Penjualan Aset Tanah - LO

Paraf Hierarki	
Sekda	
Asisten	
Kabag	
Stekum	

Paraf Koordinasi	
SKPD/Bagian Pemrakarsa	
SKPD/Bagian Teknis	
1.	
2.	
3.	

Kode Rekening	Uraian
1	2
9.3.1.01.02.	Defisit Penjualan Aset Peralatan dan Mesin - LO
9.3.1.01.03.	Defisit Penjualan Aset Gedung dan Bangunan - LO
9.3.1.01.04.	Defisit Penjualan Aset Non Lancar/Aset Tetap Lainnya - LO
9.3.1.01.05.	Defisit Pelepasan Investasi Jangka Panjang - LO
9.3.1.01.06.	Defisit Penjualan Aset Lain-lain - LO
9.3.1.01.07.	Dst
9.3.2.	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO
9.3.2.01.	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO
9.3.2.01.01.	Defisit Penyelesaian Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan - LO
9.3.2.01.02.	Defisit Penyelesaian Utang Dari Lembaga Keuangan Bukan Bank - LO
9.3.2.01.03.	Defisit Penyelesaian Utang Dalam Negeri - Obligasi - LO
9.3.2.01.04.	Defisit Penyelesaian Utang Pemerintah Pusat - LO
9.3.2.01.05.	Defisit Penyelesaian Utang Pemerintah Provinsi - LO
9.3.2.01.06.	Defisit Penyelesaian Utang Pemerintah Kabupaten/Kota - LO
9.3.2.01.07.	Defisit Penyelesaian Premium (Diskonto) Obligasi - LO
9.3.2.01.08.	Dst
9.3.3.	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO
9.3.3.01.	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO
9.3.3.01.01.	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO
9.3.3.01.02.	Defisit Pelepasan Investasi Jangka Pendek - LO
9.3.3.01.03.	Defisit Pelepasan Aset Non Lancar
9.4.	BEBAN LUAR BIASA
9.4.1.	Beban Luar Biasa
9.4.1.01.	Beban Luar Biasa
9.4.1.01.01.	Beban Bencana Alam
9.4.1.01.02.	Beban Luar Biasa Lainnya
9.4.1.01.03.	Dst

BUPATI PACITAN



INDARTATO




Lampiran V : Peraturan Bupati Pacitan


Nomor :

Tanggal :

**REKENING PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2017**

Kode Rekening 1	Uraian 2
1.01.01.1.	Kas Daerah
6.	PEMBIAYAAN DAERAH
6.1.	Penerimaan Pembiayaan Daerah
6.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya
6.1.1.01.	Pelampauan penerimaan PAD
6.1.1.01.01.	Pajak Daerah
6.1.1.01.02.	Retribusi Daerah
6.1.1.01.03.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
6.1.1.01.04.	Lain-Lain PAD yang sah
6.1.1.02.	Pelampauan penerimaan Dana Perimbangan
6.1.1.02.01.	Bagi Hasil Pajak
6.1.1.02.02.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam
6.1.1.02.03.	Dana Alokasi Umum
6.1.1.02.04.	Dana Alokasi Khusus
6.1.1.03.	Pelampauan penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah
6.1.1.03.01.	Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
6.1.1.03.02.	Penerimaan Lain-lain
6.1.1.03.03.	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
6.1.1.03.04.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
6.1.1.03.05.	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau pemerintah daerah lainnya
6.1.1.04.	Sisa Penghematan Belanja atau akibat lainnya
6.1.1.04.01.	Belanja Pegawai dari Belanja Tidak Langsung
6.1.1.04.02.	Belanja Pegawai dari Belanja Langsung
6.1.1.04.03.	Belanja Barang dan Jasa
6.1.1.04.04.	Belanja Modal
6.1.1.04.05.	Belanja Bunga
6.1.1.04.06.	Belanja Subsidi
6.1.1.04.07.	Belanja Hibah
6.1.1.04.08.	Belanja Bantuan Sosial
6.1.1.04.09.	Belanja Belanja Bagi Hasil
6.1.1.04.10.	Belanja Bantuan Keuangan
6.1.1.04.11.	Belanja Belanja Tidak Terduga
6.1.1.05.	Kewajiban kepada pihak ketiga sampal dengan akhir tahun belum terselesaikan
6.1.1.05.01.	Uang jaminan
6.1.1.05.02.	Potongan Taspen
6.1.1.05.03.	Potongan Beras
6.1.1.05.04.	Askes

Paraf Hierarki	
Sekda	
Asisten	
Kabag	
Kum	

Paraf Koordinasi	
SKPD/ Bagian Pemrakarsa	
SKPD/ Bagian Terkait:	
1. _____	
2. _____	
3. _____	

Kode Rekening	Uraian
1	2
6.1.1.05.05.	Dst.....
6.1.1.06.	Kegiatan lanjutan
6.1.1.06.01.	Kegiatan lanjutan
6.1.1.06.02.	Dst
6.1.1.07.	Pelampauan Penerimaan Pembiayaan
6.1.1.07.01.	Pelampauan Pencairan Dana Cadangan
6.1.1.07.02.	Pelampauan Penerimaan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
6.1.1.07.03.	Pelampauan Penerimaan Pinjaman Daerah
6.1.1.07.04.	Pelampauan Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman
6.1.1.07.05.	Pelampauan Penerimaan Piutang Daerah
6.1.1.07.06.	Pelampauan Penerimaan Pengembalian Modal Investasi
6.1.1.07.07.	Dst
6.1.1.08.	Penghematan Pengeluaran Pembiayaan
6.1.1.08.01.	Penghematan Pembentukan Dana Cadangan
6.1.1.08.02.	Penghematan Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
6.1.1.08.03.	Penghematan Pembayaran Pokok Utang
6.1.1.08.04.	Penghematan Pemberian Pinjaman Daerah
6.1.1.08.05.	Dst
6.1.2.	Pencairan Dana Cadangan
6.1.2.01.	Pencairan Dana Cadangan
6.1.2.01.01.	Pencairan Dana Cadangan nomor
6.1.2.01.02.	Dst.....
6.1.3.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
6.1.3.01.	Hasil penjualan perusahaan milik daerah/BUMD
6.1.3.01.01.	BUMD.....
6.1.3.01.02.	Dst.....
6.1.3.02..	Hasil penjualan aset milik pemerintah daerah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga
6.1.3.02.01.
6.1.3.02.02.	Dst.....
6.1.4.	Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah
6.1.4.01.	Penerimaan Pinjaman Daerah dari Pemerintah
6.1.4.01.01.	Penerusan pinjaman.....
6.1.4.01.02.	Dst.....
6.1.4.02.	Penerimaan Pinjaman Daerah dari pemerintah daerah lain
6.1.4.02.01.	Pemerintah daerah
6.1.4.02.02.	Dst.....
6.1.4.03.	Penerimaan Pinjaman Daerah dari lembaga keuangan bank
6.1.4.03.01.	Bank
6.1.4.03.02.	Dst.....
6.1.4.04.	Penerimaan Pinjaman Daerah dari lembaga keuangan bukan bank
6.1.4.04.01.	Lembaga keuangan bukan bank
6.1.4.04.02.	Dst.....

Paraf Hierarki	
Sekda	<input checked="" type="checkbox"/>
Asisten	<input checked="" type="checkbox"/>
Kabag Hukum	<input checked="" type="checkbox"/>

Paraf Koordinasi	
SKPD/ Bagian Pemrakarsa	<input checked="" type="checkbox"/>
SKPD/ Bagian Terkait:	
1. _____	
2. _____	
3. _____	

Kode Rekening	Uraian
1	2
6.1.4.05.	Penerimaan hasil penerbitan Obligasi Daerah
6.1.4.05.01.	Obligasi atas nama..
6.1.4.05.02.	obligasi nomor.....
6.1.4.05.03.	Dst.....
6.1.5.	Penerimaan Kembali Penerimaan Pinjaman
6.1.5.01.	Penerimaan Kembali Penerimaan Pinjaman Daerah
6.1.5.01.01.	Penerimaan Kembali Penerimaan Pinjaman Swasta
6.1.5.01.02.	Dst.....
6.1.6.	Penerimaan piutang daerah
6.1.6.01.	Penerimaan piutang daerah dari pendapatan daerah
6.1.6.01.01.	Penerimaan piutang daerah dari pendapatan pajak daerah
6.1.6.01.02.	Penerimaan piutang daerah dari pendapatan retribusi daerah
6.1.6.01.03.	Penerimaan piutang daerah dari lain-lain pendapatan yang sah
6.1.6.02.	Penerimaan piutang daerah dari pemerintah
6.1.6.02.01.	Penerimaan piutang daerah dari pemerintah
6.1.6.03.	Penerimaan piutang daerah dari pemerintah daerah lain
6.1.6.03.01.	Pemerintah daerah
6.1.6.03.02.	Dst.....
6.1.6.04.	Penerimaan piutang daerah dari lembaga keuangan bank
6.1.6.04.01.	Bank
6.1.6.04.02.	Dst.....
6.1.6.05.	Penerimaan piutang daerah dari lembaga keuangan bukan bank
6.1.6.05.01.	Lembaga keuangan bukan bank
6.1.6.05.02.	Dst.....
6.1.6.06.	Penerimaan Piutang Revolping
6.1.6.06.01.	Penerimaan Piutang Revolping.
6.1.6.06.02.	Penerimaan piutang.
6.1.7.	Penerimaan Dari Selisih Bayar
6.1.7.01.	Penerimaan Dari Selisih Bayar Kasda
6.1.7.01.01.	Penerimaan dari selisih bayar kas daerah
6.1.7.06.	Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir
6.1.7.06.01.	Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir.
6.1.7.06.02.	Penerimaan Kembali Dana Bergulir dari Kelompok Masyarakat
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan Daerah
6.2.1.	Pembentukan Dana Cadangan
6.2.1.01.	Pembentukan Dana Cadangan
6.2.1.01.01.	Pembentukan Dana Cadangan
6.2.1.01.02.	Dst.....
6.2.2.	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
6.2.2.01.	Badan usaha milik pemerintah (BUMN)
6.2.2.01.01.	BUMN
6.2.2.01.02.	Dst.....

Paraf Hierarki	
Sekda	<input checked="" type="checkbox"/>
Asisten	<input checked="" type="checkbox"/>
Kabag Sekum	<input checked="" type="checkbox"/>

Paraf Koordinasi	
SKPD/ Bagian Pemrakarsa	<input checked="" type="checkbox"/>
SKPD/ Bagian Terkait:	
1. _____	
2. _____	
3. _____	

Kode Rekening 1	Uraian 2
6.2.2.02.	Badan usaha milik daerah (BUMD)
6.2.2.02.01.	Bank Jatim
6.2.2.02.02.	Bank Perkreditan Rakyat
6.2.2.02.03.	Perusahaan Daerah Air Minum
6.2.2.02.04.	Perusda Batu Alam
6.2.2.02.05.	Lembaga Penjamin Kredit Daerah (LPKD)
6.2.2.02.06.	Perusahaan Daerah Aneka Usaha
6.2.2.03.	Badan usaha milik swasta
6.2.2.03.01.	Dana Bergulir Koperasi
6.2.2.03.02.	Dst.....
6.2.2.04.	Dana Bergulir
6.2.2.04.01.	Dana Bergulir Dinas Koperasi , Perindustrian dan perdagangan
6.2.2.04.02.	Dana Bergulir Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan
6.2.3.	Pembayaran Pokok Utang
6.2.3.01.	Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo kepada Pemerintah
6.2.3.01.01.	Penerusan pinjaman (SLA)
6.2.3.01.02.	Rekening Dana Investasi (RDI)
6.2.3.02.	Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo kepada Pemerintah daerah lain
6.2.3.02.01.	Pemerintah daerah
6.2.3.02.02.	Dst....
6.2.3.03.	Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo kepada Lembaga Keuangan Bank
6.2.3.03.01.	Bank BRI
6.2.3.03.02.	Dst ...
6.2.3.04.	Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo kepada Lembaga Keuangan bukan Bank
6.2.3.04.01.	Lembaga keuangan bukan Bank
6.2.3.04.02.	Dst ...
6.2.3.05.	Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo kepada Pemerintah
6.2.3.05.01.	Penerusan pinjaman...
6.2.3.05.02.	Dst...
6.2.3.06.	Pembayaran Pokok Utang sebelum Jatuh Tempo kepada Pemerintah Daerah lain
6.2.3.06.01.	Pemerintah daerah....
6.2.3.06.02.	Dst ...
6.2.3.07.	Pembayaran Pokok Utang Sebelum Jatuh Tempo kepada lembaga keuangan bank
6.2.3.07.01.	Bank
6.2.3.07.02.	DstL...
6.2.3.08.	Pembayaran Pokok Utang sebelum Jatuh Tempo kepada Lembaga keuangan bukan bank
6.2.3.08.01.	Lembaga keuangan bukan bank...
6.2.3.08.02.	Dst...
6.2.3.09.	Pelunasan Obligasi daerah pada saat jatuh tempo
6.2.3.09.01.	Obligasi atas nama
6.2.3.09.02.	Obligasi nomor.....
6.2.3.09.03.	Dst

Paraf Hierarki		Paraf Koordinasi	
Sekda		SKPD/ Bagian Pemrakarsa	
Asisten		SKPD/ Bagian Terkait:	
Kabag		1. _____	
Kurum		2. _____	
		3. _____	

Kode Rekening 1	Uraian 2
6.2.3.10.	Pembelian kembali obligasi daerah sebelum jatuh tempo
6.2.3.10.01.	Obligasi alas nama
6.2.3.10.02.	Obligasi nomor....
6.2.3.10.03.	Dst
6.2.4.	Pemberian Pinjaman Daerah
6.2.4.01.	Pemberian Pinjaman daerah kepada Pemerintah
6.2.4.01.01.	Pemerintah
6.2.4.02.	Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Daerah lain
6.2.4.02.01.	Pemerintah daerah ...
6.2.4.03.	Pemberian Pinjaman Revolping
6.2.4.03.01.	Pemberian Pinjaman Revolping.
6.2.4.03.02.	Pemberian Pinjaman.
6.2.5.	Pengeluaran dari selisih bayar
6.2.5.01.	Pengeluaran dari selisih bayar Kas daerah
6.2.5.01.01.	Pengeluaran dari selisih bayar Kasda
6.2.5.01.02.	Pengeluaran XXX
6.3.	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan
8.	Rekening Koran Antar Unit
8.1.	RK BUD
8.1.1.	RK BUD terhadap Bendahara Penerimaan SKPD
8.1.2.	RK BUD terhadap Bendahara Pengeluaran SKPD
8.1.3.	RK BUD terhadap Pengurus Barang SKPD
8.2.	RK SKPD
8.2.1.	RK Bendahara Penerimaan SKPD terhadap BUD
8.2.2.	RK Bendahara Pengeluaran SKPD terhadap BUD
8.2.3.	RK Pengurus Barang SKPD terhadap BUD

BUPATI PACITAN



INDARTATO